

**DINAMIKA PEMERINTAHAN KABUPATEN SUKOHARJO
1945-1950**

*Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Yogyakarta Untuk
Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan*



Oleh :
Edwin Dwi Fadoli
06406244033

**PROGAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2012**

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul “ DINAMIKA PEMERINTAHAN KABUPATEN SUKOHARJO 1942-1950 ” ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diujikan.

Yogyakarta, 23 Mei 2012

Pembimbing I

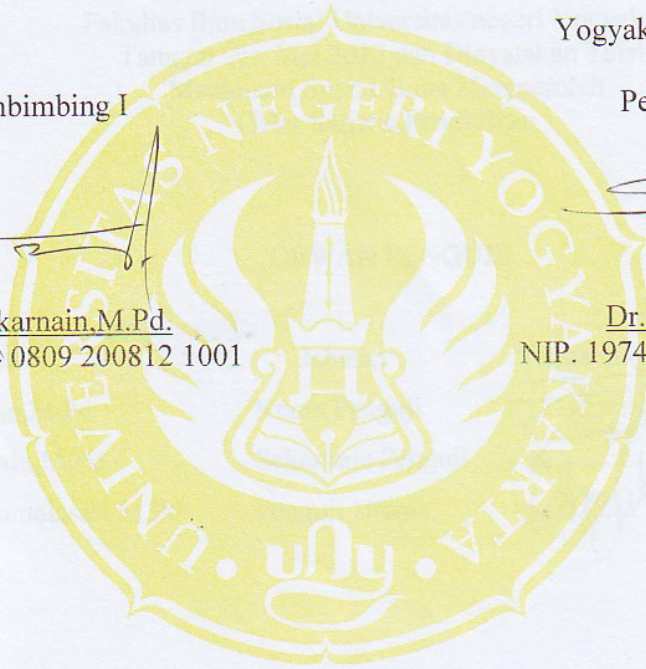
Pembimbing II

Zulkarnain, M.Pd.

NIP. 1974 0809 200812 1001

Dr. Aman, M.Pd

NIP. 19741015 2003 12 1 001



Yogyakarta, 1 Agustus 2012

Dekan,

Dr. ...

NIP. 19620221 196005 1 001

PENGESAHAN

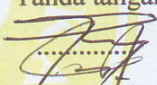
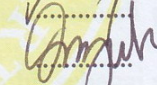
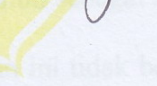
“DINAMIKA PEMERINTAHAN KABUPATEN SUKOHARJO 1945-1950”

SKRIPSI

Oleh :
Edwin Dwi Fadoli
06406244033

Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial Universitas negeri Yogyakarta
Tanggal 20 Mei 2012 dan Dinyatakan Telah
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Pendidikan

DEWAN PENGUJI

Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Dr. Aman, M.Pd	Ketua Penguji		1-8-2012
Zulkarnain, M.Pd	Sekretaris Penguji		1-8-2012
Dyah Kumalasari, M.Pd	Penguji Utama		1-8-2012

Yogyakarta, 1 Agustus 2012

Fakultas Ilmu Sosial

Dekan



Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag
NIP. 196220321 198903 1 003

PERNYATAAN

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Edwin Dwi Fadoli

Nim : 06406244033

Prodi : Pendidikan Sejarah

Jurusan : Pendidikan Sejarah

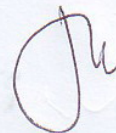
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial (FIS)

Judul : Dinamika Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo 1945-1950.

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah pekerjaan sendiri dan sepengetahuan saya tidak berisi materi yang pernah dipublikasikan dan ditulis oleh orang lain atau telah digunakan sebagai persyaratan penyelesaian studi di perguruan tinggi lain kecuali pada bagian-bagian tertentu yang saya ambil sebagai sumber atau data referensi. Apabila ternyata terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Yogyakarta, Mei 2012

Yang Menyatakan



Edwin Dwi Fadoli
NIM. 06406244033

MOTTO

1. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat orang-orang iman dan orang-orang yang diberi ilmu dan Allah adalah dzat yang maha mengetahui terhadap apa-apa yang diamalkan oleh mereka.(Q.S. Al-Mujadalah : 11)
2. Kunci sukses seseorang terletak pada kesadaran untuk berusaha dengan giat dan berdoa, tidak terlepas dari dukungan orang-orang yang disayangi serta doa dari Ayah dan Ibu.
3. Seorang pemenang itu tidak pernah menyerah, karena yang menyerah tidak pernah menang.(unknown)

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan untuk :

1. Ibu dan ayah penulis yang dengan kesabarannya telah mendorong dan membimbing penulis dari awal sampai akhir. Terima kasih atas cinta dan kasih sayang beliau berdua selama ini.
2. Nenek penulis yang telah memberikan dorongan, doa, dan dukungan kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini. Terima kasih atas doa dan dukungannya.
3. Para guru dan inspirator, yang telah mengajari, membimbing, mendorong dan memberikan pengalaman-pengalamannya yang berharga untuk bekal penulis.
4. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini

Penulis bingkiskan untuk :

1. Adik-adikku, yang selalu menemani tiap langkah penulis dari awal sampai akhir. Terima kasih untuk semua semangat, dukungan dan doanya.
2. Sahabat-sahabatku, terima kasih atas waktu kalian dalam menemani penulis selama kuliah hingga skripsi ini berlangsung.

“DINAMIKA PEMERINTAHAN KABUPATEN SUKOHARJO 1942-1950”

Oleh :
Edwin Dwi Fadoli
06406244033

ABSTRAK

Penelitian sejarah ini bertujuan untuk, memberikan gambaran tentang kondisi Kabupaten Sukoharjo sebelum dan sesudah proklamasi kemerdekaan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sejarah berdirinya Kabupaten Sukoharjo, dan memberikan gambaran tentang perkembangan pemerintahan di Kabupaten Sukoharjo pada kurun waktu 1945 sampai dengan tahun 1950.

Skripsi ini menggunakan metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah meliputi heuristik, kritik, interpretasi, dan penyajian. Metode ini dimulai dari usaha penulis mencari, memilah, dan menyeleksi sumber sejarah, baik sumber primer maupun sekunder mengenai dinamika pemerintahan Kabupaten Sukoharjo 1945-1950. Tahap selanjutnya adalah mengkritisi dokumen dinamika pemerintahan Kabupaten Sukoharjo seperti Maklumat dari Pakubuwono XII tanggal 30 April 1946, sehingga ditemukan dokumen yang benar-benar nyata dan dapat dipercaya. Tahap ketiga adalah penilaian dan pemahaman penulis terhadap isi dokumen, sehingga dapat disatukan dengan sumber-sumber yang telah ada. Tahap terakhir adalah usaha penulis untuk mengembangkan tulisan dalam bentuk skripsi dengan dengan judul Dinamika Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo 1945-1950.

Hasil penelitian ini yang *pertama* menunjukkan bahwa terjadi kekacauan politik di Surakarta setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945 dengan adanya pembentukan pemerintahan baru yang melepaskan diri dari pemerintahan *kutha* Surakarta dengan berdirinya kabupaten-kabupaten baru di wilayah *Kutha* Surakarta salah satunya adalah Kabupaten Sukoharjo. *Kedua*, Kabupaten Sukoharjo sebelum berdiri merupakan wilayah *Kutha* Surakarta. Kabupaten Sukoharjo melepaskan diri dari pemerintahan *Kutha* Surakarta pada tanggal 15 Juli 1946 dengan keluarnya penetapan pemerintah no. 16/SD tanggal 15 Juli 1946. *Ketiga*, menunjukkan adanya perkembangan sistem pemerintahan Kabupaten Sukoharjo menurut periodisasi perundang-undangan yang berlaku pada tahun 1945-1950 yang terbagi atas periode menurut Undang-undang No : 1 tahun 1945, menurut Undang-undang No : 22 tahun 1948 dan periode Undang-undang No : 44 tahun 1950. Dengan terbentuknya badan Perwakilan Daerah dan Badan Eksekutif yang dipimpin oleh kepala daerah, dan juga telah dibentuknya Dewan Perwakilan daerah yang anggotanya dipilih dari dan oleh DPRD yang dilengkapi sekretaris DPRD sekaligus menjabat sebagai sekretaris kepala daerah.

Kata Kunci : Dinamika Pemerintahan, Kabupaten Sukoharjo, 1945-1950.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Dinamika Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo 1945-1950”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.

Penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari petunjuk, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuannya. Disadari bahwa tanpa bantuan pihak-pihak tersebut, penulisan skripsi ini tidak akan bisa selesai. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd, M.A, selaku rektor UNY yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar di Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan juga sebagai pembimbing akademik yang telah memberikan berbagai kemudahan dalam penelitian ini.
3. Bapak M. Nur Rokhman, M.Pd selaku kajar Pendidikan Sejarah yang senantiasa memotivasi dan memberikan arahan kepada penulis.

4. Bapak Zulkarnain, M.Pd selaku dosen pembimbing I skripsi yang telah memberikan arahan dan pengarahannya selama penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Aman, M.Pd selaku dosen pembimbing II skripsi yang telah memberikan arahan dan pengarahannya selama penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Staf Dosen di Jurusan Pendidikan Sejarah yang telah memberikan wawasan dan pengetahuan selama belajar di Program Studi Pendidikan Sejarah.
7. Staf dan pengurus Perpustakaan Pusat Universitas Negeri Yogyakarta, Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Perpustakaan Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta, Perpustakaan Kolose Santo Ignatius Yogyakarta, Perpustakaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Perpustakaan FIB UGM, Perpustakaan FISIPOL UGM, Perpustakaan Masrip Singaribun UGM, Perpustakaan Balai Kajian Sejarah dan Nilai-Nilai Tradisional Yogyakarta, Perpustakaan Universitas Sebelas Maret, Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan pelayanan peminjaman buku-buku yang berguna untuk keperluan kuliah maupun penulisan skripsi ini.
8. Staf Pegawai di Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Sukoharjo, yang telah membantu penulis dalam mencari sumber-sumber penulisan skripsi ini.
9. Seluruh narasumber yang telah bersedia memberikan informasi dalam penelitian ini.

10. Untuk Jati, Indi, Linda, Efri, Budi, Banu, Kuswono, Teguh, Lutfi, Jemi, Daru, Adnan, anik, Eka, terima kasih untuk persahabatannya dan kebersamaannya selama ini.
11. Kepada seluruh teman-teman di Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta angkatan 2006 terima kasih untuk kerja samanya selama ini. Semoga Tuhan memberikan kemudahan pada kita meraih cita dan cinta.
12. Kepada teman-teman C20 (Aidin, Angga, Bowo, Hari, Arif) terima kasih untuk kebersamaannya.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kritik dan saran sangat penulis harapkan demi perkembangan di masa depan. Akhir kata dari penulis, semoga hasil penelitian ini memberikan manfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, Mei 2012

Penyusun

Edwin Dwi Fadoli

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR SINGKATAN	xiv
DAFTAR ISTILAH	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Historiografi Yang Relevan.....	15
G. Metode Penelitian dan Pendekatan Peneliti	19
H. Sistematika Pembahasan	26

**BAB II KEADAAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO SEBELUM DAN
SESUDAH PROKLAMASI KEMERDEKAAN 17 AGUSTUS 1945**

A. Keadaan Geografis Kabupaten Sukoharjo.....	29
B. Masa Pendudukan Jepang (1942-1945).....	31
1. Keadaan Politik dan Pemerintahan	31
2. Keadaan Sosial Ekonomi	36
C. Terbentuknya KNI Daerah Surakarta dan Berdirinya Daerah Istimewa Surakarta (DIS).....	39
D. Pemberontakan Tan Malaka	44
E. Masa Pendudukan Belanda (1945-1949).....	47
1. Keadaan Politik dan Pemerintahan	47
2. Keadaan Sosial Ekonomi	57
3. Keadaan Sosial Budaya.....	60
F. Kasunanan Menghadapi Penetrasi Barat	64

BAB III SEJARAH BERDIRINYA KABUPATEN SUKOHARJO

A. Sejarah Berdirinya Kabupaten Sukoharjo.....	67
B. Perjalanan Sejarah Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo Tahun 1945-1950	71
1. Penyelenggaraan Pemerintahan Pertama Kali (15 Juli 1946)	71
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Agresi Militer Belanda Pertama (21 Juli 1947).....	74
3. Peristiwa Berdarah Oktober 1948	80

4. Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Agresi Militer Belanda ke dua (19 Desember 1948)	83
BAB IV PERKEMBANGAN SISTEM PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 1946-1950	
A. Tinjauan Umum	87
B. Perkembangan Pemerintahan di Kabupaten Sukoharjo	88
1. Periode Menurut Undang-undang No : 1 Tahun 1945	88
2. Periode Menurut Undang-undang No : 22 Tahun 1948	90
3. Periode Menerut Undang-undang No : 44 Tahun 1950	95
C. Perkembangan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Sukoharjo	99
D. Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan	100
1. Bagian Pembangunan	100
2. Bagian Pengelolaan Keuangan	101
E. Peradilan dan Hukum	101
BAB V KESIMPULAN	103
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN	110

DAFTAR SINGKATAN

ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
AFNEI	: <i>Allied Forces Netherlands East Indies</i>
AMRI	: Angkatan Muda Republik Indonesia
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BKR	: Badan Keamanan Rakyat
BPR	: Badan Perwakilan Rakyat
BPRD	: Badan Perwakilan Rakyat Daerah
CADT	: <i>Corp Administration Daerah Tentara</i>
CSA	: <i>Corp Sukarela Angkatan Perang</i>
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPRS	: Dewan Perwakilan Rakyat Sementara
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DIS	: Daerah Istimewa Surakarta
ELS	: <i>Eropeesche Lagere School</i>
FDR	: Front Demokrasi Rakyat
KMB	: Konferensi Meja Bundar
KNIL	: <i>Koninklijk Nerderland Indisch Leger</i>
Ko.PPS	: Komando Pertempuran Panembahan Senopati
KTN	: Komisi Tiga Negara
KDS	: Komando Daerah Solo
KNID	: Komite Nasional Indonesia Daerah

KST	: <i>Korps Speciale Troepen</i>
LBB	: Lasykar Barisan Benteng
MBB	: Mobil Brigade Besar
MBK	: Mobil Brigade Karisidenan
MIAI	: Majelis Islam A'la Indonesia
MULO	: <i>Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs</i>
MBKD	: Markas Besar Komando Jawa
MBKS	: Markas Besar Komando Sumatera
MBT	: Markas Besar Tentara
MAKMUR	: Maju Aman Konstitusional Mantap Unggul Rapi
NICA	: <i>Netherlands Indies Civil Administration</i>
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
NIT	: Negera Indonesia Timur
ORI	: Oeang Republik Indonesia
PDRI	: Pemerintah Darurat Republik Indonesia
PETA	: Pembela Tanah Air
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PKMN	: Perkempalan Kawula Mangku Negaran
PMI	: Palang Merah Indonesia
PKS	: Pakempalan Kawula Surakarta
PUTERA	: Pusat Penaga Rakyat
RIS	: Republik Indonesia Serikat
RI	: Republik Indonesia

RMS	: Republik Maluku Selatan
RVD	: <i>Regering Voorlichting Dienst</i>
SEAC	: <i>South East Asia Command</i>
TBS	: Territorial Bataliyon Surakarta
TKR	: Tentara Keamanan Rakyat
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
TRI	: Tentara Republik Indonesia
UNCI	: <i>United Nations Commissions For Indonesia</i>

DAFTAR ISTILAH

<i>Appanage</i>	: Tanah Lungguh
<i>Cease Fire</i>	: Gencatan senjata
<i>Cease Fire Order</i>	: Penghentian tembak-menembak yang bersifat tetap
<i>De facto</i>	: Secara fakta/kenyataan
<i>Garis Van Mook</i>	: Garis demarkasi setelah agresi militer Belanda I
<i>Gun</i>	: Distrik/Kawedanan
<i>Ken</i>	: <i>Regentschap</i>
<i>Ku</i>	: Desa
<i>Kinrohosi</i>	: Kerja Bakti
<i>Ondernrming Wacht</i>	: Pasukan keamanan pabrik gula
<i>Show of Foece</i>	: Parade besar-besaran
<i>Syuu</i>	: Karesidenan
<i>Si</i>	: <i>Statsgemeente</i>
<i>Son</i>	: <i>Onderdistrict</i>
<i>Vorsterlanden</i>	: Tanah Yang dimiliki raja-raja
<i>Wijkmeester</i>	: Kepala kampung
<i>Wazir</i>	: Penasihat Raja
<i>Wehrkreise</i>	: Lingkaran Pertahanan
<i>Wingate</i>	: Menyusup kembali kedaerah asalnya
<i>Zuiverinas Actie</i>	: Aksi Pembersihan

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Salinan Peraturan Daerah No.16/SD 1946 Presiden Republik Indonesia.....	116
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 17 1986 tentang Hari Lahir Kabupaten Sukoharjo.....	118
3. Maklumat Pakubowono XII, tanggal 30 April 1946.....	122
4. Nama-nama Bupati Kabupaten Sukoharjo	123
5. Peta wilayah adminitratif Propinsi Jawa Tengah	126
6. Peta Wilayah yang dikuasai Indonesia dan Belanda.....	127
7. Peta wilayah adminitratif Kabupaten Sukoharjo.....	128
8. Pembagian wilayah adminitrasi kabupaten Sukoharjo.....	129
9. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Sukoharjo.....	135
10. Gambar Kantor Bupati Tahun 1947	136
11. Kantor Sekretariat Kabupaten Sukoharjo tahun 1979.....	137
12. Gambar Kantor DPRD Kabupaten Sukoharjo	138

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjuangan kemerdekaan yang dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat dan golongan masyarakat merupakan kelanjutan dari Revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia melibatkan seluruh lapisan dan golongan masyarakat, serta mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Revolusi sebagai proses politik timbul dalam suatu krisis pada waktu golongan-golongan masyarakat terlibat dalam konflik untuk mengusahakan perubahan politik dengan cara-cara radikal.¹ Meskipun revolusi Indonesia merupakan revolusi politik untuk menghapuskan penjajahan, namun dinamika perubahan yang menyertainya meliputi berbagai aspek kehidupan seperti aspek sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Revolusi mengandung pengertian sebagai perubahan masyarakat yang berjalan relatif cepat. Perubahan itu menunjukkan perbedaan yang sangat jelas dibanding dengan masa sebelumnya.

Pembicaraan mengenai masalah revolusi mengingatkan kita pada situasi masyarakat yang penuh pergolakan dan kekerasan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di berbagai daerah di seluruh Indonesia pada periode tahun 1945-1949 membuktikan hal itu. Persaingan untuk merebutkan jabatan dan kekuasaan, penghianatan, pemerasan, perampokan, pembunuhan, dan berbagai tindak kekejaman lainnya sangat mewarnai revolusi. Wajah revolusi tidak seluruhny

¹Sartono Kartodirjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia, Suatu Alternatif*. (Jakarta : Gramedia, 1982), hlm. 80.

mengambarkan kepahlawanan, pengorbanan, semangat cinta tanah air, dan keberanian mempertahankan kemerdekaan negara. Revolusi yang melibatkan peranan seluruh lapisan dan golongan masyarakat, tidak saja menampilkan sifat heroik tetapi juga penuh dengan pertentangan, kecurigaan, penghianatan, main hakim sendiri, dan berbagai tindakan radikal lain untuk berebut kekuasaan diantara pihak-pihak yang bertentangan.² Seluruh proses itu membawa perubahan sosial kearah suatu tatanan masyarakat baru, serta penolakan terhadap situasi dan struktur masyarakat lama yang tidak mereka sukai.

Perjuangan kemerdekaan yang dilakukan oleh berbagai lapisan dan golongan masyarakat sesudah proklamasi kemerdekaan hingga pengakuan kedaulatan negara Republik Indonesia, karena adanya ancaman akan kembalinya kekuasaan kolonial. Ancaman ini menimbulkan kegelisahan yang sangat eksplosif sehingga menimbulkan perlawanan bersenjata yang meluas. Krisis yang berlangsung lama mengakibatkan akhirnya organisasi-organisasi perjuangan. Organisasi-organisasi ini ada yang berafiliasi dibawah suatu partai politik dan ada pula yang tidak, misalnya Hisbullah berada dibawah paham politik Nahdatul Ulama, sedang Persindo dibawah PKI. Sementara itu Laskar Rakyat, Tentara Pelajar, Ikatan Pelajar Indonesia, dan berbagai perjuangan lain tidak berafiliasi dibawah partai politik apapun. Karena tekanan-tekanan emosional, rakyat siap menggabungkan diri dengan kelompok-kelompok kesatuan bersenjata atau badan perjuangan. Situasi krisis

²Guy Rocher, *A General Introduction to Sociology, A Theoretical Perspective*, (Toronto : Macmillan Company of Canada, 1972), hlm. 528-539.

berubah menjadi situasi konflik karena dieksploitasi oleh golongan-golongan yang bertentangan dalam proses perebutan kekuasaan.³

Pertempuran–pertempuran melawan tentara asing berlangsung secara terus menerus dari tahun 1945-1949. Ancaman akan kembalinya kekuasaan Belanda tampak dengan terjadi perubahan politik di Indonesia, setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pertempuran melawan Jepang berlangsung dengan hebat sepanjang bulan Oktober hingga September 1945. Pelucutan senjata Jepang yang di lakukan oleh pejuang-pejuang Indonesia menyebabkan terjadinya pertempuran demi pertempuran.⁴ Bersamaan dengan itu, di daerah pada awal kemerdekaan Indonesia yaitu sekitar tahun 1946 terjadi perubahan status daerah istimewa dan pembentukan pemerintahan baru di Surakarta, yaitu munculnya Kotamadya Surakarta dan tidak adanya lagi Kabupaten *Kutha* Surakarta. Hal ini banyak dimanfaatkan oleh daerah-daerah kawedanan untuk membentuk suatu pemerintahan baru diluar kota Surakarta yang mengatur mangurusi rumah tangganya sendiri.⁵

Pada masa pendudukan Jepang, wilayah Karisidenan Surakarta pernah menjadi Daerah Istimewa yang dikenal dengan nama Solo *Ko* (Kasunanan) dan Mangkunegaran *Ko* (Mangkunegaran). Wilayah Mangkunegaran meliputi

³ Sartono Kartodirjo, *op. cit.* hlm. 18.

⁴ Chusnul Hajati, dkk, *Peranan Masyarakat Desa di Jawa Tengah Dalam Perjuangan Kemerdekaan Tahun 1945-1949 : Daerah Kendal dan Salatiga.* (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1997), hlm. 2.

⁵ *Ibid.* , hlm. 2.

Kabupaten Karanganyar, Wonogiri dan sebagian Kota Solo.⁶ Sedangkan wilayah Kasunanan meliputi Kabupaten Sragen, Klaten, Boyolali, dan Kabupaten Kutha Surakarta. Sukoharjo pada waktu itu hanya merupakan daerah sepi dengan pimpinan pemerintahan tertinggi adalah Wedono, tak ubahnya dengan Bekonang dan Kartasura. Kawedanan Sukoharjo, Bekonang dan Kartasura masuk kedalam wilayah Kabupaten *Kutha* Surakarta, dibawah pimpinan Kasunanan.

Pada tanggal 27 Mei 1946 Kabupaten Karanganyar secara *de facto* menyatakan diri lepas dari pemerintahan Mangkunegaran. Hal ini kemudian diikuti oleh Kabupaten Boyolali dan Sragen yang juga menyatakan diri lepas dari pemerintahan Kasunanan. Kabupaten *Kutha* Surakarta kemudian diputuskan pindah ke Sukoharjo. Bersamaan dengan munculnya gerakan anti Swapraja⁷ dan berbagai dukungan untuk membentuk pemerintah *Kutha* Surakarta, akhirnya dengan suatu kebulatan tekad dari Wong Solo, mereka menyatakan berdirinya Pemerintah Kutha Surakarta yang lepas dari Kasunanan pada tanggal 16 Juni 1946.⁸ Tanggal ini kemudian menjadi hari Lahir Pemerintah Kotamadya Surakarta. Kemudian disusul keluarnya Penetapan Pemerintah Nomor: 16/SD tanggal 15 Juli 1946 lingkungan

⁶ Ko adalah Wilayah bagian suatu kerajaan.

⁷ Gerakan anti Swapraja adalah Gerakan masyarakat Surakarta yang tidak menginginkan terbentuknya Daerah Istimewa Surakarta (DIS)

⁸ Wong Solo adalah masyarakat Solo yang menginginkan berdirinya pemerintahan Kota Surakarta yang terlepas dari Kasunanan.

Karesidenan Surakarta dibentuk suatu daerah baru dengan kutha Surakarta yang dikepalai oleh seorang Walikota.

Dengan keluarnya Penetapan Pemerintah Nomor: 16/SD tanggal 15 Juli 1946, maka secara formal Pemerintah Kasunanan dan Mangkunegaran dipandang sudah tidak ada lagi, dan wilayah-wilayahnya untuk sementara menjadi wilayah Karesidenan Surakarta. Ini berarti wilayah Karesidenan Surakarta terdiri dari bekas wilayah-wilayah Mangkunegaran yaitu Kabupaten Karanganyar dan Wonogiri, serta bekas wilayah Kasunanan yaitu Kabupaten Klaten, Sragen, Boyolali, dan Sukoharjo (Kawedanan Sukoharjo, Bekonang, Kartasura), ditambah Kotamadya Surakarta. Keadaan ini mengilhami para pemimpin pada waktu itu untuk membentuk kabupaten baru diluar kota Surakarta agar ketiga kawedanan (Sukoharjo, Bekonang, Kartasura) dapat dibina dalam satu naungan pemerintah kabupaten. Kemudian secara spontan KNI⁹ Daerah Surakarta menunjuk K.R.M.T. Soewarno Honggopati Tjitrohoepojo untuk menjadi Bupati. Atas dasar tersebut di atas serta pertimbangan analisa, logis dan kronologis yang dikaitkan dengan landasan yuridis meskipun landasan yuridis itu tidak bersifat mengatur secara khusus, maka pada hari Senin Pon tanggal 15 Juli 1946, saat ditetapkannya Penetapan Pemerintah Nomor: 16/SD tersebut ditetapkan menjadi Hari Lahir Kabupaten Sukoharjo. Penetapan ini kemudian dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Sukoharjo No. 17 tahun 1986 tentang Hari Lahir Kabupaten Sukoharjo, yang disahkan dengan

⁹ KNI Singkatan dari Komite Nasional Indonesia .

SK Gubernur KDH Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Desember 1986 No. 188.3/480/1986 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Sukoharjo No. 3 Tahun 1987 Seri D No. 2 tanggal 9 Januari 1987¹⁰.

Kabupaten Sukoharjo merupakan kabupaten terkecil kedua di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah luas wilayah 46.666 kilometer persegi. Kabupaten Sukoharjo juga merupakan kabupaten termuda dibandingkan kabupaten lainnya seperti Klaten, Boyolali, Sragen, Wonogiri, Magelang, Purworejo dan kabupaten-kabupaten lain di Jawa Tengah. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan enam kabupaten di Jawa Tengah yakni Surakarta (Solo), Karanganyar, Wonogiri, Boyolali, dan Klaten, serta kabupaten Gunung Kidul yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jalan utama yang berada di Sukoharjo merupakan jalur utama yang menghubungkan Kota Solo dengan Kabupaten Wonogiri.

Kabupaten Sukoharjo berdiri sejak 15 Juli 1946 setelah melepaskan diri dari pemerintahan Kasunanan. Sukoharjo yang kini berpenduduk sekitar 800 ribu jiwa ini kemudian tergabung dalam satu karesidenan Surakarta bersama Solo, Boyolali, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten. Sukoharjo yang pada 2012 ini akan menginjak usia ke-66 tahun, memiliki slogan "Makmur" yang berarti Maju, Aman, Konstitusional, Mantap, Unggul dan Rapi. Slogan inilah yang ingin dicapai Kabupaten Sukoharjo untuk mencapai masyarakat madani yang gemah ripah loh jinawi.

¹⁰ *Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo tentang Hari Lahir Kabupaten Sukoharjo.* (Sukoharjo : Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo, 1986).

Terdapat beberapa hal yang menarik untuk di cermati saat berlangsungnya pemerintahan Kabupaten Sukoharjo Tahun 1945 sampai Tahun 1950. Mulai dari penyelenggaraan pemerintahan pertama kali setelah Kabupaten Sukoharjo berdiri, penyelenggaraan pemerintahan dalam Agresi Militer Belanda Pertama yang sangat mempengaruhi jalannya pemerintahan karena banyak kementerian yang berpindah dan tersebar, walaupun kedudukan pemerintah pusat masih berada di Yogyakarta. Selain itu juga penyelenggaraan pemerintahan pada saat terjadi peristiwa berdarah Oktober 1948 dan yang terakhir adalah penyelenggaraan pemerintahan pada saat terjadi Agresi Militer Belanda ke 2.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk menulis skripsi tentang “Dinamika Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo 1945-1950”.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang seperti dijelaskan diatas maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah keadaan umum Kabupaten Sukoharjo sebelum dan sesudah proklamasi kemerdekaan?
2. Bagaimanakah perjalanan sejarah berdirinya Kabupaten Sukoharjo?
3. Bagaimanakah perkembangan pemerintahan di Kabupaten Sukoharjo dalam kurun waktu 1945 sampai dengan tahun 1950?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

- a. Sebagai bahan untuk melatih daya pikir yang kritis, analitis, dan obyektif terhadap peristiwa sejarah dalam penulisan karya sejarah.
- b. Melatih daya kepekaan terhadap peristiwa sejarah kemudian menerapkan metodologi dan historiografi yang diperoleh dan menuangkannya dalam bentuk karya sejarah.
- c. Melatih sebuah penyusunan karya sejarah dalam rangka mempraktikkan metodologi sejarah yang kritis.
- d. Menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam sejarah.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui kondisi Kabupaten Sukoharjo sebelum dan sesudah Proklamasi Kemerdekaan.
- b. Mengetahui sejarah Hari Lahirnya Kabupaten Sukoharjo.
- c. Mengetahui perkembangan pemerintahan di Kabupaten Sukoharjo dalam kurun waktu 1945 sampai dengan tahun 1950.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pembaca

- a. Dengan membaca laporan penelitian ini diharapkan pembaca dapat mengetahui gambaran tentang sejarah hari jadi Kabupaten Sukoharjo.
- b. Untuk memperluas wawasan pembaca tentang perjalanan politik Sukoharjo dan peristiwa-peristiwa penting pada masa lampau.

- c. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi untuk penelitian-penelitian sejarah dimasa yang akan datang.
2. Bagi Penulis
 - a. Penulisan ini merupakan tugas akhir penulis guna menyelesaikan studi strata satu di Universitas Negeri Yogyakarta.
 - b. Penulisan penelitian ini dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk mengetahui dan menilai sejauh mana pengetahuan dan kemampuan penulis dalam mengungkap peristiwa sejarah berdasarkan metodogi sejarah yang dipelajari semasa perkuliahan.
 - c. Penulisan penelitian ini juga dapat menambah pengetahuan bagi penulis mengenai sejarah Indonesia, khususnya tentang Kabupaten Sukoharjo dalam perjalanan sejarahnya.

E. Kajian Pustaka

Perjuangan kemerdekaan yang di lakukan oleh berbagai lapisan masyarakat dan golongan masyarakat merupakan kelanjutan dari Revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia melibatkan seluruh lapisan dan golongan masyarakat, serta mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Revolusi sebagai proses politik timbul dalam suatu kritis pada waktu golongan-golongan masyarakat terlibat dalam konflik untuk mengusahakan perubahan politik dengan cara-cara radikal.¹¹ Meskipun revolusi Indonesia

¹¹ Sartono Kartodirjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia, Suatu Alternatif*. (Jakarta : Gramedia, 1982), hlm. 80.

merupakan revolusi politik untuk menghapuskan penjajahan, namun dinamika perubahan yang menyertainya meliputi berbagai aspek kehidupan seperti aspek sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Revolusi mengandung pengertian sebagai perubahan masyarakat yang berjalan relatif cepat. Perubahan itu menunjukkan perbedaan yang sangat jelas dibanding dengan masa sebelumnya.

Pembicaraan mengenai masalah revolusi mengingatkan pada situasi masyarakat yang penuh pergolakan dan kekerasan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di berbagai daerah di seluruh Indonesia pada periode tahun 1945-1949 membuktikan hal itu. Persaingan untuk memperebutkan jabatan dan kekuasaan, penghianatan, pemerasan, perampokan, pembunuhan, dan berbagai tindak kejahatan lainnya sangat mewarnai revolusi. Wajah revolusi tidak seluruhnya menggambarkan kepahlawanan, pengorbanan, semangat cinta tanah air, dan keberanian mempertahankan kemerdekaan negara. Revolusi yang melibatkan peranan seluruh lapisan dan golongan masyarakat, tidak saja menampilkan sifat heroik tetapi juga penuh dengan pertentangan, kecurigaan, penghianatan, main hakim sendiri, dan berbagai tindakan radikal lain untuk berebut kekuasaan diantara pihak-pihak yang bertentangan.¹² Seluruh proses itu membawa perubahan sosial kearah suatu tatanan masyarakat baru, serta penolakan terhadap situasi dan struktur masyarakat lama yang tidak mereka sukai. Dalam pembahasan tersebut penulis menggunakan buku yang berjudul *Peranan Masyarakat Desa di Jawa*

¹² Guy Rocher, *A General Introduction to Sociology, A Theoretical Perspective*, (Toronto : Macmillan Company of Canada, 1972), hlm. 528-539.

Tengah Dalam Perjuangan Kemerdekaan Tahun 1945-1949 (Daerah Kendal dan Salatiga). karya Chusnul Hajati, dkk.

Sebagai kota kecil dapat dikatakan Sukoharjo adalah wilayah yang agak terlewat dari segala gegap gempita menyambut Negara baru yang merdeka pada 17 Agustus 1945. Masyarakat Sukoharjo cukup terhambat dalam menyambut gema proklamasi. Rapat PPKI yang pertama dilakukan tanggal 18 Agustus 1945. Dalam rapat perdana ini dilakukan pengesahan UUD 1945 sekaligus memilih Soekarno-Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Meski ada bantahan tentang kemerdekaan itu dari penguasa Jepang, pada tanggal 19 Agustus 1945 PPKI bersidang lagi. Mereka menyatakan diri sebagai Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Bersama presiden dan wakil presiden kemudia disusun sebuah tatanan pemerintahan. Indonesia dibagi menjadi delapan propinsi : Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Sunda Kecil.

Setelah terbentuknya Provinsi Jawa Tengah, pemerintah di tingkat karesidenan dan kabupaten pun bermunculan. Di Surakarta sejumlah ulama, tokoh masyarakat, para birokrat, secara bersama-sama memprakarsai pembentukan KNID. MR. BPH. Soemodiningrat diangkat menjadi ketua KNI Daerah Surakarta. Setelah diangkat menjadi ketua KNID, MR.BPH Soemodiningrat mulai menjalankan pemerintahan di Surakarta, setapak demi setapak dengan suasana yang masih bercampur baur, mulai menjalankan kekuasaannya.

Dalam pembahasan tersebut penulis menggunakan buku karya A.H. Nasution yang berjudul *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 2. Sejarah Nasional Indonesia VI* karya Mawarti Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. MC. Ricklefs dengan bukunya *Sejarah Indonesia Modern : 1200-2004*.

Pada masa pendudukan Jepang, wilayah Karisidenan Surakarta pernah menjadi Daerah Istimewa (DIS) yang dikenal dengan nama Solo *Ko* (Kasunanan) dan Mangkunegaran *Ko* (Mangkunegaran). Wilayah Mangkunegaran meliputi Kabupaten Karanganyar, Wonogiri dan sebagian Kota Solo. Sedangkan wilayah Kasunanan meliputi Kabupaten Sragen, Klaten, Boyolali, dan Kabupaten *Kutha* Surakarta. Sukoharjo pada waktu itu hanya merupakan daerah tepi dengan pimpinan pemerintahan tertinggi adalah Wedono, tak ubahnya dengan Bekonang dan Kartasura. Kawedanan Sukoharjo, Bekonang dan Kartasura masuk kedalam wilayah Kabupaten *Kutha* Surakarta, dibawah pimpinan Kasunanan.

Pada tanggal 27 Mei 1946 Kabupaten Karanganyar secara *de facto* menyatakan diri lepas dari pemerintahan Mangkunegaran. Hal ini kemudian diikuti oleh Kabupaten Boyolali dan Sragen yang juga menyatakan diri lepas dari pemerintahan Kasunanan. Kabupaten *Kutha* Surakarta kemudian diputuskan pindah ke Sukoharjo. Bersamaan dengan munculnya gerakan anti Swapraja dan berbagai dukungan untuk membentuk pemerintah Kota Surakarta, akhirnya dengan suatu kebulatan tekad dari Wong Solo, mereka menyatakan berdirinya Pemerintah *Kutha* Surakarta yang lepas dari

Kasunanan pada tanggal 16 Juni 1946. Tanggal ini kemudian menjadi hari Lahir Pemerintah Kotamadya Surakarta. Kemudian disusul keluarnya Penetapan Pemerintah Nomor: 16/SD tanggal 15 Juli 1946 dilingkungan Karesidenan Surakarta dibentuk suatu daerah baru dengan *kutha* Surakarta yang di kepalai oleh seorang Walikota.

Dengan keluarnya Penetapan Pemerintah Nomor: 16/SD tanggal 15 Juli 1946, maka secara formal Pemerintah Kasunanan dan Mangkunegaran dipandang sudah tidak ada lagi, dan wilayah-wilayahnya untuk sementara menjadi wilayah Karesidenan Surakarta. Ini berarti wilayah Karesidenan Surakarta terdiri dari bekas wilayah-wilayah Mangkunegaran yaitu Kabupaten Karanganyar dan Wonogiri, serta bekas wilayah Kasunanan yaitu Kabupaten Klaten, Sragen, Boyolali, dan Sukoharjo (Kawedanan Sukoharjo, Bekonang, Kartasura), ditambah Kotamadya Surakarta. Keadaan ini mengilhami para pemimpin pada waktu itu untuk membentuk kabupaten baru diluar kota Surakarta agar ketiga kawedanan (Sukoharjo, Bekonang, Kartasura) dapat dibina dalam satu naungan pemerintah kabupaten. Kemudian secara spontan KNI Daerah Surakarta menunjuk KRMT Soewarno Honggopati Tjitrohoepojo untuk menjadi Bupati.

Atas dasar tersebut di atas serta pertimbangan analisa, logis dan kronologis yang dikaitkan dengan landasan yuridis meskipun landasan yuridis itu tidak bersifat mengatur secara khusus, maka pada hari Senin Pon tanggal 15 Juli 1946, saat ditetapkannya Penetapan Pemerintah Nomor: 16/SD tersebut ditetapkan menjadi Hari Lahir Kabupaten Sukoharjo. Penetapan ini

kemudian dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Sukoharjo No. 17 tahun 1986 tentang Hari Lahir Kabupaten Sukoharjo, yang disahkan dengan SK Gubernur KDH Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Desember 1986 No. 188.3/480/1986 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Sukoharjo No. 3 Tahun 1987 Seri D No. 2 tanggal 9 Januari 1987.

Dalam pembahasan tersebut penulis menggunakan buku karya Suprpto yang berjudul *Menelusuri Hari Lahir Kabupaten Sukoharjo Suatu Konsep*. Anonim, 1946. Penetapan Pemerintah Nomor 16/SD/Tahun 1946. Anonim, 1946. Maklumat, *Penyerahan Pemerintahan Koti Jimu Kyoko dan Seluruh Perusahaan kepada KNI Daerah Surakarta*, 1 Oktober 1945. Buku Karya Sajid yang berjudul *Babad Sala*.

A.H. Nasution dengan bukunya yang berjudul *Sekitar Proklamasi Kemerdekaan IX*, menguraikan tentang gambaran pemerintah Indonesia dalam kondisi perang. Terdapat beberapa hal yang menarik untuk dicermati saat berlangsungnya perjuangan kemerdekaan di daerah pedesaan. Peranan masyarakat desa selama revolusi dilakukan dengan penuh pengabdian. Dorongan emosional yang dimotivasi oleh semangat mempertahankan kemerdekaan menyebabkan masyarakat pedesaan bersedia memberikan apa saja yang dimilikinya.

Buku tentang; “*Soewarno Honggopati. Pejabat mangkunegaran yang Menjadi Bupati Sukoharjo*”. Koleksi Arsip mangkunegaran No.1881. Buku ini membahas tentang seorang pejabat di Mangkunegaran yang

kemudian menjadi Bupati pertama Sukoharjo. Yang mulai memangku jabatannya sebagai Bupati Sukoharjo semenjak tanggal 29 Agustus 1946, dan baru menerima Surat Keputusan sebagai Bupati Pamong Projo I Sukoharjo, setelah delapan bulan memangku jabatannya.

Buku “Penetapan Pemerintah nomor 16/sd tahun 1946 Presiden Republik Indonesia”, koleksi Kabupaten Sukoharjo. Dalam buku ini berisi tentang Penetapan Pemerintah Nomor: 16/SD, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Sukoharjo No. 17 tahun 1986 tentang Hari Lahir Kabupaten Sukoharjo, yang disahkan dengan SK Gubernur KDH Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Desember 1986 No. 188.3/480/1986 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Sukoharjo No. 3 Tahun 1987 Seri D No. 2 tanggal 9 Januari 1987.

Kolonialisme Belanda yang terjadi dengan dua kerajaan baik Kasunanan maupun Mangkunegaran. Banyak organisasi-organisasi revolusioner yang bermunculan di Surakarta pada kurun waktu ini. Revolusi sosial di Surakarta dimulai dari kota Surakarta oleh para pemimpin tidak seperti daerah lain yang dimulai dari desa. Dalam pembahasan tersebut penulis menggunakan buku karya Suyatno Kartodirjo yang berjudul *Revolusi Sosial di Surakarta*.

F. Historiografi yang Relevan

Kata Inggris *history* (sejarah) berasal dari kata benda Yunani *Istoria* yang berarti ilmu. Dan dalam penggunaannya oleh filsuf Yunani Aristoteles, *istoria* berarti suatu pertelaan sistematis mengenai seperangkat gejala alam, entah susunan kronologi merupakan faktor atau tidak di dalam pertelaan. Menurut Louis Gottschalk menurut istilah yang paling umum, kata *history* kini berarti masa lampau umat manusia.

Historiografi ini dapat berbentuk buku-buku sejarah, artikel, skripsi, tesis dan karya-karya lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga karya sejarah akan bersifat obyektif. Historiografi yang relevan bertujuan untuk membandingkan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sehingga dapat menghindari kesamaan hasil tulisan ini dengan tulisan sebelumnya.

Dalam penulisan skripsi yang berjudul *Dinamika Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo 1945-1950* penulis menggunakan tulisan yang berhubungan dengan skripsi ini yaitu :

Pertama, buku karya Suprato yang berjudul "*Menelusuri hari Jadi Sukoharjo Suatu Konsep*" terbitan tahun 1985. Buku ini banyak mengulas perjalanan politik Sukoharjo pada masa awal berdirinya. Selain itu juga di bahas mengenai usaha pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam memperoleh dana untuk menjalankan roda pemerintah.

Kedua, buku tentang; "*Soewarno Honggopati. Pejabat Mangkunegaran yang Menjadi Bupati Sukoharjo*". Koleksi Arsip

mangkunegaran No.1881. Buku ini membahas tentang seorang pejabat Mangkunegaran yang kemudian menjadi Bupati pertama Sukoharjo. Yang mulai memangku jabatannya sebagai Bupati Sukoharjo semenjak tanggal 29 Agustus 1946, dan baru menerima Surat Keputusan sebagai Bupati Pamong Projo I Sukoharjo, setelah delapan bulan memangku jabatan.

Ketiga, buku yang berjudul *sejarah lahirnya kota Sokoharjo* dirasa sangat membantu dalam penulisan ini. Buku tersebut menceritakan bagaimana keadaan Sukoharjo semasa pendudukan Jepang hingga pemerintahan Belanda 1945-1949, selain itu, memberikan pemahaman tentang masyarakat Sukoharjo dilihat dari berbagai aspek kehidupan.

Keempat, Anonim, "*Maklumat penyerahan Koti Jimu Kyoko dan seluruh Perusahaan kepada KNI Daerah Sukoharjo*", terbitan tahun 1945. Buku ini berisi tentang maklumat penyerahan Koti Jimu Kyoko dan seluruh Perusahaan Kepada KNI Daerah Sukoharjo. Penyerahan itu dilakukan oleh pemerintah kolonial kepada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Anonim, 1973, "*Buku Peringatan Hari Jadi ke-27 Pemerintah Daerah kotamadya Surakarta*", juga dirasa perlu sebagai pendukung penulisan skripsi ini. Buku ini berisi tentang Peringatan Hari Jadi Kabupaten Sukoharjo yang ke-27.

Kelima, buku yang berjudul *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, Jilid 5 Agresi Militer Belanda I* ditulis oleh ,AH, Nasution. Diterbitkan di Bandung 1978. Buku ini berisi tentang Proses terjadinya Agresi Militer Belanda I, Jalannya Agresi Militer Belanda I. Membahas tentang peristiwa-peristiwa seputar Agresi Militer Belanda I. Dalam buku ini

dibahas mengenai kedatangan kembali Belanda ke Indonesia dengan membonceng tentara Sekutu. Disini dinyatakan bahwa Van Mook mempunyai alat NICA-nya yang disisipkan di markas-markas Sekutu untuk menjadi alat pemerintah sipil, sehingga dengan perlindungan Sekutu, ia dapat memulai menegakkan kembali kekuasaan Hindia Belanda di daerah-daerah yang baru direbut tentara Sekutu. Kemudian diungkapkan juga sikap rakyat Indonesia dalam menghadapi kedatangan kembali Belanda ke Indonesia. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang perang kemerdekaan secara lokal yang terjadi di kota Surakarta pada khususnya.

Keenam, buku yang berjudul "*Masa Menjelang Revolusi. Keraton dan Menjelang Kehidupan Politik di Surakarta 1912-1942*", ditulis oleh George D. Larson, diterbitkan oleh Gajah Mada University Press, Yogyakarta pada tahun 1990. Penulis menggunakan literatur buku ini karena sejarah berdirinya Kabupaten Sukoharjo tidak bisa dilepaskan dari perjalanan sejarah Keraton Surakarta. Buku yang berjudul "*Revoloesi Pemoeda Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*", ditulis oleh Ben Anderson, diterbitkan oleh Pustaka Sinar Harapan, Jakarta pada tahun 1988. Dalam buku ini dibahas mengenai peranan pemuda dalam revolusi pada masa pendudukan Jepang dan perlawanan di Jawa tahun 1944-1946.

Ketujuh, Buku Rumpun Diponegoro dan pengabdiannya Karya Dinas Sejarah Militer Kodam VII/Diponegoro diterbitkan Dinas Sejarah Militer Kodam VII/Diponegoro bersama CV Borobudur Megah Semarang Tahun 1977. Disini dijelaskan mengenai dikeluarkannya perintah siasat No.

012/Co.P.P.S. 106 yang isinya antara lain : Mengadakan serangan perpisahan ke Kota Surakarta dengan secara umum. Diceritakan juga tentang strategi penyerangan terhadap kedudukan Belanda di Kota Surakarta.

Kedelapan, Desertasi Revolusi Sosial di Surakarta karya Suyatno Kartodirjo, dijelaskan dalam disertasi tersebut mengenai Kolonialisme Belanda yang terjalin dengan dua kerajaan baik Kasunanan maupun Mangkunegaran. Banyak organisasi revolusioner yang bermunculan di Surakarta pada kurun waktu ini. Revolusi sosial di Surakarta dimulai dari desa.

Kesembilan, buku karya Julius Pour yang berjudul *Ign Slamet Riyadi, Dari Mengusir Kempetai Sampai Menumpas RMS. Pencetus Komando yang Nyaris Terlupakan*. Didalam buku ini merupakan usaha merekonstruksi perjalanan Letnan Kolonel Slamet Rijadi, berdasarkan kesaksian masyarakat. Didalam buku ini juga dijelaskan keterlibatan Letkol Slamet Rijadi dalam pertempuran empat hari di Surakarta.

G. Metode dan Pendekatan Penelitian

1. Metode Penelitian

Membuat sebuah penelitian dapat menggunakan berbagai metode sesuai dengan rencana penelitian. Mengenai rencana yang akan digunakan tergantung pada tujuan penelitian, sifat dari masalah yang akan dikerjakan. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian historis. Tujuan penelitian historis adalah untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan obyektif, dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, serta

mensintesis bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat.¹³

Metode historis merupakan suatu penyelidikan mengaplikasikan metode pemecahan yang ilmiah dalam prespektif historis suatu masalah.¹⁴ Metode ini bermaksud untuk memastikan dan menyatakan kembali fakta masa lampau. Secara tegas dikemukakan bahwa landasan utama dari metode sejarah ialah bagaimana menangani bukti-bukti dan bagaimana menghubungkannya.¹⁵ Dalam metode sejarah ini terdapat empat tahapan, yaitu: Heuristik (pengumpulan data), verifikasi (kritik sumber), interpretasi, dan historiografi (penulisan sejarah). Dari empat tahap tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Heuristik

Berasal dari bahasa Yunani *heuriskein* yang berarti memperoleh atau menemukan. Heuristik disini merupakan kegiatan menghimpun jejak-jejak masa lampau. Untuk menjadikan historiografi perlu dicari sumber-sumbernya *evidence* (bukti-buktinya). Semua “saksi mata” disebut sumber-sumber sejarah. Segala sesuatu yang langsung atau tidak langsung menceritakan kepada kita tentang sesuatu kenyataan atau kegiatan manusia pada masa lalu (*past actuality*)

¹³ Sumadi, *Metodologi Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 16.

¹⁴ Wianarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung : Tarsito, 1975), hlm. 125.

¹⁵ William. H. Frederick dan Soeri Soeroto, *Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum dan Sesudah Revolusi*, (Jakarta : LP3ES, 1984), hlm. 13.

disebut sumber sejarah. Sumber-sumber sejarah merupakan bahan-bahan mentah (raw materials) sejarah yang mencakup segala macam evidence (bukti) yang telah ditinggalkan oleh manusia menunjukkan segala aktivitas mereka di masa lalu yang berupa kata-kata yang tertulis atau kata-kata yang diucapkan.

Untuk macam-macam sumber itu sendiri adalah sebagai berikut.

1) Sumber Primer adalah kesaksian dari seorang saksi dengan mata kepala sendiri. Selain itu juga kesaksian menggunakan panca indera yang lain atau juga saksi dengan alat mekanis yang selanjutnya disebut saksi pandang mata.¹⁶ Dengan demikian sumber primer harus dihasilkan oleh seseorang yang sejaman dengan peristiwa yang dikisahkannya. Sumber primer itu tidak perlu asli dalam arti hukum daripada kata asli, yakni dokumen itu sendiri (biasanya versi tulisan yang pertama) yang isinya menjadi subyek pembicaraan. Karena seringkali suatu copy yang kemudian atau suatu edisi cetakan akan juga memenuhi syarat bagi keperluan itu. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan sumber primer sebagai berikut.

- a. Maklumat penyerahan Koti Jimu Kyoko dan seluruh Perusahaan kepada KNI Daerah Surakarta.
- b. Maklumat Pakubuwono XII, tanggal 30 April 1946.

¹⁶ Louis Gottschalk, op.cit., hlm. 35.

- c. Penetapan Pemerintah nomor 16/sd tahun 1946 Presiden Republik Indonesia.
 - d. Naskah sejarah hari lahirnya kabupaten Sukoharjo.
- 2) Sumber sekunder dalam pandangan Louis Gottschalk adalah kesaksian yang bukan merupakan saksi pandangan mata, yakni orang yang tidak hadir dalam peristiwa tersebut.¹⁷ John W. Best menyatakan bahwa sumber sekunder adalah sumber cerita (penuturan) atau catatan mengenai suatu peristiwa yang tidak disaksikan sendiri oleh pelapor.¹⁸ Pelapor atau sumber mungkin pernah berbicara dengan saksi mata. Jadi kesaksian laporan itu tetap bukan kesaksian dari saksi mata. Sumber sekunder yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut.
- a) Soewarno Honggopati. Pejabat Mangkunegaran yang Menjadi Bupati Sukoharjo. Koleksi Arsip Mangkunegaran No.1881
 - b) Suprato, 1985, Menelusuri hari Lahirnya Kabupaten Sukoharjo Suatu Konsep.
 - c) Anonim, Maklumat Penyerahan Koti Jimu Kyoko dan seluruh Perusahaan kepada KNI Daerah Surakarta, 1 Oktober 1945.

¹⁷ Louis Gottschalk, "Understanding History: A Primer Historical Methode". terj, Nugroho Notosusanto. *Mengerti Sejarah*. (Jakarta: Universitas Indonesia, 1972), hlm. 35.

¹⁸ John W. Best, *Research in Education*. terj, Sanapiah Faisal dan Mulyati Guntur Waseso. *Metode Penelitian Pendidikan*. (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hlm. 391.

- d) Empeh Wong Kam Fu, Almanak Tahun 1890-2000, cetakan ke-2, Jakarta: Penerbit Sekretariat Empeh Wong Kang Fu.
- e) George D. Larson. 1990. Masa Menjelang Revolusi Keraton dan Menjelang Kehidupan Politik di Surakarta 1912-1942. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- f) Nagazumi, Akira.1988. Pemberontakan Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- g) Anderson, Ben. 1988. Revoloesi Pemoeda Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- h) Pringgodigdo. A.K. 1952. Tata Negara di Djawa pada Waktu Pendudukan Jepang Dari Bulan Maret Sampai Bulan Desember 1942. Jogja.
- i) Nasution, AH, 1978. Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, Jilid 5 Agresi Militer Belanda I. Disjarah AD dan Angkasa. Bandung.

b. Verifikasi

Merupakan kegiatan dalam meneliti atau menganalisa sumber untuk menguji validitas dan kredibilitas terhadap sumber yang telah dikumpulkan. Untuk itu diperlukan kritik sumber yang meliputi kritik intern (kredibilitas) dan kritik ekstern (autensitas). Kritik intern bertujuan untuk menentukan kredibilitas sumber dilihat dari isi, sumber atau dokumen. Sedangkan kritik ekstern bertujuan untuk

menentukan autensitas sumber baik keaslian sumber, tanggal serta pengarang.¹⁹

c. Interpretasi

Kegiatan penelitian untuk menetapkan hubungan dari fakta-fakta sejarah yang diperoleh setelah diterapkan kritik intern maupun ekstern dari data-data yang berhasil dikumpulkan, sehingga memberikan kesatuan yang memberikan bentuk peristiwa masa lampau. Kemampuan pribadi dan prespektif yang berbeda akan menghasilkan makna dan bentuk karya sejarah yang berbeda. Semua diperbolehkan sejauh tidak menyimpang dari fakta-fakta yang dimilikinya.²⁰ Fakta-fakta sejarah yang telah di wujudkan perlu dihubungkan dan dikaitkan satu sama lain sedemikian rupa sehingga antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya kelihatan sebagai suatu rangkaian yang masuk akal, dalam arti menunjukkan kecocokan satu sama lainnya.²¹ Peristiwa yang satu dimasukkan keseluruhan konteks peristiwa-peristiwa lain yang melingkupinya.²²

d. Historiografi (Penulisan Sejarah)

¹⁹ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: PT Bentang Pustaka, 2005), hlm. 100-101.

²⁰ William. H. Frederick dan Soeri Soeroto, *Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum dan Sesudah Revolusi*, (Jakarta : LP3ES, 1984), hlm. 13.

²¹ *Ibid.*, hlm. 25.

²² Nugroho Notokusanto, *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*, (Jakarta: Yayasan Indayu, 1973), hlm. 41.

Tahap ini merupakan tahap final sebuah penulisan sejarah. Hasil penelitian diwujudkan dalam bentuk tertulis serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam penelitian sejarah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan inti dari metodologi dalam penulisan sejarah. Penggambaran dari suatu peristiwa tergantung dari mana kita menjangkaunya, dimensi mana yang diperhatikan, unsur-unsur mana yang perlu diperhatikan dan lain sebagainya. Hasil pelukisan (suatu penelitian) akan sangat ditentukan oleh pendekatan yang di pakai²³. Berdasarkan hal tersebut dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa pendekatan yaitu:

- a. Pendekatan politik menurut Deliar Noer adalah segala usaha, tindakan atas suatu kegiatan manusia yang berkaitan dengan kekuasaan dalam suatu negara dengan bertujuan untuk mempengaruhi, mengubah dan mempertahankan suatu bentuk susunan masyarakat.²⁴ Menurut Sartono Kartodirdjo pendekatan politik adalah pendekatan yang menyoroti struktur kekuasaan, jenis kepemimpinan, hierarki sosial, pertentangan kekuasaan dan lain sebagainya.²⁵ Pendekatan politik diperlukan untuk memahami kekuasaan, bagaimana kekuasaan

²³ Sartono kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm.87.

²⁴ Deliar Noor, *Pengantar ke Pemikiran I*, (Medan: Dwipa, 1965), hlm. 6.

²⁵ Sartono Kartodirdjo, *op.cit.*, hlm.5.

diperlukan, digunakan, dan keputusan-keputusan yang dibuat manusia dalam proses menjalankan kekuasaan. Dalam skripsi ini pendekatan politik di gunakan untuk melihat latar belakang Belanda untuk menguasai wilayah Indonesia kembali.

- b. Pendekatan sosiologis, pendekatan sosiologis digunakan untuk mengungkapkan unsur-unsur sosial, sistem politik, jaringan interaksi, struktur organisasi, pola kelakuan dan sebagainya dengan lebih baik dan cermat²⁶. Pendekatan sosiologis akan dipakai dalam skripsi ini untuk mengamati keadaan sosial rakyat dalam melakukan taktik revolusi sosial di Surakarta.
- c. Media pendekatan ekonomi digunakan dalam menganalisa suatu permasalahan yang berhubungan dengan permasalahan pada suatu masyarakat. Pendekatan ekonomi disini akan memperlihatkan konsep-konsep perekonomian dalam sistem sosial dan juga stratifikasinya. Pendekatan ekonomi ini digunakan untuk melihat keadaan perekonomian Sukoharjo pada masa sebelum dan sesudah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.

H. Sistematika Penelitian

Pada bab I diuraikan tentang pengantar yang terdiri dari sepuluh sub bab, yakni latar belakang masalah sebagai dasar dari karya ini. Dilanjutkan dengan alasan pemilihan judul, batasan judul dan rumusan masalah, ruang lingkup dan segi peninjauan, kajian teori, historiografi yang

²⁶ Sartono Kartodirdjo, op.cit., hlm.144.

relevan, sumber yang digunakan, metode penelitian, tujuan penulisan, kegunaan penulisan, dan garis besar isi.

Pada bab II penulis menyajikan latar belakang sejarah yang dapat mengawali peristiwa-peristiwa penting yang mendorong lahirnya Kabupaten Sukoharjo. Dalam hal ini ungkapan sejarah banyak yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Kota Solo, dan justru dengan inilah akan membuka pintu gerbang kelahiran Kabupaten Sukoharjo, yang terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut

- a. Kondisi geografis Kabupaten Sukoharjo
- b. Kondisi Kabupaten Sukoharjo pada masa pendudukan Jepang
- c. Terbentuknya KNI Daerah Surakarta dan Daerah Istimewa Surakarta
- d. Terjadinya pemberontakan Tan Malaka
- e. Kondisi Kabupaten Sukoharjo pada masa pendudukan Belanda
- f. Kasunanan pada masa pendudukan Belanda.

Pada bab III ini sengaja disajikan sejarah berdirinya Kabupaten Sukoharjo, yang dibatasi kurun waktunya sampai dengan akhir tahun 1950. Dalam bab ini terdiri dari empat sub bab, yakni penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sukoharjo pertama kali setelah berdiri 15 Juli 1946, penyelenggaraan pemerintahan dalam agresi militer Belanda pertama (21 Juli 1947), penyelenggaraan pemerintahan pada saat terjadi peristiwa berdarah 1948 dan penyelenggaraan pemerintahan dalam Agresi Militer Belanda ke dua (19 Desember 1948).

Pada bab IV ini penulis menyajikan tentang perkembangan sistem pemerintahan di Kabupaten Sukoharjo dalam kurun waktu 1945-1950. Dalam bab ini, diketengahkan perkembangan Pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan fungsi Eksekutif, kaitannya dengan fungsi Legislatif, dalam rangka pelaksanaan pasal 18 UUD 1945. Dalam bab ini juga dilengkapi dengan pengertian tentang Kepala Daerah, Dewan Pemerintah Daerah, Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan. Dalam bab ini juga akan dibahas mengenai perkembangan dan tugas-tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pada bab V ini berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan bahasan, serta merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dikemukakan dalam pendahuluan.

BAB II

KEADAAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO SEBELUM DAN SESUDAH PROKLAMASI KEMERDEKAAN

Pada bab ini penulis sengaja membatasi untuk mulai mengambil dasar waktu beberapa saat sebelum proklamasi kemerdekaan 1945, pada akhir pendudukan Jepang, sebagai titik awal dari pengamatan penulis dalam menentukan kurun waktu yang tak terlalu lama agar dapat menyajikan keterangan-keterangan yang akurat, apalagi jika diingat bahwa saat-saat pergolakan semacam itu tak dapat diungkap catatan-catatan yang pasti yang memudahkan penulisan. Uraian pada bab ini, penulis memang banyak mengorek peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi di Kota Solo, yang kesemuanya justru mengawali lahirnya Kabupaten Sukoharjo.

A. Keadaan Geografis Kabupaten Sukoharjo

Kabupaten Sukoharjo merupakan kabupaten terkecil kedua di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah luas wilayah 46.666 kilometer persegi. Kabupaten Sukoharjo terletak di bagian tenggara provinsi Jawa Tengah. Ibukotanya adalah Sukoharjo, sekitar 10 km sebelah selatan Kota Surakarta. Kabupaten Sukoharjo memiliki luas wilayah 446,666 ha , yang secara geografis terletak antara 110 42'06,79"-110 57'33,7" Bujur Timur dan 7 32'17"- 7 49'32" Lintang Selatan. Secara administratif Kabupaten Sukoharjo mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Kota Surakarta
Sebelah Timur	: Kabupaten Karanganyar
Sebelah Selatan	: Kab. Wonogiri dan Kab. Gunung Kidul

Sebelah Barat : Kabupaten Boyolali dan Klaten

Posisi Kabupaten Sukoharjo sangat strategis karena merupakan pintu lalu lintas wilayah JOGLOSEMAR (Jogja-Solo-Semarang) dan ditengah wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN (Surakarta – Boyolali – Sukoharjo – Karanganyar – Wonogiri – Sragen – Klaten). Kabupaten Sukoharjo terdiri atas 12 kecamatan diantaranya : Kecamatan Baki, Kecamatan Bendosari, Kecamatan Gatak, Kecamatan Bulu, Kecamatan Grogol, Kecamatan Kartasura, Kecamatan Mojolaban, Kecamatan Nguter, Kecamatan Polokarto, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Tawang Sari , Kecamatan Weru, dan Kecamatan Bulu yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Sukoharjo.¹

Secara geografis Kabupaten Sukoharjo dibelah oleh Sungai Bengawan Solo menjadi dua bagian, Bagian utara pada umumnya merupakan dataran rendah dan bergelombang, sedang bagian selatan dataran tinggi dan pegunungan. Sebagian daerah di perbatasan merupakan daerah perkembangan Kota Surakarta, diantaranya di kawasan Grogol dan Kartosuro. Kartosuro merupakan persimpangan jalur Solo-Yogyakarta dengan Solo-Semarang. Kabupaten Sukoharjo dilintasi jalur kereta api Solo-Wonogiri, yang dioperasikan kembali pada tahun 2004 setelah selama puluhan tahun tidak difungsikan. Jalur kereta api ini merupakan salah satu yang paling "berbahaya" di Indonesia, karena melintas di tepi jalan raya tanpa adanya

¹ Suprato, *Menelusuri hari Lahiranya Kabupaten Sukoharjo Suatu Konsep*, (Sukoharjo : Koleksip Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sukoharjo, 1985), hlm. 7.

pembatas. Untuk beberapa tahun terakhir hampir tidak ada kereta penumpang yang melintas, sesekali hanya berupa kereta barang. Kabupaten Sukoharjo sendiri secara administratif terdiri atas 12 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Sukoharjo. Kecamatan tersebut adalah Sukoharjo, Tawang Sari, Bulu, Weru, Nguter, Bendosari, Grogol, Baki, Gatak, Kartasura, Mojolaban, dan Polokarto.

B. Masa Pendudukan Jepang (1942-1945)

1. Keadaan Politik dan Pemerintahan

Pada masa pendudukan Jepang Kabupaten Sukoharjo belum di kenal sebagai kabupaten yang berdiri sendiri, karena saat itu Sukoharjo hanya merupakan daerah bagian dari kabupaten kota Surakarta yang saat itu pemerintahannya di pegang oleh Martonegoro². Sukoharjo saat itu adalah sebuah kawedanan yang dipimpin oleh seorang wedono. Sementara itu kota Surakarta waktu itu menjadi sebuah daerah istimewa yang dikenal dengan sebutan *Solo Ko* (Kasunanan) dan *Mangkunegara Ko* (Mangkunegara) yang mempunyai kedaulatan ke luar kota. *Solo ko chi* (Pemerintahan Kerajaan) waktu itu memegang kekuasaan di daerah Sragen, Klaten, Boyolali, dan Surakarta sendiri. Sedangkan *Mangkunegara ko chi* memerintah daerah Karanganyar, Wonogiri, dan sebagian kota Solo.

Sistem pemerintahannya sudah di atur rapi oleh pasukan tentara Jepang yang masih mengakui pemerintahan tradisional dibawah kekuasaan

² Nashkah, “*Sejarah hari Lahirnya Kabupaten Sukoharjo*”, (Sukoharjo: Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sukoharjo, 1986). Hal. 4.

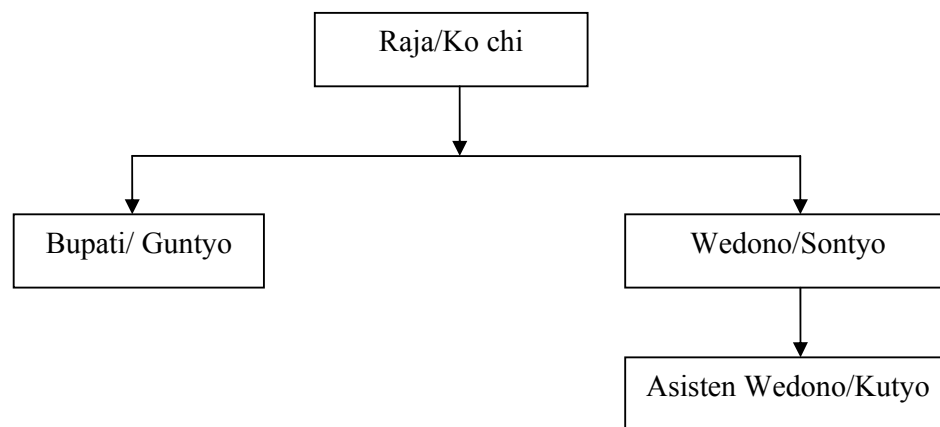
raja-raja. Walaupun pemerintahan tradisional dibawah raja-raja tetap di akui namun kekejaman bala tentara Jepang tetap mendominasi jalannya pemerintahan di daerah ini. Pada masa pendudukan Jepang, terjadi perubahan dalam pemerintahan. Perubahan itu adalah mulai berperannya orang pribumi dalam pemerintahan. Pada waktu itu jabatan walikota, Wedono, Kepala Polisi dan Kepala Pengadilan dijabat oleh orang-orang pribumi.³

Sejak tahun 1942, Jepang menguasai semua wilayah yang sebelumnya diduduki oleh Belanda, termasuk Surakarta. Oleh Jepang, wilayah teritorial Surakarta disebut dengan nama *Kochi*, begitu pula dengan penyebutan tiga wilayah kerajaan keturunan Mataram lainnya. *Kochi* merupakan daerah otonom yang setingkat dengan Karesidenan, dalam bahasa Jepang disebut dengan nama *Syuu*. *Kochi Surakarta* terdiri dari Kasunanan *Kochi* dan Mangkunegaran *Kochi*. Selama pendudukannya, pemerintahan militer Jepang tidak banyak melakukan perubahan dalam pemerintahan yang selama ini telah diberlakukan di Kasunanan Surakarta Hadiningrat, kecuali mengganti nama gelar pejabat beserta wilayah administrasinya ke dalam bahasa Jepang. Jabatan Bupati, Wedana, Asisten Wedana, dan Kepala Desa diganti dengan nama *Kentyo*, *Guntyo*, *Sontyo*, dan *Kutyo*. Selain itu, sebagai bentuk pengawasan, pemerintah militer Jepang menempatkan wakil-wakilnya dalam struktur pemerintahan kerajaan.

³ *Ibid.*, hlm. 8.

Pada 31 Juli 1942, Panglima Besar Tentara Jepang Laksmana Hitoshi Imamura melantik Sri Susuhunan Pakubuwono XI sebagai Raja Kasunanan Surakarta Hadiningrat.⁴ Tujuannya adalah untuk memudahkan propaganda Jepang terhadap masyarakat Surakarta, yakni propaganda dalam menghadapi Perang Pasifik. Kemudian, melalui Maklumat No. 53 tanggal 4 September 1942, *Gunseibu*, pemerintah militer Jepang di wilayah *Kochi* diganti dengan *Kochi Jimu Kyoku* (Kantor Urusan Kerajaan). Pemerintah militer Jepang menempatkan orang-orangnya *Kochi Jimu Kyoku* untuk mengawasi gerak-gerik kerajaan, antara lain *Kochi Jimu Kyoku Tyokan* sebagai pengawas pemerintahan militer dan *Somutyokan* (Pembesar Urusan Umum) yang memiliki wewenang seperti *Pepatih Dalem* untuk membantu mengurus berbagai persoalan umum yang terjadi di lingkungan Kasunanan Surakarta Hadiningrat.

Berikut adalah bagan pemerintahan Kasunanan Surakarta pada masa pendudukan Jepang di Surakarta.



⁴ *Ibid.* , hlm. 8.

Dokumen otentik dalam masa pendudukan Jepang, terutama kekejamannya waktu itu memang sulit diketemukan, dikarenakan pemerintahan Militer Jepang ketat melakukan pembrangusan terhadap rakyat Indonesia. Radio disegel dan hanya boleh disetel untuk mendengarkan propaganda Jepang, surat kabar disensor ketat, segala macam kamera milik pribumipun disita. Itulah sebabnya banyak peristiwa heroik menjelang runtuhnya kekuasaan Jepang di Indonesia hanya bisa dituturkan melalui mulut ke mulut dari para pelakunya, rakyat dan pejuang seperti halnya perebutan kekuasaan rakyat Indonesia dari tangan pemerintah Militer Jepang di Kota Surakarta, tanggal 1 Oktober 1945.⁵

Zaman dahulu surat-menyurat itu tidak sempat banyak dilakukan, karena suasana kacau waktu itu, yang diperlukan hanyalah keberanian, semangat yang besar melawan penjajahan Jepang. (Soemodiningrat, 1986). Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dokumen-dokumen otentik yang menyangkut pergerakan rakyat tidak banyak yang bisa diungkap.⁶

Dengan berdasar UU No. 1 tahun 1942, bala tentara Jepang menerapkan pemerintahan militer di bekas wilayah Hindia Belanda. Wilayah bekas Hindia Belanda dibagi dalam 3 wilayah komando pemerintahan, yaitu.

⁵ Agus Sutanto, 15 Juli 1984

⁶ *Ibid.* , hlm. 9.

- a. Sumatra di bawah komando Panglima Angkatan Darat XXV yang berkedudukan di Bukittinggi;
- b. Jawa dan Madura berada di bawah komando Panglima Angkatan Daerah XVI yang berkedudukan di Jakarta;
- c. Daerah lainnya berada di bawah komando Panglima Angkatan Laut yang berkedudukan di Makassar.

Dengan penghapusan dewan-dewan daerah, terbentuklah sistem pemerintahan tunggal di daerah-daerah otonom. Kepala-kepala daerah Syuutyookan mempunyai kekuasaan yang sangat besar untuk melaksanakan tugas-tugas militer sehari-hari dibawah komando Gunseikan. Mereka mengatur segala urusan daerah meliputi pemerintahan, kemiliteran, kepolisian, dan sebagainya. Dibentuknya dewan-dewan daerah pada September 1943 tidak mengurangi Kekuasaan pada Kepala Daerah. Karena pada dasarnya dewan ini hanya melaksanakan perintah-perintah Bala Tentara Jepang. Sehingga politik di tingkat lokal bisa dikatakan mati.

Pada masa ini pemerintah Jepang sedang terlibat Perang Dunia II, sehingga tidak dapat memikirkan penyelenggaraan pemerintahan lokal di Indonesia dengan baik. Segala sesuatu mengenai pemerintahan termasuk pemerintahan daerah selalu diarahkan untuk kepentingan mencapai kemenangan perang mereka.⁷ Dengan demikian kebijakan pemerintahan daerah sangat bernuansa militeristik. Konsekuensinya dalam kebijakan

⁷ Sumarmo, *AJ.Penddukan Jepang dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia*. (Semarang : IKIP Semarang Pres, hlm. 40.)

pemerintahan daerah tidak mengenal prinsip desentralisasi, apalagi devolusi. Melainkan hanya mengenal prinsip dekonsentrasi yang sentralistik. Singkatnya fungsi pemerintahan hanya sebatas regulasi, dan berbagai kebijakan, kelembagaan dan kepemimpinan pemerintahan bersifat militeristik dan otoriter yang jauh dari nilai-nilai demokratis.

2. Keadaan Sosial-Ekonomi

Pada masa pendudukan Jepang kehidupan ekonomi di Sukoharjo dan sekitarnya sangat kacau, di tahun sebelum 1942 atau sebelum Jepang menduduki Indonesia keadaan ekonomi rakyat bisa dibilang normal.⁸ Banyak toko-toko Cina yang tersebar di seluruh pelosok Sukoharjo dan yang paling banyak terdapat di kawasan Kartasura.⁹ Sebelum tahun 1942 harga pangan tidak begitu tinggi bahkan bisa dibilang harga pangan saat itu tergolong murah, karena rakyat kecil masih bisa mencukupi kebutuhan hidupnya.

Memasuki masa pendudukan Jepang, situasi mulai berbalik, Kehidupan ekonomi bukannya membaik namun malah menjadi momok bagi masyarakat. Toko-toko milik Cina banyak yang di tutup, sementara toko-toko yang tetap buka setiap hari tidak lepas dari pemerasan tentara Jepang. Barang kebutuhan sehari-hari mulai langka dan menghilang dari

⁸ Ibid. , hlm. 40.

⁹ Chusnul Hajati, dkk, *Peranan Masyarakat Desa di Jawa Tengah Dalam Perjuangan Kemerdekaan Tahun 1945-1949 : Daerah Kendal dan Salatiga*, (Jakarta : Putra Sejati Raya, 1996), hlm. 109.

pasaran, jika ada harganya terlampau tinggi bagi masyarakat sehingga tidak dapat dijangkau.

Kurangnya bahan sandang saat itu membuat orang berjual beli pakaian bekas. Bahkan akhirnya banyak orang yang berpakaian dengan karung goni, karet, serat (brandil). Sedangkan untuk bahan pangan juga langka karena Jepang mengangkut hasil panen rakyat berupa padi, bahkan hewan ternak seperti sapi juga tidak luput dari perhatian pihak Jepang, sehingga masyarakat waktu itu hanya makan makanan seadanya seperti gogik, gaplek, dan lain-lain.

Sementara itu pemerintah pendudukan yang represif menindas rakyat dengan kejam. Rakyat diwajibkan menyerahkan perhiasan emas dan permata, logam besi (kecuali alat-alat pertanian), ternak, padi, dan tenaga kerja untuk *kinrohosi* (kerja bakti) dan *romosha*. Selain itu juga ada keharusan menanam pohon jarak, kapas dan bahan pangan lain yang hasilnya harus disetorkan kepada Jepang.

Jepang juga membuat peraturan baru yang membuat kehidupan petani tersiksa. Peraturan itu adalah petani hanya diperbolehkan menyimpan 20% hasil panen, sisanya 50% harus dijual kepada pemerintah, 10% untuk biaya pengangkutan, lainnya untuk kumiai (koperasi). Adapun ketentuan pembelian padi/beras oleh pemerintah adalah padi bulu Rp. 3,8/kw, padi cere Rp. 3,45/kw, gabah Rp. 4,15/kw, beras No. 1 Rp. 6,5/kw dan beras No. 2 Rp. 4/kw.¹⁰

¹⁰ Sk. *Berita Buana*, tanggal 14 September 1977.

Menurut ketentuan bahwa semua penyerahan barang milik rakyat akan diberi ganti rugi. Dalam pelaksanaannya, ternyata antara daerah yang satu dengan daerah lain tidak sama, tergantung pada penguasa setempat. Di daerah yang penguasanya begitu represif, aturan ditetapkan dengan ketat, bahkan cenderung memeras. Sebaliknya ada juga daerah yang penguasanya, bersikap lebih manusiawi.

Nampaknya ini merupakan fenomena yang menarik, karena terbukti bahwa kebijakan penguasa militer Jepang dalam hal perekonomian begitu bervariasi. Mentalitas penguasa setempat ikut menentukan pola pelaksanaan. Tidak mustahil bahwa waktu itu korupsi ataupun penyalahgunaan wewenang sudah berjangkit diantara mereka, sehingga oknum-oknum yang memanfaatkan kekuasaannya untuk memperkaya diri.

Masalah lain yang menarik adalah mengenai penyerahan tenaga, baik untuk *kinrohosi* atau kerja bakti (Jawa Gugur gunung) maupun *romusha*. Secara umum rakyat terkena wajib *kinrohosi*, baik dilingkungan sendiri atau di lingkungan desa lain. Bagi rakyat adanya *kinrohosi* waktu itu dirasa cukup memberatkan. Lebih-lebih jika proyeknya ada di luar desa yang jaraknya cukup jauh. Selain meninggalkan pekerjaan pokok sehari-hari, mereka harus berjalan kaki cukup jauh dan dipaksa kerja keras tanpa mendapat jaminan makan. Ditambah lagi perlakuan tentara Jepang juga sewenang-wenang dan main pukul. Malahan ada yang bertindak konyol, misalnya menyuruh orang untuk mengangkat sebatang kayu. Jika mereka

tidak kuat, jumlah orang bukannya ditambah tetapi jumlah orangnya dikurangi, dan tetap dipaksa untuk mengangkatnya sambil dipukuli.¹¹

Namun dibandingkan yang terkena *romosha*, mereka merasa masih beruntung, sebab nasib *romosha* jauh lebih tragis. Para *romosha* biasanya dikirim jauh ke daerah atau ke luar Jawa, bahkan ada yang sampai di Birma dan Thailand. Perlakuan Jepang pada mereka diluar batas kemanusiaan. Mereka dipaksa bekerja keras tanpa jaminan makan yang cukup. Akibatnya ribuan *romosha* meninggal karena sakit, dibunuh atau hilang tidak kembali.¹²

Dalam masa pendudukan Jepang terlihat jelas bahwa kehidupan ekonomi rakyat di Kabupaten Sukoharjo sangatlah buruk dan rakyat banyak mengalami penderitaan. Mereka menderita lahir batin. Selama itu rakyat harus berkorban baik jiwa, harta benda juga mental psikologis. Rakyat Suokahrjo pada saat pendudukan Jepang dipaksa untuk melaksanakan *kinrohosi* atau kerja bakti (Gugur gunung) maupun *romusha*. Secara umum rakyat terkena wajib *kinrohosi*, baik dilingkungan sendiri atau di lingkungan desa lain, selain itu rakyat juga terkena *romusha* (kerja paksa).

¹¹ Chusnul Hajati, dkk, op cit. Hlm. 109.

¹² *Ibid.* , hlm. 109.

C. Terbentuknya KNI Daerah Surakarta dan Berdirinya Daerah Istimewa Surakarta.

Proklamasi 17 Agustus 1945 telah membawa Indonesia ke negara yang berdiri sendiri dengan menjadi negara Republik Indonesia, namun dengan kemerdekaan saja tidak cukup untuk membawa rakyat hidup dengan damai dan sejahtera. Walaupun sudah merdeka tidak berarti bahwa di daerah-daerah aman, bahkan sebaliknya situasi yang belum menentu ini mendorong Mr. BPH. Soemodiningrat sebagai ketua KNI Surakarta dengan melakukan tipu muslihat berhasil membujuk Jepang untuk menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah.¹³ Setelah pemerintahan di kuasai oleh KNI Daerah Surakarta pimpinan Mr. BPH Soemodiningrat maka kehidupan politik sedikit demi sedikit mulai berjalan dengan perlahan.

Namun dari kehidupan politik Sukoharjo setelah proklamasi ini banyak mengalami insiden yang membuat perubahan status daerah Sukoharjo. Pada tanggal 19 Oktober 1945, komisaris tinggi R Panji Soeroso untuk daerah Istimewa Yogyakarta dan Surakarta yang berkedudukan di Surakarta telah menyetujui usul badan pekerja KNI Daerah untuk membentuk pemerintahan Direktorium yang terdiri dari 9 orang anggota, yaitu.

1. 5 orang dari KNI daerah.
2. 2 orang dari utusan Pakubuwono XII.
3. 2 orang utusan Mangkunegoro VII.

¹³ Anonim, *Maklumat, Penyerahan Koti Jimu Kyoko dan seluruh Perusahaan kepada KNI Daerah Surakarta*, 1 Oktober 1945.

Adapun 5 orang Anggota dari KNI Daerah itu ialah :

1. Mr. Dalyono, sebagai Ketua Bagian Umum.
2. Prodjosoedodo, sebagai Ketua Bagian Kemamkumuran.
3. Dasoeki, sebagai Ketua Bagian Sosial.
4. Djowardi, sebagai Ketua bagian Keamanan (Anonim, 1973).¹⁴

Pemerintahan Direktoratium itu merupakan Collegial bestuur dengan Komisaris Tinggi sebagai Ketua. Pemerintah Direktoratium itu tidak dapat berjalan lancar akibat perbedaan paham yang sangat tajam. Akhirnya pada tanggal 27 Nopember 1945 Komisaris Tinggi membentuk sebuah Panitia dengan nama Panitia Tata Negara yang bertugas menyusun peraturan daerah yang progresif buat mengatur kedua daerah Kasunanan dan Mangkunegaran. Peraturan Daerah Istimewa Surakarta dibicarakan oleh pihak Kasunanan, Mangkunegaran dan 27 organisasi di Surakarta baik laskar rakyat, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik (representatif untuk mewakili masyarakat Surakarta).

Peraturan Daerah Istimewa Surakarta sebagai berikut:

1. Mempertahankan kedudukan Surakarta sebagai Daerah Istimewa.
2. Kekuasaan Daerah Istimewa Surakarta harus lebih luas dari masa penjajahan yaitu dengan meniadakan Gubernur pada masa kolonial Belanda dan Tyokan pada masa Jepang serta Komisaris tinggi pada masa RI.

¹⁴ Suprpto, op cit. hlm. 9.

3. Urusan pemerintahan diserahkan kerajaan di bawah langsung pemerintah pusat.
4. Memperhatikan Kedaulatan Rakyat dengan mengakomodasikan aliran-aliran dalam masyarakat dan Daerah Istimewa Surakarta memberi manfaat pada rakyat Surakarta.
5. Adanya persatuan dan kesatuan antara pihak Kasunanan dengan Mangkunegaran dalam menjalankan Daerah Istimewa Surakarta.

Sementara di dalam masyarakat telah bergolak gerakan anti Swaparaja yang tidak menghendaki Surakarta menjadi Daerah Istimewa seperti halnya Daerah Istimewa Yogyakarta, di bawah pimpinan Soedirman¹⁵.

Panitia Anti Swapraja itu terdiri dari.

1. Soebantioko
2. Brodjonagoro
3. Soeripto
4. Prodjonimpuno
5. Prodjosoedodo
6. Ismangil Prodjokertarto
7. Ronomarsono
8. Djuwardi
9. Moeladi Djojomartono
10. Dr. Muwardi

¹⁵ *Penetapan Pemerintah nomor 16/sd Tahun 1946 Presiden Republik Indonesia.* (Sukoharjo : Koleksi Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dukumen Kabupaten Sukoharjo).

11. Mangkusudijono

12. Hadi Soenarto

Panitia Anti Swapraja terus mendesak kepada KNI daerah, dan pertentangan makin memuncak. Pemerintah Kasunanan dalam hal ini Sri Paduka Pakubuwono XII tidak menunjukkan aktivitas pribadi, sedangkan disisi lain gerakan-gerakan Anti Swapraja terus mendesak agar kedaulatan Kasunanan sebagai daerah Swapraja dihapus, dan Pemerintah Kasunanan hanya berhak memerintah dalam lingkungan Keraton saja, demikian juga halnya Mangkunegaran.

Menanggapi suasana yang kacau, dan untuk tidak mengurangi akan nilai-nilai persatuan dan kesatuan nasional, kemudian terbitlah Maklumat dari Pakubowono XII, tanggal 30 April 1946 yang antara lain berbunyi sebagai berikut : (Anonim, 1949)

Makloemat kepada Daerah Istimewa Soerakarta Hadiningrat. Mengingat apa yang diseboet dalam pasal 18 Anggaran Dasar kita dan Paduka Jang Moelija tanggal 19 Agustus 1945. Kami permakloemkan kepada rakyat kami, bahwa djikalau mendjadi terang mendjadi kehendak rakjat sebenar-benarnya akan lenjapnja daerah Istimewa Soerakarta Hadiningrat dan telah ditetapkan oleh Pemerintah Repoeblik Indonesia, kami tidak keberatan menjerahkan Pemerintahan kami kepada Pemerintah Agoeng Tadi.¹⁶

Soerakarta tanggal 30
boelan April
Tahoen 1946

Jang Mengerdjakan Pekerdjaan
Pakoe Boewono XII

¹⁶ *Maklumat dari Pakubowono XII, tanggal 30 April 1946.*

Ttd

Woerjaningrat

Kemudian pada tanggal 27 Mei 1946 secara *de facto* Kabupaten Karang Anyar melepaskan diri dari Pemerintahan Mangkunegara setelah itu di ikuti Kabupaten Boyolali, Sragen dari Pemerintahan Kasunanan. Sementara itu Kabupaten Surakarta pusat pemerintahannya diputuskan pindah ke Sukoharjo, pada waktu itu dibarengi dengan memuncaknya gerakan Anti Swapraja dan dukungan untuk membentuk Pemerintahan Kota Surakarta, akhirnya dengan kebulatan tekad dari “Wong Solo” pada tanggal 16 Juni 1946, dinyatakan Pemerintahan Kota berdiri, dan dengan bangganya hari dan tanggal tersebut oleh orang-orang yang merasa berkepentingan, serta pelaku-pelaku sejarah, yang melakukan sendiri peristiwa-peristiwa bersejarah, menentukan bahwa Hari Lahir Pemerintah Daerah Kotamadya Surakarta jatuh pada tanggal 16 Juni 1946.¹⁷

Pernyataan ini diperkuat oleh adanya sikap :

Sebagai klimaknya kehendak rakyat ini dicetuskan bersama yang menyatakan melepaskan diri dari segala ikatan dengan Pemerintah Daerah Istimewa. Pernyataan ini dianggap sangat penting dalam sejarah Pemerintahan daerah Surakarta. Untuk member tanda pernyataan dari peristiwa yang teramat penting itu dipilihlah oleh mereka yang sangat berkepentingan dan berkewajiban tanggal 16 Juni 1946. Sebab pada tanggal 16-6-1946 dinyatakan secara spontan berdirinya Kota Surakarta sebagai daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri (otonom) (Anonim, 1949).

Dari pernyataan diatas dijelaskan bahwa berdirinya Pemerintahan Daerah Surakarta yang lepas dengan Pemerintah Daerah Istimewa . Pada

¹⁷ *Ibid*,

tanggal 16 Juni 1946 kemudian diperingati sebagai hari lahirnya atau berdirinya Kota Surakarta sebagai daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

D. Pemberontakan Tan Malaka

Begitu mendengar pengumuman tentang kemerdekaan RI, pemimpin Mangkunegaran (Mangkunegara VIII dan Susuhunan Sala (Pakubuwana XII) mengirim kabar dukungan ke Presiden RI Soekarno dan menyatakan bahwa wilayah Surakarta (Mangkunegaran dan Kasunanan) adalah bagian dari RI. Sebagai reaksi atas pengakuan ini, Presiden RI Soekarno menetapkan pembentukan propinsi Daerah Istimewa Surakarta (DIS).

Pada Oktober 1945, terbentuk gerakan swapraja/anti-monarki/anti-feodal di Surakarta, yang salah satu pimpinannya adalah Tan Malaka, tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI). Tujuan gerakan ini adalah membubarkan DIS, dan menghapus Mangkunegaran dan Kasunanan. Gerakan ini dikemudian hari dikenal sebagai Pemberontakan Tan Malaka. Motif lain adalah perampasan tanah-tanah pertanian yang dikuasai kedua monarki untuk dibagi-bagi ke petani (*landreform*) oleh gerakan komunis.¹⁸

Tanggal 17 Oktober 1945, wazir (penasihat raja) Susuhunan, KRMH Sosrodiningrat diculik dan dibunuh oleh gerakan Swapraja. Hal ini diikuti

¹⁸ Julianto Ibrahim, Diskusi tentang “*Wacana Pembentukan Propinsi Daerah Istimewa Surakarta*”, (Semarang, Yayasan Putra Budaya Bangsa, 16 Januari 2010).

oleh pencopotan bupati-bupati di wilayah Surakarta yang merupakan kerabat Mangkunegara dan Susuhunan. Bulan Maret 1946, wazir yang baru, KRMT Yudonagoro, juga diculik dan dibunuh gerakan Swapraja. Pada bulan April 1946, sembilan pejabat Kepatihan juga mengalami hal yang sama.

Banyaknya kerusuhan, penculikan, dan pembunuhan, akhirnya tanggal 16 Juni 1946 pemerintah RI membubarkan DIS dan menghilangkan kekuasaan politik Mangkunegaran dan Kasunanan. Sejak saat itu keduanya kehilangan hak otonom menjadi suatu keluarga atau trah biasa dan keraton/istana berubah fungsi sebagai tempat pengembangan seni dan budaya Jawa. Keputusan ini juga mengawali kota Solo di bawah satu administrasi. Selanjutnya dibentuk Karesidenan Surakarta yang mencakup wilayah-wilayah Kasunanan Surakarta dan Praja Mangkunegaran, termasuk kota swapraja Surakarta. Tanggal 16 Juni diperingati setiap tahun sebagai hari kelahiran kota Surakarta.¹⁹

Tanggal 26 Juni 1946 terjadi penculikan terhadap PM Sutan Syahrir di Surakarta oleh sebuah kelompok pemberontak yang dipimpin oleh Mayor Jendral Soedarsono dan 14 pimpinan sipil, di antaranya Tan Malaka, dari Partai Komunis Indonesia. PM Syahrir ditahan di suatu rumah peristirahatan di Paras.

Presiden Soekarno sangat marah atas aksi pemberontakan ini dan memerintahkan Polisi Surakarta menangkap para pimpinan pemberontak. Tanggal 1 Juli 1946, ke 14 pimpinan berhasil ditangkap dan dijebloskan ke

¹⁹ *Ibid*,

penjara Wirogunan. Namun, pada tanggal 2 Juli 1946, tentara Divisi 3 yang dipimpin Mayor Jendral Soedarsono menyerbu penjara Wirogunan dan membebaskan ke empat belas pimpinan pemberontak. Presiden Soekarno lalu memerintahkan Letnan Kolonel Soeharto, pimpinan tentara di Surakarta, untuk menangkap Mayjen Soedarsono dan pimpinan pemberontak. Namun demikian Soeharto menolak perintah ini karena dia tidak mau menangkap pimpinan/atasannya sendiri. Dia hanya mau menangkap para pemberontak kalau ada perintah langsung dari Kepala Staf militer RI, Jendral Soedirman. Presiden Soekarno sangat marah atas penolakan ini dan menjuluki Letnam. Kolonel Soeharto sebagai perwira keras kepala (bahasa Belanda *koppig*).²⁰

Tanggal 3 Juli 1946, Mayjen Soedarsono dan pimpinan pemberontak berhasil dilucuti senjatanya dan ditangkap di dekat Istana Presiden di Yogyakarta oleh pasukan pengawal presiden, setelah Letkol Soeharto berhasil membujuk mereka untuk menghadap Presiden Soekarno. Peristiwa ini lalu dikenal sebagai pemberontakan 3 Juli 1946 yang gagal. PM Syahrir berhasil dibebaskan dan Mayjen Soedarsono serta pimpinan pemberontak dihukum penjara walaupun beberapa bulan kemudian para pemberontak diampuni oleh Presiden Soekarno dan dibebaskan dari penjara.

E. Masa Pendudukan Belanda (1945-1949)

1. Keadaan Politik dan Pemerintahan

Semenjak Jepang menyerah kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 secara hukum tidak lagi berkuasa di Indonesia. Pada tanggal

²⁰ *Ibid*,

10 September 1945 panglima Bala Tentara Kerajaan Jepang di Jawa mengumumkan bahwa pemerintahan akan diserahkan kepada Sekutu dan tidak kepada pihak Indonesia. Pada tanggal 14 September 1945 Mayor Greenhalgh berkunjung ke Jakarta. Ia adalah seorang perwira Sekutu yang pertama kali datang ke Indonesia. Tugas Greenhalgh adalah mempelajari dan melaporkan keadaan di Indonesia menjelang kedatangan pasukan Sekutu.

Pada tanggal 19 September 1945 pasukan Sekutu mendarat di Indonesia . Tugas pasukan Sekutu di Indonesia adalah untuk melucuti senjata tentara Jepang. Pertahanan Sekutu di Asia Tenggara yang bernama South East Asia Command (SEAC) dibawah pimpinan Lord Louis Mountbatten yang berpusat di Singapura. Dalam melaksanakan tugas itu, Mountbatten membentuk suatu komando khusus yang diberi nama Allied Forces Netherland East Indies (AFNEI) dibawah Letnan Jenderal Sir Philip Christison.

Adapun tugas AFNEI di Indonesia adalah.

- a. Menerima penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang.
- b. Membebaskan para tawanan perang dan interniran Sekutu.
- c. Melucuti dan mengumpulkan orang Jepang untuk kemudian dipulangkan.
- d. Menegakkan dan mempertahankan keadaan damai untuk kemudian diserahkan kepada pemerintah sipil.

e. Menghimpun keterangan dan menuntut penjahat perang.²¹

Pasukan AFNEI hanya bertugas di Sumatera dan Jawa, sedangkan untuk daerah Indonesia lainnya diserahkan tugasnya kepada angkatan perang Australia. NICA berusaha mempersenjatai kembali KNIL (*Koninklijk Nederland Indish Leger*), yaitu tentara Kerajaan Belanda yang ditempatkan di Indonesia. Orang-orang NICA dan KNIL di Jakarta, Surabaya dan Bandung mengadakan provokasi sehingga memancing kerusuhan.

Sebagai pimpinan AFNEI, Christison menyadari bahwa untuk kelancaran tugasnya diperlukan bantuan dari Pemerintah Republik Indonesia, oleh karena itu diselenggarakanlah perundingan dengan pemerintah Republik Indonesia. Cristison mengakui pemerintahan *de facto* Republik Indonesia pada tanggal 1 Oktober 1945. Ia tidak akan mencampuri persoalan yang menyangkut status kenegaraan Indonesia.

Dalam kenyataannya pasukan Sekutu Sering membuat huru-hara dan tidak menghormati kedaulatan Republik Indonesia. Pasukan NICA sering melakukan terror terhadap pemimpin-pemimpin Indonesia. Dengan demikian bangsa Indonesia mengetahui bahwa kedatangan Belanda yang membonceng AFNEI adalah untuk kembali menguasai Indonesia. Oleh karena itu bangsa kita berjuang dengan cara diplomasi maupun kekuatan senjata untuk melawan pasukan Belanda yang kembali menjajah

²¹ Sanusi fatah, dkk, *Sejarah Nusantara*, (Jakarta : Pusat Pembukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 48.

Indonesia. Konflik antara Belanda dan Indonesia akhirnya melibatkan peran Dunia Internasional. 1948.

Pasukan Belanda sendiri masuk ke Surakarta pada tanggal 20 Desember 1948 setelah memasuki kota Yogyakarta tanggal 19 Desember 1948 dengan melancarkan Agresi Militer Belanda yang kedua terhadap wilayah Republik Indonesia, termasuk daerah Kabupaten Sukoharjo.²²

Sehubungan dengan pendudukan Kota Surakarta oleh Belanda, maka berdasarkan konsep perang gerilya Surakarta dapat dibagi menjadi tiga daerah yaitu :

a. Daerah pangkalan Gerilya

Daerah pangkalan gerilyanya adalah suatu daerah yang berada dibawah pengawasan atau dalam naungan kekuasaan politik pemerintah yang menyokong gerilyawan.²³ Dengan demikian daerah pangkalan gerilya ini merupakan daerah yang menjadi pusat rencana atau markas pasukan gerilya untuk menyusun strategi gerilya.

Dari daerah ini serangan gerilya dilancarkan, disamping itu daerah ini merupakan pos komando dari seluruh aktivitas perang gerilya yang terdiri dari unsure intelijen, perhubungan dan administrasi serta pengawasan. Adapun kedudukan pos komando selama perang gerilya selalu mobile dan berpindah-pindah mengikuti perkembangan situasi

²² *Jawa Anyar*, Cuplikan Sejarah : *Pertempuran Empat Dina ing Kutha Solo (7-10 Agustus 1949)*, No.30/I, 9-15 Agustus 1993.

²³ Mayor Nasir Asmara, *Perang Gerilya*, (Jakarta : Pembimbing, 1961), hlm. 22.

yang ada pada saat itu. Lokasi yang pernah dipakai untuk pangkalan gerilya diantaranya adalah daerah Kemuning, Balong dan Jenggrik, daerah itu terdapat dilereng gunung lawu. Pemilihan daerah-daerah tersebut sebagai daerah pangkalan gerilya sangatlah tepat karena disamping daerahnya tertutup dan terlindungi oleh lebatnya hutan juga letaknya jauh di pedalaman sehingga sukar untuk dijangkau oleh pihak musuh.²⁴

b. Daerah Pendudukan Belanda

Daerah pendudukan merupakan daerah yang secara fisik dikuasai oleh Belanda dan dibawah pemerintahan pendudukan, sehingga aktivitas-aktivitas gerilya di daerah pendudukan ini terbatas pada gerakan-gerakan rahasia dan serangan-serangan insidental saja. Di wilayah Surakarta yang menjadi daerah pendudukan Belanda adalah Kota Surakarta, sebab hanya disinilah yang secara fisik dapat dikuasi oleh pihak Belanda, sedangkan diluar itu Belanda hanya mampu menempatkan pos-pos penjagaan dijalur-jalur lalu lintas dan kota kecil yang mempunyai peran penting baik dalam militer maupun segi ekonomis. Untuk pos-pos Belanda yang terdapat di Surakarta adalah Bangak, Kartasura, Colomadu, Kalioso, Tasikmadu, Bekonang, Baki dan Delangu.

c. Daerah yang tidak dikuasai penuh oleh kedua belah pihak

²⁴ *Ibid.* , hlm.22.

Daerah yang tidak dikuasi penuh oleh kedua belah pihak yaitu daerah yang baik pasukan gerilya maupun Belanda tidak dapat menguasainya secara penuh. Di daerah ini kedua pihak hanya mampu melakukan pengawasan ataupun perlindungan terhadap aktivitas yang menyangkut kepentingan masing-masing pihak. Mereka tidak punya kekuasaan penuh atas daerah ini dan hanya bias menguasai aspek-aspek tertentu saja dalam kehidupan masyarakat, seperti bidang ekonomi. Daerah yang termasuk dalam kategori ini adalah Sragen, Sukoharjo dan Karanganyar.

Saat menghadapi Belanda di Kabupaten Sukoharjo TNI menempuh taktik bumi hangus dan mengosongkan kota. Di sini bukan berarti pada saat kedatangan Belanda, Kabupaten Sukoharjo dalam keadaan kosong tanpa penghuni. Karena ada juga warga masyarakat yang tidak ikut mengungsi, misalnya sekelompok orang Tionghoa, mereka justru menyambut kedatangan Belanda dengan gembira. Pada saat kedatangannya di Sukoharjo, Belanda membawa serta badan penerangannya yaitu *Regering Voorlichting Dienst* (RVD) dengan unit mobil penerangannya untuk menyampaikan propaganda kepada penduduk.²⁵ Satu hari setelah pendudukan, Belanda mulai mengeluarkan sebuah maklumat yang isisnya antara lain :

- 1) Rakyat dilarang berkumpul lebih dari lima (5) orang.

²⁵ Sawarno Prodjodikoro, *Pertempuran Patang Dino Ngrebut Surakarta, Mekar sari* 15 Agustus 1988.

- 2) Siapa melawan akan ditembak tanpa diadili.
- 3) Dilarang mendekati tempat-tempat militer Belanda.
- 4) Berlakunya jam malam dari jam 10.00 sampai jam 05.00.²⁶

Pada awal pendudukan ini, pasukan Belanda sudah menunjukkan sikap congkak dan sewenang-wenang, sehingga amat menyakitkan hati. Misalnya mereka sengaja membagi-bagikan barang-barang mereka kepada penduduk. Berhubung penduduk jarang atau bahkan belum pernah memilikinya, maka mereka kemudian saling berebut untuk mendapatkannya. Keadaan itu membuat tentara Belanda marah dan kemudian mereka memukul atau menendang rakyat sambil membunyikan revlovernya. Karena ketakutan kemudian rakyat melarikan diri. Kejadian-kejadian seperti itulah yang diambil gambarnya dan dimanfaatkan Belanda untuk propaganda.

Sedangkan untuk mempengaruhi rakyat dan menanamkan kekuasaan di daerah pendudukan, Belanda menempuh beberapa jalan. Misalnya mengadakan distribusi bahan pangan, sandang dan lain sebagainya. Distribusi tersebut dilakukan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak menunjukkan sikap anti dan mau bekerja sama dengan Belanda. Namun demikian, masih banyak penduduk yang berjiwa nasionalis dan kelompok ini mempunyai jumlah yang besar. Mereka tidak mudah tergiur oleh tawaran kemewahan Belanda yang kedudukan ekonominya lebih kuat karena mendapat bantuan dari

²⁶ Dinas Sedjarah kodam VII/Diponegoro, *Sejarah TNI Surakarta Tahun 1942-1948*, (Surakarta, Naskah, 1977), hlm. 9.

kelompok minoritas (bangsa Arab dan Tionghoa) di Surakarta. Salah satu yang menolak tawaran dari Belanda adalah walikota Sjama Suridjal dan keluarganya, mereka lalu diasingkan ke Jakarta sebagai tawanan.²⁷

Disamping usaha tersebut Belanda juga mengeluarkan uang federal sebagai alat pembayaran yang syah di kota Surakarta. Dan untuk melemahkan ekonomi rakyat, Belanda melakukan pengawasan dan blokade ekonomi secara ketat, pengeledahan dijalur-jalur perdagangan dan tempat-tempat yang strategis.

Untuk mengatasi kesulitan ekonomi akibat tindakan Belanda tadi khususnya dalam masalah pangan, di daerah gerilya penduduk berusaha menjual beras dengan harga yang ditetapkan oleh Belanda dan tetap menerima pembayaran dengan Oeang Republik Indonesia (ORI) sebagai alat penukar yang syah, sekaligus uang tersebut tidak berlaku didaerah pendudukan Belanda.

Pada sisi lain Belanda juga berusaha menarik kelompok agama atau santri.²⁸ Untuk itu Belanda mendatangkan seorang tokoh kyai dari Yogyakarta dalam rangka Dewan Islam, yang diharapkan dapat mempengaruhi masyarakat untuk memihak dan bekerja sama dengan Belanda.

²⁷ *Buletin Gerilya Yudha*. Tahun M.IV.No.8.31 Maret 1949.

²⁸ *Buletin Gerilya Yudha*, 27 April 1949. Usaha Belanda untuk membentuk Dewan Islam di kota Surakarta ternyata tidak berhasil sama sekali, karena tokoh-tokoh agama kota Surakarta tidak ada yang bersedia meskipun dengan tawaran.

Menanggapi taktik Belanda tersebut Dewan Pertahanan Masjumi (bagian penerangan) daerah Surakarta kemudian mengeluarkan seruan yang ditunjukkan kepada seluruh umat Islam di wilayah Surakarta untuk menuju pada *Total Islamic Defence*, dengan cara bersatu padu dan bekerja sama dengan kekuatan yang ada dalam masyarakat demi tegaknya kemerdekaan bangsa dan Negara.²⁹ Akibatnya rencana Belanda untuk mendapatkan dukungan dari umat Islam Surakarta menemui kegagalan.

Sebagai sarana agitasi dan propaganda Belanda juga menggunakan peranan pers. Sebelum agresi militer ke Surakarta. Di kota Surakarta telah terbit lima harian yaitu Harian Pasifik, harian Guntur, harian Murba, Harian Merdeka, dan harian Rakyat. Tetapi begitu Belanda menduduki kota Surakarta tanggal 21 desember 1948 kelima harian tersebut sudah tidak terbit, hal itu dikarenakan adanya pemadaman listrik dan banyak karyawan yang mengungsi ke luar kota.

Media masa yang kemudian beredar di daerah pendudukan adalah brosur- dari RVD, surat kabar harian Warna Warta Jawa Tengah, surat kabar De Lokomotif, surat kabar Suluh Rakyat, ketiga surat kabar itu merupakan terbitan dari kota Semarang. Sedangkan satu-satunya surat kabar yang terbit di Surakarta adalah berita Solo.³⁰ Kelima media masa

²⁹ *Buletin Gerilya Pelita Pantjasila*, No. 2/ IV. 14 Juni 1949.

³⁰ Sawarno Projodikoro, *Pertempuran patang Dino Ngrebut Surakarta*, Mekar Sari 15 Agustus 1988.

tersebut merupakan alat propaganda pihak Belanda dan semuanya bisa didapatkan dengan cuma-cuma.

Untuk memperkuat kedudukannya dalam bidang militer, Belanda berusaha membentuk pasukan bersenjata yang anggotanya terdiri dari masyarakat setempat, adapun tindakan-tindakan guna memperkuat kedudukannya antara lain :

- a. Membubarkan Angkatan Perang (polisi) Surakarta yang dipimpin oleh Soebanto, kemudian dijadikan tentara keamanan dengan nama pasukan Territoriale Bataliyon Surakarta (TBS) dibawah Mayor Soebanto Soerjosoebandrio.³¹
- b. Membentuk pasukan keamanan Pabrik Gula Colomadu dan Pabrik Gula Tasikmadu dan Onderneming Wacht (OW) dengan nama Pasukan Semut Ireng.³²
- c. Membentuk Badan Keamanan dengan gaji 50 sen semalan dengan kewajiban menjaga keamanan di daerah masing-masing.³³

Pada tanggal 19 Desember 1948, tentara Belanda melancarkan Agresi Militer yang kedua terhadap wilayah RI, termasuk daerah Kota Surakarta, namun pasukan Belanda baru memasuki kota Solo pada tanggal 20 Desember 1948 setelah melalui pertempuran dengan TNI. Setelah

³¹ *Buletin gerilya Yudha*, Tahun M.IV. No. 13. 5 Mei 1949.

³² Sedjarah Militer Kodam VII/Diponegoro, *Sejarah TNI Kodam VII/Diponegoro (Djawa Tengah)*, Dinas Sedjarah Kodam VII/Diponegoro, Semarang :-.,hlm 210.)

³³ *Buletin gerilya Yudha*, Tahun M.IV. No. 14. 12 Mei 1949.

menyambut serbuan tentara Belanda dengan kontak senjata di berbagai bagian kota Solo, maka sesuai strategi perang Gerilya yang diperintahkan berlaku mulai saat itu seluruh pasukan TNI meninggalkan kota Solo menuju daerah gerilya masing-masing. Wilayah-wilayah operasi gerilya ini kemudian disebut dengan Sub Wehrkreise 106 Arjuna atau disingkat SWK 106 dengan Mayor Achmadi sebagai komandannya. Setelah melakukan konsolidasi, maka pada tanggal 22 Desember 1948 Mayor Achmadi mengadakan rapat Komando Daerah Solo (KDS) untuk membagi pasukan ke rayon-rayon, yang mula-mula dibagi dalam empat rayon.³⁴

Pembagian rayon-rayon di kota Solo dan sekitarnya selesai pada tanggal 23 Desember 1948. Perkembangan selanjutnya selama perang gerilya, dibentuk lagi dua daerah Sub Rayon yang masing-masing berdiri sendiri, yakni Sub Rayon IV dan Sub Rayon I. Tiap-tiap rayon kemudian dibagi lagi dalam sektor-sektor. Bentuk pemerintahan militer yang berlaku di Surakarta mulai berlaku sejak tanggal 25 Desember 1948, dan tidak hanya di daerah Surakarta saja, namun juga berlaku di seluruh wilayah Jawa. Bentuk pemerintahan ini berlangsung selama Belanda menduduki wilayah Indonesia pada umumnya dan daerah Surakarta pada khususnya. Beerlakukan pemerintahan darurat militer untuk seluruh Pulau Jawa juga mempengaruhi tentang pemerintahan di *Kutha* Surakarta, yaitu karena pendudukan oleh pasukan Belanda, maka pemerintah di *Kutha* Surakarta

³⁴ Cupilkan Bunga Rampai Sejarah, *Pertempuran Empat Hari di Solo dan sekitarnya*, (Jakarta : Kerukunan Eks Anggota Detasemen II Brig. 17, 1993), hlm. 11.

membentuk suatu pemerintahan gerilya untuk menghadapi pendudukan pemerintah dan pasukan Belanda di Kota Surakarta.

2. Keadaan Sosial Ekonomi

Dengan terbentuknya garis Demarkasi akibat agresi militer Belanda pertama, maka daerah Kabupaten Sukoharjo terpecah menjadi dua yaitu daerah dalam yang diduduki atau dikuasi oleh Tentara Belanda dan daerah luar yang merupakan daerah yang diduduki oleh Pemerintah Militer atau sering disebut dengan daerah gerilya. Kehidupan ekonomi rakyat di daerah pendudukan Belanda relatif lebih stabil karena barang-barang pabrikan masih mudah diperoleh dan ada distribusi dari pemerintah federal. Sebaliknya kehidupan penduduk di daerah Republik agak mengalami kesulitan akibat blokade ekonomi Belanda.

Untuk memenuhi kebutuhan akan barang pabrik, peran pedagang lintas batas di sini begitu besar. Baik pihak Belanda maupun RI tidak bisa melarang kegiatan mereka karena adanya saling ketergantungan di bidang ekonomi. Di satu pihak daerah Republik membutuhkan barang-barang pabrik, sebaliknya daerah pendudukan Belanda butuh hasil pertanian. Oleh sebab itu walaupun harus melalui banyak pos pemeriksaan dengan resiko barang disita, namun perdagangan lintas batas tetap berjalan.

Berkecenderungan dengan banyaknya pelintas batas, TNI kemudian membentuk instansi CADT atau *Corps Administration Daerah Tentara*. Setiap pelintas batas diwajibkan meminta surat pas dari instansi tersebut. Instansi ini melahirkan kecemburuan sosial di kalangan aparat,

karena umumnya kesejahteraan mereka lebih baik. Sudah menjadi rahasia umum bahwa , antara petugas dan paran pedagang biasanya ada saling pengertian. Petugas tidak mempersulit perijinan, sebaliknya pedagang mencukupi kebutuhan petugas seperti sabun, rokok, makanan dan lain-lain.³⁵

Untuk menghindari tuduhan sebagai mata-mata para pedagang itu tidak membawa uang tetapi barang. Di daerah Republik meeka menerima pembayaran dengan uang kemudian dibelanjakan barang yang laku didaerah pendudukan, seperti kain batik, lurik, beras gula, sayuran, buah-buahan, telur, ayam, kambing, sapi dan lain-lain. Sebaliknya, di daerah pendudukan transaksi berlangsung dengan uang federal. Uang tersebut sedapat mungkin dihabiskan untuk berbelanja barang yang laku dijual di pedalaman, seperti bahan pakaian, barang kelontong dan barang kebutuhan hidup sehari-hari. Jumlah barang yang di bawa juga terbatas, karena kalau berlebihan akan dicurigai dikira membantu pejuang. Adakalanya mereka bernasib sial dan menderita kerugian, karena barangnya disita Belanda. Ini biasanya dilakukan sebagai tindakan balasan karena TNI menyita barang-barang Belanda.³⁶

Selain perdagangan secara legal, banyak juga terjadi penyelundupan. Salah satu mata dagangan ilegal adalah candu. Biasanya

³⁵ Chusnul Hajati,dkk (1997), *Peranan Masyarakat Desa di Jawa Tengah Dalam Perjuangan Kemerdekaan Tahun 1945-1949 : Daerah Kendal dan Salatiga*. (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI), hlm. 110.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 111.

candu dibawa dari daerah Sala dan pedagang menyembunyikannya dalam rangka sepeda (Jawa : *dalangan*), yang terletak dibawah sedel. Setiba diperbatasan, sepeda dititipkan dan mereka masuk daerah pendudukan dengan berjalan kaki. Mereka sengaja melintas batas pada dini hari. Sesuai ketentuan jam malam bahwa semua orang harus membawa alat penerangan, mereka lalu membawa obor dari batang bambu yang dalamnya sudah diisi dengan candu. Untuk *kamuflase* mereka juga membawa barang dagangan lain dan berbaur dengan pelintas batas lainnya. Di daerah pendudukan candu ditampung oleh pedagang Cina dari Semarang dan daerah lain.

Sejak berlakunya uang ORI, secara berangsur-angsur uang Belanda ditarik dari peredaran sementara uang Jepang masih tetap berlaku. Pada tahun 1946 uang Jepang dinyatakan tidak berlaku dan sebagai gantinya setiap penduduk mendapat distribusi sebanyak Rp. 1,7,. Keputusan itu sangat merugikan rakyat terutama kalangan pedagang. Orang-orang yang kecewa, kemudian membakar atau membuangnya di sembarang tempat sehingga menjadi mainan anak-anak.

Pada kurun waktu ini keadaan ekonomi Sukoharjo masih berada dalam level rendah, keadaan masyarakat dalam menjalankan perekonomian masih dihinggapi dengan rasa takut dan khawatir seperti pada jaman Jepang, namun rakyat masih bisa menjalankan aktivitas pertaniannya walaupun hasil panennya tidak sebaik jaman sebelum Jepang menduduki wilayah ini. Kehidupan pangan masa pendudukan Belanda ini

masih sama dengan masa pendudukan Jepang yaitu masyarakat masih memakan makanan seadanya seperti Jenang, Blugur (seperti janten tetapi rasanya sepah).

3. Keadaan Sosial Budaya

Setelah ditetapkan menjadi daerah otonom Kabupaten Sukoharjo mulai berbenah diri. Jalan utama yang menghubungkan dengan daerah lainnya diperlebar dan diaspal. Di kanan-kiri jalan ditanami pohon-pohon besar sebagai pelindung. Pagar-pagar halaman rumah dan perkantoran juga saluran air diperbaiki dan jaringan air ledeng dibangun. Jalan-jalan masuk kampung juga diperkeras agar tidak becek di musim hujan. Untuk menambah keindahan, rakyat disarankan menanam halaman rumahnya dengan bunga-bunga.³⁷

Selain itu Kabupaten Sukoharjo juga dilengkapi dengan sarana rekreasi antara lain, Makam ki Ageng Balak yang terletak di desa Bendosari, Bekas Benteng Keraton Kartasura sebelum pindah ke Surakarta, Alun - alun, Kolam Segaran (sekarang menjadi lapangan), Gedung obat (dahulu gudang mesiu), Tembok berlubang akibat geger Pacinan, Sumur Madusaka yang digunakan untuk memandikan pusaka - pusaka kerajaan, Makam Sedah Mirah, Tembok beteng dari batu bata setebal 2 - 3 meter, Masjid yang dibangun Sunan Paku Buwono II.

Mengenai pemukiman penduduk Kabupaten Sukoharjo pada awal abad ke 20, terlihat adanya pemisahan berdasarkan perbedaan etnik.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 112.

Orang-orang Belanda dan Eropa yang kebanyakan pejabat pemerintahan dan penguasa perkebunan cenderung bermukim di pusat kota, kawasan ini merupakan daerah perkantoran dan eksekutif. Selain orang Eropa dilarang bermukim didaerah ini, dan pemerintah mengawasinya dengan ketat. Orang Cina biasanya bermukim didaerah perdagangan di sekitar pasar besar dan jalan Solo. Sedangkan orang Timur Asing lainnya berbaur dengan penduduk pribumi di perkampungan.³⁸

Pada masa kolonial stratifikasi masyarakat bersifat kolonialistis. Bangsa Belanda menempati strata tertinggi, disusul bangsa Eropa dan Indo-Eropa, kemudian Timur Asing, sementara orang pribumi menempati strata yang paling bawah. Dengan masuknya Jepang, terjadilah perubahan besar. Orang pribumi memperoleh status yang jauh lebih baik dibanding masa kolonial Belanda. Lebih-lebih dengan adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia, stratifikasi dan struktur masyarakat berubah drastis. Nilai-nilai lama dijungkir balikkan, digantikan dengan nilai-nilai baru sesuai dengan perubahan suasana di masa revolusi.

Sejak jaman Jepang penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional semakin meluas, menggantikan bahasa Belanda sebagai bahasa resmi. Bahasa yang lajim dipakai dalam pergaulan sehari-hari di kalangan penduduk Sukoharjo adalah bahasa Jawa, sedangkan untuk kepentingan yang bersifat resmi digunakan bahasa Indonesia. Di kalangan minoritas masih ada yang menggunakan bahasa ibu, namun jumlahnya terbatas.

³⁸ Chusnul Hajati, dkk. *Op.cit.* hlm, 112.

Dalam bidang agama, mayoritas penduduk Sukoharjo adalah beragama Islam. Yang lain beragama Kristen, Katolik dan Protestan, dan sebagian kecil beragama Budha, beragama Hindu atau penganut aliran kepercayaan.

Dari segi adat-istiadat, sebagian besar penduduk masih mengikuti tradisi sinkritisme Hindu-Jawa dan Islam, khususnya yang berkaitan dengan upacara daur hidup, yaitu tata upacara sejak dari kelahiran, perkawinan hingga kematian. Selain itu kepercayaan animisme dan dinamisme juga masih sangat kuat, ini terbukti dari adanya berbagai tradisi atau upacara yang berkaitan dengan penghormatan terhadap nenek moyang, pendiri desa, tempat-tempat dan benda yang dikeramatkan, juga selamatan atau wilujengan yang berkaitan dengan hajat bersih desa, penggarapan tanah, pembuatan rumah, ruwatan dan lain-lain.³⁹

Dalam hal pendidikan di Kabupaten Sukoharjo, maju dengan pesat sejak awal abad 20. Berbagai macam sekolah baik negeri maupun swasta didirikan. ELS (*Eropeesche Lagere School*) atau sekolah dasar berbahasa Belanda ada tiga buah, MULO (*Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs*) atau sekolah menengah umum pertama ada satu buah, dan HIS (*Hollandsche Inlandsche School*) atau sekolah dasar berbahasa Belanda untuk pribumi ada satu buah. Sekolah Angka 2 atau *De Tweede Klasse School* ada lima buah, tersebar di desa-desa. Untuk orang Cina tersedia sebuah HCS (*Hollandsche Chenesche School*). Sekolah Swasta bersubsidi ada satu,

³⁹ Kodam., VIII/Diponegoro, 1970, *Buku Petundjuk Territorial*. II, hal.209

diusahakan oleh Zending Salatiga, bernama *Inlandsche School* terletak di desa Wonorejo. Sedangkan sekolah swasta ada tiga buah, yaitu HIS *Zending*, HIS Katolik dan THHK, bernama *Tiong Hoa Chu Tio*.⁴⁰

Yang Jelas, bahwa pada masa itu baik sekolah maupun jumlah muridnya amat terbatas, karena kebijakan politik kolonial yang diskriminatif. Sampai dengan masa kemerdekaan keadaan pendidikan di Sukoharjo belum banyak mengalami perubahan. Di setiap kecamatan hanya ada satu atau dua sekolah dasar atau Sekolah Rakyat (SR), bahkan ada desa-desa yang memiliki sekolah baru sampai kelas tiga atau empat.

F. Kasunanan Pada Masa Pendudukan Belanda

Di Surakarta, terlepas dari perkembangan yang terjadi pada tahun-tahun terakhir kekuasaan kolonial Belanda, terdapat dua peristiwa penting bagi kelanjutan sejarah sesudahnya.⁴¹ Pertama, permusuhan lama antara Kasunanan dan Mangkunegaran terus berlanjut, bahkan bertambah sengit dan semakin terbuka. Keinginan Susuhunan Paku Buwono untuk menganeksasi daerah Mangkunegaran dengan bantuan PKS-nya,⁴² mendapat perlawanan

⁴⁰ ANRI, 1976, *Memori Seraj Jabatan 1971-1930 Jawa Tengah*, (Jakarta : ANRI), hal. XLIV.

⁴¹ Cuplikan Bunga Rampai Sejarah, *Pertempuran Empat Hari di Solo dan Sekitarnya*, (Jakarta : Kerukunan Eks Anggota Detasemen II Brig. 17, 1993), hlm. 277.

⁴²PKS merupakan singkatan dari Pakempalan Kawula Surakarta, maksudnya ialah perkumpuln warga Surakarta yang masih setia kepada Paku Buwono X. Sedangkan dari pihak Mangkunegaran dengan bantuan PKMN, yaitu Pakempalan Kawula Mangku Negaran.

dari mangkunegaran dengan PKMN yang tidak mau berada di bawah Susuhunan.⁴³

Persaingan semakin memuncak ketika Mangkunegaran menolak setiap hubungan dengan Kasunanan apabila tidak berdasarkan persamaan status. Hal tersebut sangat kontras dengan perkembangan yang terjadi di Yogyakarta, dimana Paku Alam bersedia mengambil tempat kedua setelah Sultan.⁴⁴

Perkembangan kedua yang sangat penting bagi nasib keraton di Surakarta bahwa pada akhir tahun 1935, kalangan istana sangat memberikan dukungan yang besar bagi gerakan kebangsaan. Pada tahun 1937 keanggotaan PKS menurun, dan ketika organisasi ini bergerak cepat keanggotaannya bertambah pesat. Dukungan keraton terhadap gerakan kebangsaan sangat mempengaruhi keputusan pemerintah kolonial Belanda terhadap pergantian raja di Surakarta setelah Paku Buwono X meninggal dalam bulan Februari 1939. Keputusan pemerintah kolonial Belanda ini merupakan titik balik sejarah Surakarta, karena hal itu secara tidak langsung telah mempersiapkan proses keruntuhan keraton di Surakarta.

Keadaan politik keraton Surakarta semakin tidak jelas ketika susuhunan Paku Buwono X meninggal tanpa pernah mengangkat seorang Putra Mahkota dari keturunannya.⁴⁵ Hal tersebut telah menyulitkan kalangan istana sendiri dan tentunya pemerintah kolonial Belanda, karena ada dua

⁴⁴ Dalam tahun 1898, Susuhunan PB X hendak mengangkat Kusumojudo sebagai Putra Mahkota tetapi dibatalkan karena tidak mendapatkan dukungan kuat dari istana.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 288.

calon yang sama sekali berbeda. Pangeran Hangabehi sebagai calon pertama tidak pernah disukai oleh Susuhunan semasa hidupnya, tetapi mendapatkan dukungan dari golongan tua istana dan pihak kolonial Belanda karena sifatnya yang royal.

Sedangkan Pangeran Kusumoyudo, seorang anak yang sangat didambakan oleh Susuhunan sebagai penggantinya, kurang disukai oleh sebagian besar istana dan pemerintah kolonial Belanda karena merupakan individu yang kuat dan lebih berkemampuan, juga karena sifatnya yang tidak mudah dipegang. Namun pada akhirnya dengan suatu perjanjian yang sangat merugikan pihak keraton, Pangeran Hangabehi berhasil dinobatkan oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai Susuhunan Paku Buwono XI.

Keraton semasa pemerintahan Paku Buwono XI semakin mengalami kemerosotan wibawanya, dan ada anggapan umum bahwa paku Buwono XI merupakan raja terakhir di Surakarta. Perasaan hormat dan kagum dikalangan masyarakat Surakarta berkurang, sebagai akibatnya mulai terjadi beberapa hal yang mungkin tidak pernah ada pada masa Paku Buwono X, terdengar suara-suara yang kurang menghormati raja, terutama sekali setiap Susuhunan datang menemui Gubernur di kantornya untuk berunding. Mulai terdengar suara di kalangan masyarakat luas, bahwa "*Keraton wes koncatana wahyu*", dalam arti lebih luas, kekuasaan dan kewibawaan keraton telah berkurang dan bahkan hilang sama sekali.

BAB III

SEJARAH BERDIRINYA KABUPATEN SUKOHARJO

A. Sejarah Berdirinya Kabupaten Sukoharjo

Kabupaten Sukoharjo sebelum berdiri merupakan wilayah *Kutha* Surakarta, sehingga dalam membahas berdirinya Kabupaten Sukoharjo tidak bisa dilepaskan dari Sejarah Kotamadya. Latar belakang sejarah Kotamadya Surakarta, telah dipaparkan panjang lebar, guna memperoleh cakrawala pandangan yang lebih luas dalam upaya menemukan hari lahirnya Kabupaten Sukoharjo. Walaupun Wong Solo telah menyatakan bahwa tanggal 16 Juni telah ditetapkan sebagai hari lahirnya, tidak secara otomatis Kabupaten Sukoharjo dibentuk atau berdiri.

Walaupun telah nyata bahwa kota Surakarta berdiri, namun sebagai orang yang ingin menunjukkan kesetiaannya kepada Pemerintah Republik Indonesia, masih perlu menunggu sikap dan tindakan Pemerintah Pusat. Akhirnya keluarlah Penetapan Pemerintah Nomor 16/SD tanggal 15 Juli 1946, yang isinya antara lain:

1. Jabatan Komisaris Tinggi untuk daerah Surakarta dan Yogyakarta serta Wakil Pemerintah Pusat di Surakarta dihapuskan.
2. Sebelum bentuk Pemerintahan Daerah Kasunanan dan Mangkunegaran ditetapkan dengan Undang-undang untuk sementara, daerah tersebut dipandang sebagai satu Karesidenan yang dikepalai oleh seorang residen.

3. Di dalam Lingkungan Karisidenan Surakarta dibentuk suatu daerah baru dengan nama Kota Surakarta, yang dikepalai oleh seorang Walikota.¹

Secara formal Penetapan Pemerintah No. 16/SD tanggal 15 Juli 1946 itu tidak mengatur tentang pembentukan Kabupaten Sukoharjo,² namun apabila menafsirkannya secara logika, dapat kita tarik suatu kesimpulan sebagai berikut.

1. Pemerintah Kasunanan dan Mangkunegaran dipandang sudah tidak ada lagi, dan daerah-daerahnya sementara dijadikan sebagai Karesidenan Surakarta. Ini berarti daerah karesidenan Surakarta terdiri dari bekas daerah-daerah Mangkunegaran yaitu Kabupaten Karanganyar dan Wonogiri dan bekas daerah Kasunanan meliputi Kabupaten Klaten, Boyolali, Sragen dan Sukoharjo (Kawedanan Sukoharjo, Kartasura dan Bekonang), serta Kota Surakarta yang telah berbentuk Pemerintahan baru yaitu Kota Surakarta yang dikepalai oleh seorang Walikota. Itu semua berarti bahwa Pemerintah Kasunanan dan Mangkunegaran hanya berdaulat dalam batas tembok Kerajaan saja.
2. Dengan demikian kabupaten Kutho Mangkunegaran dan kabupaten Kutho Surakarta dengan adanya Pemerintahan Kota Surakarta kekuasaannya dihapus.³

¹ Suprato,1985, *Menelusuri hari Lahiranya Kabupaten Sukoharjo Suatu Konsep*.hlm 15.

²*Ibid.* , hlm 15.

³*Ibid.* , hlm 15.

3. Keadaan ini nampaknya mengilhami para pemimpin saat itu untuk membentuk kabupaten baru di luar Kota Surakarta, agar ketiga kawedanan yaitu Sukoharjo, Kartasura, dan Bekonang dapat dibina dalam suatu naungan pemerintah kabupaten. Secara tidak sengaja KNI Daerah Surakarta menunjuk KRT Soewarno Honggopati Tjitrohoepojo⁴ sebagai ketua Pembina ketiga daerah tersebut. Dan ketiga kawedanan tersebut melebur menjadi satu menjadi sebuah Kabupaten Sukoharjo.

Bupati KRT Soewarno Honggopati Tjitrohoepojo mulai memangka jabatannya sebagai bupati Sukoharjo semenjak tanggal 29 Agustus 1946, dan baru menerima surat keputusan sebagai Bupati Pamong Projo I Sukoharjo setelah menjalankan delapan bulan pemerintahannya. Pengangkatan KRT Soewarno Honggopati Tjitrohoepojo ini banyak menimbulkan pertanyaan, antara lain, Sukoharjo merupakan daerah dari Kabupaten Kutho Surakarta, namun yang diangkat sebagai Bupati Sukoharjo justru seorang pejabat yang berasal dari kalangan Mangkunegaran. Penunjukkan KRT Soewarno Honggopati Tjitrohoepojo sebagai Bupati Sukoharjo tidak lepas dari situasi politik saat itu. Dari kalangan Kabupaten Kutho Surakarta tidak ada seorangpun yang mampu melaksanakan atau sanggup memangku jabatan sebagai Bupati Sukoharjo, hal ini dikarenakan adanya gejolak Anti Swapraja yang terjadi dalam Kabupaten Kutho Surakarta.

⁴Pada saat itu KRT Soewarno Honggopati Tjitrohoepojo menjabat sebagai Bupati Martoprojo Urusan Pajak dan Hasil Keuangan Lainnya pada Kabupaten Kutho Mangkunegaran, jika pada waktu sekarang jabatan tersebut seperti Dinas Pendapatan Daerah.

Dalam penetapan hari jadi Sukoharjo tidak ada catatan-catatan resmi dan tertulis, maka diadakan pertimbangan untuk menetapkan Hari Jadi Kabupaten Sukoharjo antara lain sebagai berikut.

1. Kotamadya Surakarta dinyatakan lahir/berdiri pada tanggal 16 Juni 1946.
2. Dengan berdirinya Kotamadya Surakarta, telah jelas Kabupaten Kutho Surakarta yang menjadi induk Kawedanan Sukoharjo, Kartasura, Bekonang menjadi hapus.
3. Penunjukkan KRT Soewarno Honggopati Tjitrihoepojo tidak disertai surat tertulis namun hanya secara spontan saja.
4. Pengangkatan KRT Soewarno Honggopati Tjitrohoepojo sebagai Bupati yang tidak diketahui secara pasti, namun wilayahnya sudah ada dengan jelas yaitu Sukoharjo.
5. Pembentukan Kabupaten Sukoharjo tidak diatur secara khusus seperti halnya Kotamadya Surakarta.
6. Penetapan Pemerintah No.16/SD tanggal 15 Juli 1946 secara materiil, dan logis dapat dijadikan dasar, karena setelah ketentuan itu ditetapkan mengakibatkan Kabupaten Sukoharjo dibentuk dengan wilayahnya yang meliputi tiga kawedanan yaitu Sukoharjo, Kartasura, dan Bekonang.⁵

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Penetapan hari jadi Kabupaten Sukoharjo jatuh pada hari Senin Pon, tanggal 15 Juli 1946, hal tersebut disesuaikan dengan dikeluarkannya Penetapan Pemerintah

⁵ Naskah, op.cit, hal 18.

No.16/SD tanggal 15 Juli 1946.⁶ Dalam perhitungan Jawa Senin Pon jatuh pada tanggal 14 ruwah 1877 dan tahun Hijrahnya jatuh pada tanggal 17 Sya`ban 1365 H. Dalam kalender tahun Jawa maka Hari Senin Pon itu mempunyai neptu : Senin = 4, Pon = 7, jumlahnya 11. Dengan demikian jika seseorang dilahirkan memiliki jumlah neptu 11, maka mempunyai makna rezekinya akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya derajat yang dicapainya.⁷

Nampaknya proses kelahiran Kabupaten Sukoharjo ini begitu mulus, tanpa dilatarbelakangi suatu perjuangan rakyat seperti halnya yang terjadi di daerah-daerah lainnya. Hal ini dikarenakan banyak gerakan-gerakan yang menfokuskan di Kota Surakarta, kemudian peristiwa-peristiwa yang terjadi di kota Surakarta telah membuka pintu gerbang untuk lahirnya Kabupaten Sukoharjo.

B. Perjalanan Sejarah Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo Tahun 1946-1950.

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Pertama Kali setelah berdiri (15 Juli 1946).

Disebabkan serba mendadak, maka keberangkatan KRT Soewarno Honggopati Tjitrohoepojo belum dilengkapi surat-surat keputusan, sementara waktu sambil menunggu dikeluarkannya surat dari Pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta, dilakukan persiapan-persiapan yang

⁶*Ibid.* hlm. 19

⁷ Empeh Wong Kam Fu, Almanak Tahun 1890-2000, cetakan ke-2, (Jakarta: Penerbit Sekretariat Empeh Wong Kang Fu), hlm. 113.

diperlukan untuk menjalankan tugas sebagai bupati dalam kondisi yang serba baru. Dalam awal penyelenggaraan Pemerintahan pertama kali di Sukoharjo, kondisi kelengkapan Pemerintahan masih belum sempurna.

Pada hari Kamis Wage tanggal 29 Agustus 1946, KRT Soewarno Honggopati Tjitrohoepojo melakukan boyongan dari Solo ke Sukoharjo, kemudian menyusul RMT Santanus Hardjodiningrat,⁸ yang pada saat itu menjabat sebagai patih. Setelah perpindahan kedua pejabat itu, secara berbarengan para pejabat lainnya mulai melakukan kepindahan tempat tinggal mereka, pejabat-pejabat itu antara lain sebagai berikut.

- a. Purnomopanoto, sebagai Mantri Kabupaten;
- b. Tjokromartono, sebagai pegawai Kabupaten;
- c. Mardiwidjono, sebagai pegawai Kabupaten;
- d. Djonokoesoeno, sebagai pegawai Kabupaten;⁹
- e. Soepono, sebagai pegawai Kabupaten;
- f. Padmowidjono, sebagai pegawai Kabupaten;
- g. Brotopawiro, sebagai pegawai Kabupaten;
- h. Sastrosoepadmo, sebagai pegawai Kabupaten;
- i. Sajid Mataram, sebagai pegawai Kabupaten;
- j. Djatmiko, sebagai pegawai Kabupaten;
- k. Marjadi, sebagai pegawai Kabupaten;

⁸RMT Santanus Hardjodiningrat adalah putra dari Pangeran Koemoyudo.

⁹Djonokoesoeno kemudian melimpah menjadi Kepala Jawatan Penerangan Kabupaten.

- l. Narso, sebagai pegawai Kabupaten;
- m. Soetanto, sebagai pegawai Kabupaten;
- n. Soerawi, sebagai pegawai Kabupaten;
- o. Soenardio, sebagai pegawai Kabupaten;
- p. kromotaruno, sebagai pegawai Kabupaten;¹⁰

Rumah Dinas dan kantor Patih pada waktu saat ini manjadi Kantor Pembantu Bupati Sukoharjo, yang terletak di jalan Jendral Soedirman No.25. KRT Soewarno Honggopati Tjitrohoepojo beserta keluarga langsung menempati rumah yang sekarang terletak di jalan Jendral Soedirman no. 2, sebagai kediaman resmi Bupati Kepala Daerah. Rumah Dinas tersebut adalah bekas rumah Administratur Pabrik Gula Tuan Lendah atau sering disebut dengan Pabrik Gula Lendahan.¹¹

Sedangkan Kantor Bupati sementara, menempati bangunan Kawedanan yang sekarang digunakan sebagai Makodim 0276, yang terletak di jalan Mayor Soenaryo.Wedono saat itu dijabat oleh RM.Ng.Brotopranoto, yang kemudian digantikan R.Ng.Projosonto, seiring dengan peristiwa meletusnya pemberontakan PKI Madiun.

Pada tanggal 5 Januari 1947 kantor kabupaten kemudian dipindah dari Kawedanan ke sebelah barat rumah dinas Bupati, bangunan ini merupakan bekas gudang gula, kemudian diperbaiki dan ditetapkan menjadi kantor Kabupaten.Dengan penetapan Kantor baru ini, maka

¹⁰Suprpto, op.cit, hlm. 21.

¹¹*Ibid.* , hlm, 22.

sedikit demi sedikit roda pemerintahan Kabupaten Sukoharjo mulai berjalan dalam upayanya mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 walaupun banyak tantangan yang harus dihadapi. Dalam menjalankan Pemerintahan sehari-hari Bupati dibantu oleh Badan Eksekutif yang terdiri dari wakil-wakil Partai Politik.

Setelah hampir satu tahun KRT Soewarno Honggopati Tjitrohoepojo menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Bupati, maka atas ketetapan Pemerintah RI, yang berkedudukan di Yogyakarta, oleh Menteri Dalam Negeri yang berkedudukan di Purwokerto, dikeluarkan Surat Keputusan tanggal 25 April 1947, Nomor A.I.2/4/2 yang mengangkat KRT¹² Soewarno Honggopati Tjitrohoepojo menjadi Bupati Pamong Projo pertama untuk Sukoharjo. Dengan keluarnya ketetapan tersebut maka kedudukan sebagai seorang Bupati menjadi lebih kuat.

2. Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo Dalam Agresi Militer Belanda Pertama (21 Juli 1947)

Pemerintah Jepang melalui Kaisar Hirohito menyatakan menyerah secara resmi dan takluk kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 setelah sebelumnya Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Kota Hiroshima pada tanggal 8 Agustus dan di Kota Nagasaki tanggal 9 Agustus 1945. Pernyataan Kaisar Hirohito tersebut menandai secara resmi berakhirnya Penjajahan Jepang atas Indonesia, hanya secara nyata hal ini masih harus diperjuangkan Bangsa Indonesia. Peluang tersebut

¹²*Ibid*, hlm. 20.

dimanfaatkan oleh Soekarno-Hatta dan para pemuda dengan tidak lagi meminta kemerdekaan dari Jepang, tetapi memaksa merebut kemerdekaan atas tanggung jawab sendiri dan atas nama Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.¹³

Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia merupakan babak baru, karena sejak saat itu Bangsa Indonesia memasuki era baru yaitu mempertahankan mengisi kemerdekaan. Kenyataan ini membangkitkan semangat para pemuda dan para pejuang untuk mengambil alih kekuasaan yang masih berada ditangan Jepang. Pemimpin-pemimpin Bangsa Indonesia sendiri, sejak zaman penjajahan Belanda sudah berjuang membangkitkan semangat kemerdekaan. Pada masa pendudukan Tentara Jepang meskipun usaha-usaha demikian ditindas dan dirintangi mereka tetap gigih dalam melakukan perjuangan.¹⁴

Perjuangan kemerdekaan yang dilakukan oleh berbagai lapisan dan golongan masyarakat sesudah proklamasi kemerdekaan hingga pengakuan kedaulatan negara Republik Indonesia, karena adanya ancaman akan kembalinya kekuasaan kolonial. Ancaman ini menimbulkan kegelisahan yang sangat eksplosif sehingga menimbulkan perlawanan bersenjata yang meluas. Krisis yang berlangsung lama mengakibatkan akhirnya organisasi-organisasi perjuangan. Organisasi-organisasi ini ada yang berafiliasi

¹³ *Ibid*, hlm. 23.

¹⁴ Panitia Penyusunan Sejarah Pertempuran Lima Hari di Semarang, *Sejarah Pertempuran Lima Hari di Semarang*, (Semarang : Penerbit Suara Merdeka, 1977), hlm. 244.

dibawah suatu partai politik dan ada pula yang tidak, misalnya Hisbullah berada dibawah paham politik Nahdatul Ulama, sedang Persindo dibawah PKI. Sementara itu Laskar Rakyat, Tentara Pelajar, Ikatan Pelajar Indonesia, dan berbagai perjuangan lain tidak berafiliasi dibawah partai politik apapun. Karena tekanan-tekanan emosional, rakyat siap menggabungkan diri dengan kelompok-kelompok kesatuan bersenjata atau badan perjuangan. Situasi krisis berubah menjadi situasi konflik karena dieksploitasi oleh golongan-golongan yang bertentangan dalam proses perebutan kekuasaan.

Pertempuran-pertempuran melawan tentara asing berlangsung secara terus menerus dari tahun 1945-1949. Ancaman akan kembalinya kekuasaan Belanda tampak dengan terjadi perubahan politik di Indonesia, setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pertempuran melawan Jepang berlangsung dengan hebat sepanjang bulan Oktober hingga September 1945. Pelucutan senjata Jepang yang dilakukan oleh pejuang-pejuang Indonesia menyebabkan terjadinya pertempuran demi pertempuran. Bersamaan dengan itu, pada tanggal 19 September 1945 pasukan Inggris mendarat di Jakarta, pasukan tersebut mewakili sekutu untuk menerima penyerahan kekuasaan dari pihak Jepang dan melucuti senjata Jepang dan menjaga perdamaian, tetapi pasukan Inggris membawa tokoh-tokoh *Netherdlands Indies Civil Administration* (NICA) yang akan menegakkan kembali Hindia Belanda. Dua minggu pertama terjadi

pertempuran segit di Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Bandung.

Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melancarkan serangan terhadap daerah Republik Indonesia yang lebih dikenal sebagai Agresi Militer Belanda Pertama. Belanda berhasil menerobos ke daerah-daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia di Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Fokus serangan tentara Belanda di tiga tempat, yaitu Sumatera Timur, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di Sumatera Timur, sasaran mereka adalah daerah perkebunan tembakau, di Jawa Tengah mereka menguasai seluruh pantai utara, dan di Jawa Timur, sasaran utamanya adalah wilayah di mana terdapat perkebunan tebu dan pabrik-pabrik gula. Pada agresi militer pertama ini, Belanda juga mengerahkan kedua pasukan khusus, yaitu Korps Speciale Troepen (KST) di bawah Westerling yang kini berpangkat Kapten, dan Pasukan Para I (1e para compagnie) di bawah Kapten C. Sisselaar. Pasukan KST (pengembangan dari DST) yang sejak kembali dari pembantaian di Sulawesi Selatan belum pernah beraksi lagi, kini ditugaskan tidak hanya di Jawa, melainkan dikirim juga ke Sumatera.

Agresi tentara Belanda berhasil merebut daerah-daerah di wilayah Republik Indonesia yang sangat penting dan kaya seperti kota pelabuhan, perkebunan dan pertambangan. Pada 29 Juli 1947, pesawat Dakota Republik dengan simbol Palang Merah di badan pesawat yang membawa obat-obatan dari Singapura, sumbangan Palang Merah Malaya ditembak

jatuh oleh Belanda dan mengakibatkan tewasnya Komodor Muda Udara Mas Agustinus Adisutjipto, Komodor Muda Udara dr. Abdulrahman Saleh dan Perwira Muda Udara I Adisumarmo Wiryokusumo.

Akhirnya pada tanggal 8 Desember 1947, atas usul Komisi Tiga Negara (KTN)¹⁵ diadakan perundingan di atas geladak kapal Amerika Serikat USS Renville, sehingga perundingan itu dikenal sebagai perundingan Renville. Dalam perundingan tersebut, pemerintah Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Sedangkan Belanda diwakili oleh Abdul Kadir Widjoatmodjo. Hasil perundingan tersebut adalah sebagai berikut.

- a. wilayah Indonesia diakui berdasarkan garis demarkasi (garis van Mook),
- b. Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia sampai RIS terbentuk,
- c. kedudukan RIS dan Belanda sejajar dalam Uni Indonesia-Belanda,
- d. RI merupakan bagian dari RIS, dan
- e. pasukan RI yang berada di daerah kantong harus ditarik ke daerah RI.¹⁶

Adanya perjanjian Renville tersebut menyebabkan Amir Syarifudin tidak mampu mempertahankan kadudukannya, sehingga pada tanggal 23

¹⁵ Komisi Tiga Negara (KTN). Anggota KTN ada tiga negara yaitu, Belgia (dipilih Belanda) dipimpin oleh Paul van Zeeland; Australia (dipilih Indonesia) dipimpin oleh Richard Kirby; dan Amerika Serikat (dipilih Indonesia dan Belanda) dipimpin Dr. Frank Graham.

¹⁶ Leo Agung S., dan Dwi Ari Listiyani, *Sejarah Nasional Dan Umum*, (Surakarta : Sbelas Maret University Press, 2003), hal 180.

Januari 1948 menyerahkan mandatnya kepada Presiden, dan kemudian digantikan oleh Hatta. Untuk merebut kembali kedudukannya, pada tanggal 28 Juni 1948 Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) untuk memperkuat basis massa, FDR membentuk organisasi kaum petani dan buruh. Selain itu dengan memancing bentrokan dengan menghasut buruh. Puncaknya ketika terjadi pemogokan di pabrik karung Delanggu (Jawa Tengah) pada tanggal 5 Juli 1959.¹⁷

Pada tanggal 11 Agustus 1948, Musso tiba dari Moskow. Amir dan FDR segera bergabung dengan Musso. Untuk memperkuat organisasi, maka disusunlah doktrin bagi PKI. Doktrin itu bernama Jalan Baru. PKI banyak melakukan kekacauan, terutama di Surakarta. Oleh PKI daerah Surakarta dijadikan daerah kacau (*wildwest*). Sementara Madiun dijadikan basis gerilya. Pada tanggal 18 September 1948, Musso memproklamasikan berdirinya pemerintahan Soviet di Indonesia. Tujuannya untuk meruntuhkan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan menggantinya dengan negara komunis. Pada waktu yang bersamaan, gerakan PKI dapat merebut tempat-tempat penting di Madiun.

Suasana Agresi Militer Belanda Pertama mempengaruhi jalannya pemerintahan, yang mengakibatkan Kementrian berpindah dan tersebar, walaupun kedudukan pemerintah pusat masih berada di Yogyakarta. Pemerintah daerah pada waktu itu belum dapat berjalan sempurna, karena di tingkat Pusat masih berkecamuk pergolakan politik. Suasana Nasional

¹⁷ Sanusi fatah dkk, Sejarah Nasional dan Umum, (Jakarta : Depdiknas, 2008), hlm. 250.

yang demikian itu juga berpengaruh pada kondisi perpolitikan Sukoharjo yang baru seumur jagung. Hal itu terbukti dengan adanya gerakan PKI yang mengisi catatan sejarah Sukoharjo dengan aksi yang tidak mempunyai perikemanusiaan sama sekali. Puncaknya pada bulan Oktober 1948. Sebaliknya Sukoharjo telah mencatat lembaran sejarahnya dengan tinta emas, dalam perjuangan menegakkan cita-cita Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.

3. Peristiwa Berdarah Oktober 1948

Akibat persetujuan renville, kabinet Amir Syarifuddin jatuh karena dianggap terlalu menguntungkan Belanda. Persetujuan Renville tidak menjamin secara tegas kedudukan dan kelangsungan hidup Republik Indonesia. Posisi RI bertambah sulit serta wilayah Indonesia juga dikurangi lagi sehingga semakin bertambah sempit masih lagi ditambah dengan blokade-blokade ekonomi oleh Belanda. Maka pada tanggal 23 Januari 1948 kabinet Amir Syarifudin mengembalikan mandat kepada presiden RI. Kemudian presiden menunjuk Moh. Hatta untuk membentuk kabinet baru. Setelah menyerahkan mandat kemudian Amir Syarifuddin menjadi oposisi dari kabinet Hatta. Ia menyusun kekuatan dalam Front Demokrasi Rakyat (FDR), yang mempersatukan semua golongan sosialis kiri dan komunis. FDR berusaha memancing terjadinya bentrokan fisik terhadap lawan-lawan politiknya, sehingga berakibat terjadinya kerusuhan terutama di daerah Surakarta dan sekitarnya seperti daerah Delanggu. Pada saat FDR melakukan offensif tampillah seorang pemimpin berpengalaman yaitu

Musso. Ia adalah seorang tokoh PKI yang seorang tokoh PKI darizaman sebelum Perang Dunia II.

Musso telah bermukim selama beberapa puluh tahun di Uni Soviet (sekarang Rusia). Ia dikirim oleh pimpinan gerakan Komunis Internasional ke Indonesia dengan tujuan untuk merebut pimpinan atas negara RI dari tangan kaum nasionalis. Sesuai dengan tugas yang diberikan kepadanya, Musso segera mengambil langkah-langkah untuk memperkuat organisasi dan membangkitkan kemampuan kaum komunis Indonesia. Ia mengembangkan politik yang diberi nama “ Jalan baru “. Sesuai dengan doktrin itu, ia melakukan fusi antara Partai Sosialis, Partai Buruh, dll menjadi PKI. Ia bersama Amir Syarifuddin mengambil alih pimpinan PKI baru itu. PKI melakukan provokasi terhadap Kabinet Hatta dan menuduh pimpinan nasional pada waktu itu seolah-olah bersifat kompromistis terhadap musuh. Ia juga mengecam Persetujuan Renville, padahal arsiteknya adalah Amir Syarifuddin sendiri. Kesimpulan dari serangan itu adalah PKI ingin menggantikan pimpinan nasional dengan orang-orangnya.

Hari Rabu tanggal 30 September 1948,¹⁸ sore hari di pendopo rumah dinas Bupati di selenggarakan rapat yang diikuti oleh pejabat-pejabat teras unsur eksekutif dan Badan Pertimbangan Rakyat Daerah, untuk mendengarkan penjelasan Mayor Suwitoyo yang saat itu telah memihak kepada pemberontakan PKI Madiun. Dalam rapat itu Mayor

¹⁸ Suprpto, op.cit, hlm. 23.

Suwitoyo menjelaskan, bahwa Pemerintahan Soekarno-Hatta telah berbalik arah dengan adanya perjanjian Renville, sehingga sudah tiba saatnya pemerintah Kabupaten Sukoharjo menetapkan sikap dalam menghadapi keadaan seperti ini.

Sementara itu di hari yang sama, di Solo telah terjadi kontak senjata antara pasukan Siliwangi¹⁹ dengan pasukan tak dikenal yang beridentitas merah-merah, yang kemudian dikenal dengan sebutan Tentara Merah yang mendukung aksi pemberontakan PKI Madiun. Kontak senjata itu telah menjalar ke daerah sekitar Solo termasuk daerah Sukoharjo, pada sore itu tanggal 30 September Tentara Merah telah menduduki Rumah Dinas Bupati dan pejabat-pejabat yang ikut dalam rapat itu berhasil di culik oleh Tentara Merah dan membawa KRT Soewarno Honggopati Tjitrohoepojo beserta stafnya ke daerah Tirtomoyo, Wonogiri, tepatnya bekas gudang timah. Tentara Merah berkuasa di Sukoharjo hanya dalam kurun waktu enam (6) hari karena dengan cepatnya Pasukan Siliwangi terus menjalankan tugasnya untuk menghancurkan dan memporak-porandakan kaum pemberontak dalam hal ini PKI.

Operasi Siliwangi ini terus mengejar kaum pemberontak hingga ke selatan yaitu Wonogiri dan akhirnya dapat memukul pemberontakan PKI dan mengungkap tabir pembunuhan yang dilakukan Tentara Merah terhadap KRT Soewarno Honggopati Tjitrohoepojo (Bupati), RMT Hardjodiningrat (Patih), R.Ngb. Projosonto(Wedono) didaerah Tirtomoyo.

¹⁹Pasukan Siliwangi saat itu bermarkas di Srambatan, sekarang tempat itu dijadikan Apotik Medica.

Selanjutnya jenazah almarhum KRT Soewarno Honggopati Tjitrohoepojo dan yang lainnya kemudian di gali,dengan menggunakan Kereta Api jenazah-jenazah tersebut di bawa ke Solo dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Jurug, dalam upacara pemakamam tersebut dipimpin oleh Bapak Soediro sebagai Residen Surakarta.²⁰

4. Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Agresi Militer Belanda ke-2 (19 Desember 1948)

Pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda melancarkan Agresi Militer ke II. Belanda menduduki kota Yogyakarta,²¹ yang diawali dengan penerjunan pasukan payung di Lapangan Udara Maguwo, serta mengepung dan menghancurkan konsentrasi TNI. Dalam agresi kedua, Belanda berhasil menduduki Yogyakarta dan menangkap para pemimpin politik serta militer.Meskipun para pemimpin politik ditangkap, pemerintahan Republik Indonesia tidak berhenti.Sebelum ditangkap Presiden Soekarno memberikan mandat melalui radiogram kepada Menteri Kemakmuran Mr.Syafuruddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi, Sumatra Barat. Melalui PDRI, pemerintahan tetap terus berjalan. PDRI mampu memberi instruksi kepada delegasi Indonesia di forum PBB untuk menerima penghentian tembak-menembak dan bersedia berunding dengan Belanda.

²⁰Naskah,hlm. 28.

²¹Sanusi Fatah dkk, op.cit, hlm.55.

Hari Rabu tanggal 3 Agustus 1949 Presiden Soekarno dalam pidatonya mengumumkan pelaksanaan gencatan senjata yang kemudian dikenal dengan sebutan Cease Fire. Untuk melaksanakan gencatan senjata tersebut dibentuk badan yang bertugas menyelenggarakan hubungan untuk kepentingan Militer Belanda dengan Tentara Republik Indonesia, badan itu dikenal dengan nama Contact Boureau. Saat itu banyak dari tentara pejuang dan masyarakat berteriak-teriak karena pertempuran telah usai, bahkan beberapa tentara Belanda dan para pejuang berjabat tangan. “Kemudian terjadi peristiwa pemancungan terhadap tentara Belanda tetapi tidak diketahui siapa pelakunya.

Keesokan harinya tanggal 11 Agustus 1949, tentara Belanda baret hijau Greencaps melakukan penyisiran terhadap pejuang. Karena tidak menemukan para pejuang, tentara Belanda mengamuk dengan membakar rumah-rumah di kampung Gading, Patangpuluhan, Pasar Kembang, Pasang Nongko dan Punggawan. Nasib malang menimpa beberapa pedagang dan masyarakat sipil di daerah Pasar Kembang mereka diberondong tembakan oleh tentara Belanda dan beberapa diantaranya disembelih. Kira-kira 23 orang menjadi korban kekejaman tentara Belanda di Pasar Kembang.

Situasi seperti ini sempat mempengaruhi jalannya pemerintahan sipil di berbagai daerah termasuk Sukoharjo, saat itu Sukoharjo dibawah pimpinan Ismangil Prodjokretarto, yang merupakan Pamong Praja lulusan MOSVIA. Pemerintahan daerah dalam suasana pemerintahan militer waktu

itu selalu berpindah-pindah karena kondisi keamanan yang tidak menentu. Pada waktu itu Sukoharjo terdapat dua istilah yaitu daerah dalam dan daerah luar guna membedakan daerah-daerah yang diduduki Belanda dan Gerilyawan.²²

Sebulan setelah terjadi gencatan senjata tersebut, tepatnya pada bulan September 1949, Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo kembali ke Kota Sukoharjo dengan Bupati tetap dijabat oleh Ismangil Prodjokretarto, sedangkan Komandan PMKB, dijabat oleh Mayor Soenaryo, yang segera melakukan pembenahan-pembenahan kepada jajaran masing-masing yang sudah tidak teratur sebagai akibat dari Agresi Militer Belanda ke-2.

Setelah suasana menjadi lebih baik Ismangil Prodjokretarto di tarik oleh pemerintah pusat, dan jabatan Bupati digantikan oleh Brotosenaryo pada pertengahan tahun 1950. Walaupun dalam suasana pergolakan politik yang tidak menentu, Pemerintah Pusat masih berusaha keras untuk menciptakan iklim yang baik dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan mengeluarkan UU. No. 22 / 1948, tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah yang diundangkan pada tanggal 10 Juli 1948, yang bertujuan untuk lebih memperluas maksud dan tujuan UU. No. I / 1945.²³

Namun kenyataannya, karena situasi yang tidak memungkinkan akibat pergolakan politik seperti : pemberontakan PKI Madiun, Aksi

²²Daerah dalam adalah daerah yang dikuasai oleh Tentara Belanda, sedangkan daerah luar merupakan daerah yang diduduki oleh Pemerintah Militer atau sering disebut dengan daerah Gerliya.

²³ Suprpto, op.cit, hlm. 36.

Militer Belanda ke-2 dan lain-lain. UU. No. 22 / 1948 belum dapat dijalankan, sehingga tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Pemerintah Daerah mulai berjalan teratur dalam suasana yang tenang, Pimpinan Daerahnya silih berganti dengan aturan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 1950, lahirlah UU No. 13 / 1950, yang mengatur tentang penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat kepada Daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, karena masih banyak diperlukan persiapan-persiapan, maka pelaksanaan Otonomi di Kabupaten Sukoharjo secara nyata baru dapat dilaksanakan pada tanggal 17 Nopember 1950.²⁴

²⁴*Ibid,*

BAB IV
PERKEMBANGAN SISTEM PEMERINTAHAN DI KABUPATEN
SUKOHARJO TAHUN 1946-1950

A. Tinjauan Umum

Pergolakan yang terjadi di Kota Surakarta, semenjak proklamasi 17 Agustus 1945, begitu berpengaruh terhadap kelahiran Kabupaten Sukoharjo, karena sejalan dengan perubahan tentang status Pemerintahan yang memisahkan Kabupaten Karanganyar dengan Kabupaten Mangkunegaran, lahirlah Kabupaten Sukoharjo sebagai ekspresi pemisahan dari Kabupaten Kota Surakarta. Peristiwa inilah hakekatnya yang memisahkan Sukoharjo yang terdiri atas tiga Kawedanan, yaitu Kartasura, Sukoharjo, dan Bekonang dari pergolakan Politik yang terjadi seperti halnya gerakan anti Swapraja yang sempat mengubah warna Surakarta sebagai Daerah Istimewa menjadi Pemerintahan Daerah dengan nama Kota Surakarta sejak 16 Juni 1946 yang secara *defacto* telah ditetapkan sebagai Hari Jadi Pemerintah Daerah Kotamadya Surakarta.¹

Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, praktis dimulai kegiatannya semenjak 15 Juli 1946, yang akhirnya disepakati dan ditetapkan menjadi Hari Lahir Kabupaten Sukoharjo. Untuk memudahkan memahami tentang perkembangan pemerintahan di Kabupaten Sukoharjo, penulis mencoba membuat periodisasi dengan mendasarkan ketentuan Perundang-undangan yang mengaturnya. Periodisasi itu dapat dikemukakan sebagai berikut :

¹ Naskah Sejarah Hari Lahirnya Kabupaten Sukoharjo, hlm 45.

1. Periodisasi menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1945.
2. Periodisasi menurut undang-undang No. 22 Tahun 1948.
3. Periodisasi menurut Undang-Undang NIT No. 44 Tahun 1950

Marilah kita singkap sejenak mengenai perkembangan sistem pemerintahan menurut periodisasi tersebut, agar dapat diketahui sejauh mana Pemerintah Pusat untuk mewujudkan Pemerintahan daerah sebagaimana yang tersurat menurut pasal 18 Undang-undang Dasar 1945.

B. Perkembangan Pemerintahan di Kabupaten Sukoharjo.

1. Periode menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1945.

Walaupun ketentuan secara formal yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah belum ada, namun dengan lahirnya Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1945 ini yang didalamnya mengatur kedudukan Komite Nasional Daerah, dapat dikatakan bahwa Undang-undang ini merupakan Undang-undang yang mengatur pertama kali tentang DPRD diseluruh Indonesia, sebagai Negara Kesatuan berdasarkan UUD 1945, yang pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. Di Daerah ada Badan Perwakilan Rakyat Daerah (BPRD) yang menjalankan tugas legislative, yang keanggotaannya terdiri dari semua unsur yang ada dalam masyarakat.
- b. Badan Eksekutif menjalankan tugas Pemerintahan sehari-hari dan anggota-anggotanya dipilih dari dan oleh Badan Perwakilan Rakyat Daerah.²

² *Ibid.* , hlm. 46.

- c. Baik badan Perwakilan Rakyat Daerah dan badan Eksekutif dipimpin oleh Kepala Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka Bupati sebagai Kepala Daerah adalah pimpinan Badan Eksekutif dan Legislatif (berfungsi ganda) yang keanggotaannya dapat dikemukakan sebagai berikut.

- a. Sdr. Mr. Dalyono.
- b. Sdr. Prodjosododo.
- c. Sdr. Ronomarsono.
- d. Sdr. Dasoeki.
- e. Sdr. Djoewardi

Yang kemudian dibubarkan setelah BPRD terbentuk.

Untuk kabupaten Sukoharjo BPRD ditunjuk oleh Bupati dengan anggota 22 orang dan sebagai ketua dipegang oleh Bupati, sedang sebagai anggota adalah Badan Eksekutif yang ditunjuk oleh Bupati, lima orang dari anggota BPRD tersebut yaitu.³

- a. Sdr. Dwijosukarto, dari partai Masyumi sebagai Kepala Bagian Pemerintahan.
- b. Sdr. Wiryodikromo, dari partai Nasional Indonesia sebagai Kepala Bagian Pembangunan.
- c. Sdr. Dwijosuparto, dari Partai Komunis Indonesia sebagai Kepala Bagian Pertanian.
- d. Sdr. Abdullah, dari Barisan Benteng, sebagai Kepala bagian Sosial.

³ *Ibid.*, hlm. 47.

e. Sdr. Slamet Sri Darmojo, dari Partai Buruh Indonesia, sebagai Kepala Bagian Penghasilan Daerah.

Adapun tugas-tugas masing-masing kepala bagian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.⁴

a. Bagian Pemerintahan bertugas :

- 1) Melakukan segala sesuatu untuk menyelesaikan permasalahan dibidang ketataprajaan, pengembangan perkotaan, pemerintahan dan kependudukan.
- 2) Melakukan kegiatan dibidang ketataprajaan, pengembangan perkotaan, pemerintahan desa, kependudukan dan ketertiban.
- 3) Menyelenggarakan tata usaha Bagian.

b. Bagian Pembangunan bertugas :

- 1) Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Wilayah atau Daerah dibidang Pembangunan yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan-bantuan Pembangunan dan dana-dana Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat.
- 2) Mengumpulkan, memelihara dan mengolah data-data serta menyajikan Dokumentasi Informasi.
- 3) Melakukan Koordinasi Penyusunan Pogram Tahunan pembangunan Daerah dalam lingkungan Sekretariat Wilayah atau

⁴ *Ibid.* , hlm. 73.

Daerah dan satuan organisasi lain yang ditugaskan kepada bagian pembangunan.

- 4) Mengadakan Pengendalian Administratif Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan pembangunan dan dana-dana pembangunan lain dari Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat.⁵
- 5) Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan.

c. Bagian Sosial bertugas :

Membantu Bupati Kepala Daerah dibidang Sosial Politik di Kabupaten Sukoharjo, yang sehari-hari bertanggung jawab kepada bupati KDH, dan secara fungsional teknis dibina oleh Direktorat Sospol Provinsi.

d. Bagian Penghasilan Daerah bertugas :

- 1) Melaksanakan segala usaha dan kegiatan pungutan, pengumpulan pemasukan pendapatan Daerah kedalam Kas Daerah secara maksimal, baik terhadap sumber pendapatan Daerah yang ada maupun dengan penggalan sumber-sumber Pendapatan Daerah yang baru berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

⁵ *Ibid.*, hlm. 89.

- 2) Mengadakan penelitian dan mengevaluasi tata cara pemungutan pajak, Retribusi dan pungutan-pungutan lainnya maupun pungutan-pungutan Pemerintah Pusat yang telah diserahkan kepada Daerah, guna menciptakan dan atau mencari sistem-sistem yang lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- 3) Memimpin dan mengkoordinir seluruh usaha dibidang pungutan dan pendapatan daerah berdasarkan ketentuan baik yang digariskan oleh Pemerintah Daerah.⁶

Adapun Kepala Daerah yang memegang Pimpinan Eksekutif atau legislative pada saat itu adalah K.R.M.T. Soewarno Honggopati Tjitrohoeprojo, sebagai Bupati Sukoharjo yang pertama. Perangkat Pamong Projo pada saat itu dijabat oleh :

- a. R.M.T. Samtanus Harjodiningrat, sebagai Patih.
- b. Soetono Tarukeroto, sebagai Sekretaris.

Walaupun belum ada Pemerintahan Daerah seperti sekarang ini, namun jalannya Pemerintahan pada waktu itu sudah diwarnai oleh kehidupan demokrasi dalam bentuk yang masih sederhana, karena Kepala Daerah dalam menjalankan tugasnya sehari-hari sudah didampingi oleh lembaga Legislatif.

2. Periode menurut Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1948.

Undang-undang No. 22 Tahun 1948, merupakan penyempurnaan dari Undang-undang No. 1 Tahun 1945 yang telah mempertegas

⁶ *Ibid.* , hlm. 115.

pengertian Pemerintah Daerah sebagai Pemerintahan sendiri yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan hak otonom. Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Sukoharjo sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948, telah mempengaruhi jalannya Pemerintahan sehari-hari, karena pada saat itu masih dalam suasana politik yang tidak menentu akibat pergolakan politik yang terjadi ditingkat pusat.⁷

Pertentangan kabinet yang tak mampu diselesaikan dalam forum mufakat telah mendorong timbulnya pemberontakan PKI Madiun yang terkenal dengan Affair madiun, yang sempat menewaskan Bupati Sukoharjo dengan beberapa putera-putera terbaik lainnya, yaitu seorang Komandan Polisi Bapak Murti Pranoto dan Patih R.M.T. Hardjodiningrat.

Pada saat itu Bupati sebagai Kepala Daerah dalam menjalankan tugas sehari-hari dibantu oleh sebuah Dewan yang disebut Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang anggotanya dipilih dari dan oleh DPRD, yang kemudian dibagi kedalam bidang tugasnya masing-masing seperti halnya sekarang dalam komisi-komisi. Dengan demikian kedudukan Kepala Daerah adalah sekaligus menjadi ketua merangkap menjadi DPD.

Undang-undang nomor : 22 Tahun 1948 ini juga sudah mengenal istilah sekretaris DPRD, yang berdasarkan ketentuan pasal 20 dari UU No. 22 Tahun 1948 tersebut, sekretaris DPRD sekaligus menjabat

⁷ *Ibid.* , hlm. 47.

sebagai sekretaris Kepala Daerah. Keadaan ini mungkin terjadi karena tugas-tugas Pemerintahan belum demikian kompleknya seperti sekarang ini. Kondisi Pemerintahan seperti ini berlangsung hingga tahun 1950, saat berlakunya konstitusi RIS yang mengenal adanya Negara Indonesia Serikat.

Pada saat itu unifikasi hukum perundang-undangan yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah di seluruh Indonesia agak mengalami gangguan. Walaupun kita sudah kembali kepada bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia semenjak 17 Agustus 1950 dengan UUDS tahun 1950, namun Undang-undang yang mengatur tentang Pemerintah Daerah masih menggunakan UU. Nomer 22 Tahun 1948.

UU Nomor 22 Tahun 1948. Secara substansial kebijakan pemerintahan daerah yang tercermin dari UU ini bisa dikatakan cukup memadai. Berbagai keragaman lokal mendapat apresiasi, yang tercermin dalam pengakuan terhadap daerah-daerah yang mempunyai hak asal-usul. Hal itu memang sangat jumbuh dengan maksud dan tujuan UU No. 22 Tahun 1948 ini. Berdasarkan hasil penelitian R. Joeniarso, bahwa sesuai pertimbangan UU ini hanya mengatur pemerintah lokal yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri saja. Tentang pemerintah lokal administratif sebagaimana dimungkinkan keberadaannya oleh UUD 1945, tidak disinggung sama sekali. Dan, sebenarnya ada maksud untuk menghapuskan keberadaan pemerintah lokal administratif Beberapa

maksud yang esensial dari UU Nomor 22 Tahun 1948 dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Menciptakan ketunggalan perundang-undangan pemerintahan daerah untuk semua jenis dan tingkat daerah guna memupuk rasa persatuan antara daerah-daerah otonom.
- b. Menciptakan persamaan cara pemerintahan di Jawa/Madura dengan diluar pulau tersebut.
- c. Menghilangkan pemerintahan didaerah yang dualistis.
- d. Fungsi mendekatkan rakyat dan daerah tingkat terbawah dengan pemerintah pusat.
- e. Penerapan desentralisasi yang merata di seluruh wilayah negara RI.
- f. Pemberian otonomi dan medebbeeind yang luas.
- g. Pendemokrasian pemerintahan daerah.
- h. Mendekatkan rakyat dan daerah terbawah dengan pemeintah pusat.
- i. Pendinamisan kehidupan desa dan wilayah-wilayah lainnya yang sejenis dengan ini.
- j. Menciptakan pendemokrasian pemerintah “Zelf Bestuurrende Landschappen”. Kerajaan-kerajaan warisan masa lampau dengan sifatnya yang *otokratis* dan *feodal* dijadikan bagian dari wilayah RI yang berhak mengatur rumah tangga daerahnya sesuai dengan azas-azas yang dianut oleh negara. (The Liang Gie, 1993 : 104-105).

Daerah-daerah yang dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dapat dibedakan dalam *dua* jenis, yaitu daerah otonom

(biasa) dan daerah Istimewa. Daerah dibedakan dalam *tiga* tingkatan, yaitu Propinsi, Kabupaten/Kota Besar dan Desa/Kota Kecil. Masing-masing daerah diberi kekuasaan mengelola sumber-sumber keuangannya sendiri.⁸

Pemerintah daerah terdiri atas DPRD dan DPD, yang masing-masing mempunyai ketua. Ketua DPRD dipilih oleh dan dari para anggota DPRD sedangkan ketua DPD adalah Kepala daerah. Jadi kini KDH tidak merangkap kedua jabatan itu seperti ditentukan dalam UU No. 1 /1945. Selain itu Kepala Daerah dan DPD, baik bersama-sama atau masing-masing bertanggung jawab kepada DPRD, dan wajib memberi keterangan-keterangan yang diminta DPRD. Kepala daerah diangkat oleh pemerintah pusat, Kepala Daerah Provinsi oleh Presiden, Kepala Daerah Kabupaten/Kota oleh Menagri, Kepala Daerah Desa oleh Kepala Daerah Provinsi. Kepala Daerah sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai fungsi mengawasi pekerjaan DPRD dan DPD dan sebagai Ketua dan anggota DPD yang merupakan organ Pemerintah Daerah.

Kebijakan pemerintahan daerah melalui UU No. 22 Tahun 1948 bisa dikatakan sangat desentralistik dalam arti politis bukan sekedar dekonsentrasi berusaha menghapus daerah administratif sehingga semua daerah bersifat otonom. Dengan pola hubungan dalam susunan hierarkhis dibarengi pengawasan preventif dan represif akan menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan. Selain itu pola rekrutmen kepemimpinan daerah

⁸ *Ibid.* , hlm. 46.

yang sentralistik yakni diangkat bukan sekedar ditetapkan oleh pemerintah pusat akan sulit menciptakan kepemimpinan pemerintahan daerah yang otonom. UU ini belum sempat dilaksanakan secara mapan, karena disusul terjadinya perang Agresi Belanda II yang mengakibatkan terbentuknya Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) setelah terjadi KMB. Selanjutnya UU No. 22 Tahun 1948 hanya berlaku di Negara Bagian RI saja.

Kepala Daerah Kabupaten Sukoharjo saat itu dijabat oleh Bapak Ismangil Projokretarto, Sekretaris Kepala Daerahnya dijabat oleh Bapak Soewono Pranoto, sedangkan keanggotaan DPRD adalah sebagai berikut ini:

- a. Yadi Sudiby
- b. Hardjo Wardojo
- c. Dwijo Admodjo
- d. Siswo Sardjono
- e. Djojo Dihadjo.

3. Periode menurut Undang-Undang NIT No. 44 Tahun 1950

UU NIT Nomor 44 Tahun 1950. Jiwa UU ini mendekati UU 22/1948, hanya disesuaikan dengan struktur negara bagian. Undang-undang NIT 44/1950 menetapkan bahwa NIT tersusun atas dua atau tiga tingkatan daerah otonom yang bertingkat, dari tingkat yang tertinggi masing-masing adalah :

- a. Daerah

b. Daerah Bagian

c. Daerah Anak Bagian.

Daerah berada dibawah pengawasan Pemerintah Negara Indonesia Timur (NIT). Sebaliknya Daerah sendiri mengawasi Daerah Bagian dan Daerah Anak Bagian. Pengawasan ini baik bersifat preventif (hak mengesahkan) maupun represif (Hak menunda/membatalkan). Terhadap penolakan mengesahkan suatu keputusan oleh Daerah dapat diajukan keberatan oleh “Daerah Bagian” atau “Daerah Anak Bagian” kepada Pemerintah NIT, sedangkan penolakan pengesahan oleh Pemerintah NIT suatu Daerah dapat banding kepada pemerintah RIS. Daerah mempunyai hak memungut pajak dan mengadakan pinjaman uang menurut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan., yaitu peraturan-peraturan warisan masa Hindia Belanda maupun yang dibuat oleh Negara Indonesia Timur .⁹

Pada masa berlakunya UU ini peran Pemerintahan Umum Pusat di Daerah yang dilaksanakan Pamong Praja masih begitu kuat -- sehingga seolah-olah terdapat dualisme pemerintahan daerah, dan ini akan di hilangkan dengan UU tersebut, diperkuat dengan Kepmendagri No. Pen.10/2/18 tahun 1957, yang bermaksud :

a. Merealisasikan pemerintahan daerah tunggal, dengan bentuk Dewan (DPRD dan DPD).

⁹ *Ibid.* , hlm. 48.

b. Meniadakan wakil pemerintah pusat yang mempunyai wewenang dalam pemerintahan umum seperti Pamong Praja di daerah.

Dengan ketentuan adanya badan legislatif daerah itu, daerah otonom dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal ini berarti daerah tersebut mempunyai kekuasaan politik. Namun demikian dapat dikatakan desentralisasi yang dianut lebih bermakna dekonsentrasi dari pada devolusi. Terutama bila dilihat dari kedudukan kepala badan legislatif yang dirangkap oleh kepala daerah. Sementara kepala daerah mempunyai fungsi ganda, yakni sebagai perangkat daerah sekaligus perangkat pemerintah pusat. Dualisme fungsi kepala daerah berarti pula bobot pelaksanaan fungsi lebih kepada sebagai perangkat pemerintah pusat. Perwujudannya adalah pertanggung jawaban kepala lebih kepada pemerintah pusat dari pada kepada DPRD. Susunan daerah yang bersifat hierarkhis mempunyai implikasi terhadap pengawasan yang kuat terhadap berbagai tingkat daerah. Dengan demikian dalam berbagai kebijakan pemerintahan daerah nuansa sentralisasi masih sangat terasa.

Jika dilihat dari segi pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah, sebenarnya belum ada batasan yang tegas antara pelaksanaan otonomi dengan *medebewind*, sehingga daerah mengatur urusan-urusan mengenai keamanan dan ketertiban. Disamping tugas mengatur (otonomi) daerah-daerah juga mengurus hal-hal yang hubungan dengan perjuangan kemerdekaan beserta akibat-akibatnya, seperti mengadakan Fonds Kemerdekaan, menyelenggarakan pemindahan pengungsi dsb. Keadaan

demikian memang tidak terlepas dari suasana politik dalam negeri Indonesia masa itu, sehingga fungsi pemerintahan daerah dilaksanakan berkaitan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan dalam rangka “*nation building*”. Ditambah dengan permasalahan yang kompleks yang menuntut pengaturan yang sangat banyak, tidak mungkin merombak secara total berbagai peraturan yang telah ada sebelumnya. Dengan pemahaman demikian kebijakan desentralisasi masih belum bergeser terlalu jauh dari pelaksanaan desentralisasi pemerintahan Hindia Belanda, yakni penekanan pada desentralisasi administrasi bukan desentralisasi politik. Sehingga pada masa demokrasi liberal ini, dalam pelaksanaan pemerintahan realitas pengaturan formal itu sangat terasa lebih sentralistis daripada desentralistis.

Pemerintah Daerah Sukoharjo mulai berjalan teratur dalam suasana yang tenang, pimpinan daerahnya silih berganti dengan aturan yang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 1950, lahir UU No. 13/1950 Tentang : Pembentukan Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah, yang mengatur tentang penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat kepada Daerah, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Karena masih banyak diperlukan persiapan-persiapan, maka pelaksanaan otonomi di Kabupaten Sukoharjo secara nyata baru dapat dilakukan pada tanggal 17 Nopember 1950.

Dalam kaitannya pelaksanaan otonomi berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 1950, para Pejabat Pemerintahan pada waktu itu adalah :

- a. Bupati dijabat oleh Bapak Brotosunaryo
- b. Patih dijabat oleh Bapak Projosutejo
- c. Sekretaris dijabat oleh Bapak Swono Pranoto.

Demikian sekilas lintas sejarah Kabupaten Sukoharjo menurut periode perundang-undangan tahun 1945 sampai akhir tahun 1950. Perjalanan sejarah selanjutnya, Kabupaten Sukoharjo telah mulai memasuki kehidupan otonomi, dalam kondisi yang serba kekurangan, yaitu belum lancarnya pemugutan pajak dan restribusi, belum terolahnya potensi sumber daya alam dan belum berjalannya perimbangan keuangan dari Pemerintah Pusat.

C. Perkembangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukoharjo

1. Sebelum Tahun 1950, setelah Indonesia Merdeka di Daerah termasuk Kabupaten *kutha* Surakarta yang wilayahnya meliputi Kabupaten Sukoharjo sekarang, segera terbentuk KNI Daerah. Daerah terbentuknya Hamite Kota Surakarta berubah menjadi Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 15 Juli 1946 dan segera pula terbentuk BPR (Badan Perwakilan Rakyat). Dengan terbentuknya BPR ini maka KNI Daerah Surakarta dibubarkan.¹⁰
2. Pada tahun 1950 keluarlah Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1950 tanggal 14 Agustus 1950 tentang pembentukan DPRS dan Dewan

¹⁰ *Ibid.* , hlm. 53.

Pemerintahan. Atas dasar PP Nomor 39 Tahun 1950 terbentuknya DPRD Kabupaten Sukoharjo yang dilantik secara resmi pada tanggal 17 Nopember 1950 dan pada waktu itu juga BPR dibubarkan. (perlu diketahui bahwa pada tahun 1948 terbentuk UU Nomer 22 Tahun 1948 tentang Pemerintah Daerah yang dalam bagian II Pasal 3 s/d Pasal 12 mengatur DPRD, namun belum sampai ketentuan ini terlaksana sudah disusul PP No. 39/1950).

3. Dengan terbentuk dan berlakunya UU No. 1 Tahun 1950 tentang pokok-pokok Pemerintah Daerah, maka DPRD juga disesuaikan dengan Undang-undang tersebut.

D. Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan.

1. Bagian Pembangunan.

Tugas dalam bidang pembangunan Kabupaten diserahkan kepada bagian pembangunan sekretaris wilayah Daerah Kabupaten (SETWILDA). Tugas sekretaris wilayah daerah adalah melaksanakan pembangunan yang dibiayai oleh dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan-bantuan pembangunan dan dana-dana Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat, tugas-tugas tersebut antara lain :

- a. Mengumpulkan, memelihara, mengolah data-data dan menyajikan dokumentasi informasi.

- b. Melakukan Koordinasi Penyusunan Program Tahunan pembangunan Daerah dalam lingkungan Sekretariat Wilayah/Daerah dan satuan Organisasi lain yang ditugaskan kepadanya.
- c. Mengadakan Pengendalian Administratif Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan-bantuan pembangunan dan dana-dana Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat.
- d. Melaksanakan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pembangunan.¹¹

2. Bagian Pemerintahan

Berdasarkan keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo nomor 061.1/055/1987 tentang uraian tugas sub bagian pada sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat II Sukoharjo dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Sukoharjo, terdiri dari

- a. Kepala Bagian pemerintahan
- b. Kepala Sub Bagian Sub Tata Praja
- c. Kepala Sub Bagian Pemerintahan Desa
- d. Kepala Sub Bagian Ketertiban
- e. Kepala Sub Pengembangan Perkotaan
- f. Kepala Sub kependudukan
- g. Staf

¹¹ *Ibid.* , hlm. 89.

Pada waktu Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo terbentuk, bagian pemerintahan disebut Sub Dit Pemerintahan, Kepala Sub Ditnya adalah Pariman Sastro Suwiryono. Kemudian Diubah menjadi deputy I pemerintahan, Kepala Deputy I Pemerintahan saat itu dijabat oleh Drs. Ahmad Purwadi. Selanjutnya diubah lagi menjadi bagian pemerintahan yang dijabat oleh Darsono, SH.

Bidang tugas pokok bagian pemerintahan adalah sebagai berikut.

- a. Melakukan segala sesuatu untuk menyelesaikan masalah dibidang ketataprajaan, pengembangan perkotaan, pemerintahan dan kependudukan.
- b. Melakukan kegiatan dibidang ketataprajaan, pengembangan perkotaan, pemerintahan dan kependudukan dan ketertiban.
- c. Menyelenggarakan tata usaha bagian.

Bagian pemerintahan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Praja
- b. Sub Bagian Pemerintahan Desa
- c. Sub Bagian Ketertiban
- d. Sub Pengembangan Perkotaan
- e. Sub kependudukan

Sub Bagian Tata Praja mempunyai tugas :

- a. Menerima, mensistimatisasikan, menganalisa dan mengevaluasi laporan-laporan tentang Pemerintahan Wilayah Kecamatan.

- b. Mempersiapkan pengangkatan dan pemberhentian anggota dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. Mempersiapkan segala bahan yang diperlukan tentang pencalonan, pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Bupati Kepala Daerah Sekretaris Wilayah/Daerah, Pembantu Bupati Kepala Daerah serta pengangkatan dan pemberhentian Kepala Wilayah Kecamatan.

Sub bagian Pengembangan perkotaan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mensistimatisasikan, mengolah dan informasi pengembangan perkotaan.
- b. Memelihara dan menyajikan dokumentasi dan informasi pengembangan perkotaan.

Sub bagian pemerintahan desa bertugas mempersiapkan ketentuan-ketentuan tentang penggabungan, pemekaran, dan penghapusan desa. Sub bagian kependudukan bertugas menyelenggarakan pendaftaran penduduk termasuk orang asing dan sub bagian ketertiban mempersiapkan rencana penggunaan dan pembinaan Polisi pamong Praja.

3. Bagian Pengelolaan Keuangan.

Dalam pengelolaan keuangan di Kabupaten Sukoharjo dilaksanakan oleh bagian keuangan. Tugas-tugas bagian keuangan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Mempersiapkan bahan dan menyusun APBD.
- b. Mengelola administrasi keuangan daerah.

- c. Mengadakan penilaian pelaksanaan APBD.
- d. Menyusun rancangan Peraturan Daerah dalam bidang keuangan daerah.
- e. Merumuskan petunjuk-petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dalam bidang keuangan daerah.
- f. Turut serta merencanakan dan mempersiapkan ketentuan-ketentuan peningkatan pendapatan Daerah.¹²
- g. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan :Menyelenggarakan kursus atau penataran para bendaharawan-bendaharawan pembangunan wilayah, guna meningkatkan tertib administrasi dan disiplin anggaran.

E. Peradilan dan Hukum

Peradilan dan hukum yang terdapat di Kabupaten Sukoharjo masih mengadopsi peradilan dan hukum di masa Belanda yang terdiri dari Hukum Pidana dan hukum acara Pidana. Dalam pemerintahan di Kabupaten Sukoharjo bidang peradilan dan hukum dilaksanakan oleh bagian hukum dan Peradilan yang mempunyai tugas sebagai berikut.¹³

- a. Mempersiapkan Rancangan Perda dan meneliti Produk Hukum lainnya.
- b. Memberi bantuan hukum didalam dan diluar pengadilan.
- c. Melakukan penelitian dan pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan.

Bagian peradilan dan hukum dibagi lagi menjadi dua sub bagian yaitu :

- a. Sub Bagian Perundang-undangan.
- b. Sub bagian Tata Hukum.

¹² *Ibid.* , hlm. 85.

¹³ *Ibid.* , hlm. 81.

BAB V KESIMPULAN

Dari uraian yang panjang dan lebar dari penulisan skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

Sukoharjo merupakan kabupaten muda yang lahir seiring dengan Proklamasi Kemerdekaan RI 1945. Sebelum tahun 1945 Sukoharjo bukan merupakan kabupaten, melainkan hanya berupa daerah kawedanan dan masuk dalam Kekuasaan Kasunanan. Pada masa pendudukan Jepang perekonomian di wilayah Sukoharjo dan sekitarnya mengalami kemunduran, sehingga banyak masyarakat yang menjadi korban dari pendudukan Jepang dan tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari seperti sedia kala.

Sesudah Indonesia merdeka, terjadi pergolakan politik yang mempersoalkan kedudukan Surakarta sebagai daerah istimewa. Didalam pergolakan ini dan memuncaknya perjuangan rakyat menentang Pemerintahan Daerah Istimewa, telah dimanfaatkan oleh rakyat Surakarta untuk menyatakan membentuk Pemerintahan kota Surakarta yang berhak mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Dengan dibentuknya Kotamadya Surakarta, kedudukan Kabupaten Kutho Surakarta (Kasunanan) menjadi tidak ada lagi. Hal ini yang mendorong Sukoharjo, Bekonang, dan Kartasura sebagai daerah Kasunanan ingin membentuk suatu pemerintahan sendiri menjadi satu wadah.

Berdirinya Kabupaten Sukoharjo tidak lepas dari Penetapan Pemerintah No.16/SD Tanggal 15 Juli 1946, yang merupakan landasan berdirinya Kotamadya

Surakarta. Disamping itu dengan adanya Penetapan Pemerintah tersebut Kabupaten Kutho Surakarta di hapus dan daerah di luar kota Surakarta didirikan kabupaten baru yaitu Sukoharjo. Dengan Bupati pertama KRT Soewarno Honggopati Tjitrohoepojo. Dalam perjalanan politiknya Kabupaten Sukoharjo banyak mengalami tantangan dan hambatan dari berbagai pihak.

Perjalanan pemerintahan di Sukoharjo memang diwarnai dengan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Sukoharjo begitu juga dalam menjalankan pemerintahan banyak sekali gangguan-gangguan yang terjadi selama berlangsungnya pemerintahan Sukoharjo sejak awal berdiri. Peristiwa-peristiwa itu diantaranya pada masa Agresi militer Belanda Pertama yang berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan.

Pemberontakan PKI juga terjadi di Sukoharjo. PKI banyak membuat kekacauan di Surakarta yang berpengaruh juga sampai Sukoharjo. Pucaknya adalah pembunuhan yang dilakukan oleh PKI terhadap Bupati Sukoharjo pada saat itu yakni KRT Soewarno Honggopati Tjitrohoepojo, selain melakukan pembunuhan kepada Bupati Tentara Merah yang akhirnya dikenal dengan sebutan PKI juga melakukan pembunuhan terhadap RMT Hardjodiningrat (Patih), R.Ngb. Projosonto (Wedono) di daerah Tirtomoyo. Selanjutnya jenazah almarhum KRT Soewarno Honggopati Tjitrohoepojo dan yang lainnya kemudian digali, dengan menggunakan Kereta Api jenazah-jenazah tersebut di bawa ke Solo dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Jurug, dalam upacara pemakamam tersebut dipimpin oleh Bapak Soediro sebagai Residen Surakarta.

Dan peristiwa yang terakhir yang mewarnai perjalanan pemerintahan di Kabupaten Sukoharjo adalah saat Belanda melancarkan Agresi Militer Belanda kedua (19 Desember 1948), yang bukan hanya berpengaruh pada pemerintahan di Kabupaten Sukoharjo saja melainkan juga berpengaruh di tingkat pusat yang ditandai dengan berhasilnya Belanda menduduki Yogyakarta dan menangkap pemimpin politik serta militer.

Situasi seperti ini sempat mempengaruhi jalannya pemerintahan sipil di berbagai daerah termasuk Sukoharjo, saat itu Sukoharjo dibawah pimpinan Ismangil Prodjokretarto, yang merupakan Pamong Praja lulusan MOSVIA. Pemerintahan Daerah dalam suasana pemerintahan militer waktu itu selalu berpindah-pindah karena kondisi keamanan yang tidak menentu. Pada waktu itu di Sukoharjo terdapat dua istilah yaitu daerah dalam dan daerah luar guna membedakan daerah-daerah yang diduduki Belanda dan Gerilyawan.

Pergolakan yang terjadi di Kota Surakarta, semenjak proklamasi 17 Agustus 1945, begitu berpengaruh terhadap kelahiran Kabupaten Sukoharjo, karena sejalan dengan perubahan tentang status Pemerintahan yang memisahkan Kabupaten Karanganyar dengan Kabupaten Mangkunegaran, lahirlah Kabupaten Sukoharjo sebagai ekspresi pemisahan dari Kabupaten Kota Surakarta. Peristiwa inilah hakekatnya yang memisahkan Sukoharjo yang terdiri atas tiga Kawedanan, yaitu Kartasura, Sukoharjo, dan Bekonang dari pergolakan Politik yang terjadi seperti halnya gerakan anti Swapraja yang sempat mengubah warna Surakarta sebagai Daerah Istimewa menjadi Pemerintahan Daerah dengan nama Kota

Surakarta sejak 16 Juni 1946 yang secara *defacto* telah ditetapkan sebagai Hari Jadi Pemerintah Daerah Kotamadya Surakarta.¹

Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, praktis dimulai kegiatannya semenjak 15 Juli 1946, yang akhirnya disepakati dan ditetapkan menjadi Hari Lahir Kabupaten Sukoharjo. Untuk memudahkan memahami tentang perkembangan pemerintahan di Kabupaten Sukoharjo, penulis mencoba membuat periodisasi dengan mendasarkan ketentuan Perundang-undangan yang mengaturnya. Periodisasi itu dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Periodisasi menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1945.
2. Periodisasi menurut undang-undang No. 22 Tahun 1948.
3. Periodisasi menurut Undang-Undang NIT No. 44 Tahun 1950.

Sebelum Tahun 1950, setelah Indonesia Merdeka di Daerah termasuk Kabupaten kota Surakarta yang wilayahnya meliputi Kabupaten Sukoharjo sekarang, segera terbentuk KNI Daerah. Daerah terbentuknya Hamite Kota Surakarta berubah menjadi Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 15 Juli 1946 dan segera pula terbentuk BPR (Badan Perwakilan Rakyat). Dengan terbentuknya BPR ini maka KNI Daerah Surakarta dibubarkan.²

Pada tahun 1950 keluarlah Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1950 tanggal 14 Agustus 1950 tentang pembentukan DPRS dan Dewan Pemerintahan. Atas dasar PP Nomor 39 Tahun 1950 terbentuknya DPRD Kabupaten Sukoharjo yang dilantik secara resmi pada tanggal 17 Nopember 1950 dan pada waktu itu juga BPR dibubarkan. (perlu diketahui bahwa pada tahun 1948 terbentuk UU

¹ Naskah Sejarah Hari Lahirnya Kabupaten Sukoharjo, hlm 45.

² *Ibid.* , hlm. 53.

Nomer 22 Tahun 1948 tentang Pemerintah Daerah yang dalam bagian II Pasal 3 s/d Pasal 12 mengatur DPRD, namun belum sampai ketentuan ini terlaksana sudah disusul PP No. 39/1950). Dengan terbentuk dan berlakunya UU No. 1 Tahun 1950 tentang pokok-pokok Pemerintah Daerah, maka DPRD juga disesuaikan dengan Undang-undang tersebut.

Tugas dalam bidang pembangunan Kabupaten diserahkan kepada bagian pembangunan sekretaris wilayah Daerah Kabupaten (SETWILDA). Tugas sekretaris wilayah daerah adalah melaksanakan pembangunan yang dibiayai oleh dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan-bantuan pembangunan dan dana-dana Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat. Dalam pengelolaan keuangan di Kabupaten Sukoharjo dilaksanakan oleh bagian keuangan. Peradilan dan hukum yang terdapat di Kabupaten Sukoharjo masih mengadopsi peradilan dan hukum di masa Belanda yang terdiri dari Hukum Pidana dan hukum acara Pidana.

Kabupaten Sukoharjo akhirnya tumbuh menjadi suatu Kabupaten yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan melalui perjuangan yang cukup rumit, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekarang Sukoharjo sudah menjadi kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo yang berstatus otonom dengan landasan UU No. 5 Tahun 1974.

DAFTAR PUSTAKA

A. ARSIP :

Berkas Macam-macam masalah tahun 1949-1950. Koleksi Arsip no. 366

Penetapan Pemerintah nomor 16/sd Tahun 1946 Presiden Republik Indonesia.
Koleksi Kabupaten Sukoharjo.

Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Sukoharjo, (1986) tentang *Hari Lahir Kabupaten Sukoharjo*, Sukoharjo :Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Soewarno Honggopati. Pejabat Mangkunegaran yang Menjadi Bupati Sukoharjo. Koleksi Arsip Mangkunegaran No.1881.

B. BUKU :

Abdul Harris Nasution, 1977. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia jilid 2*. Bandung : Angkasa.

_____, (1978). *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia jilid 5 Periode Agresi Militer Balanda I*. Bandung : Angkasa.

_____, (1979). *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia jilid 5 Periode Agresi Militer Balanda II*. Bandung : Angkasa.

_____, (1980). *Pokok-Pokok Gerilya : Dan Pertahanan Republik Indonesia di Masa Lalu dan Yang Akan Datang*. Bandung: Angkasa

Anonim, *Maklumat Penyerahan Koti Jimu Kyoko dan seluruh Perusahaan kepada KNI Daerah Surakarta*, 1 Oktober 1945.

Anonim, 1973, *Buku Peringatan Hari Jadi ke-27 Pemerintah Daerah Kotamadya Surakarta*.

Anonim, *Buku Kenang-kenangan Perjuangan Rakyat Surakarta dari Jaman ke Jaman*.

ANRI, (1976), *Memori Seraj Jabatan 1971-1930 Jawa Tengah*, Jakarta : ANRI.

Ayatrohaedi. 1985 *Historiografi daerah : Sebuah kajian Bandingan*, Jakarta : PIDSN.

- Best, John W., (1982). *Research in Education*.terj, Sanapiah Faisal dan Mulyati Guntur Waseso.*Metode Penelitian Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Chusnul Hajati, dkk. (1997). *Peranan Masyarakat Desa di Jawa Tengah Dalam Perjuangan Kemerdekaan Tahun 1945-1949 : Daerah Kendal dan Salatiga*, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Cuplikan Bunga Rampai Sejarah, (1993), Pertempuran empat hari di Solo dan sekitarnya, Jakarta : Kerukunan Eks Anggota Detasemen II Brig 17.
- Darsiti Soeratman, (1989). *Kehidupan Dunia Keraton Surakarta 18301 1939*.
- Deliar Noor (1965). *Pengantar ke Pemikiran I*, Medan :Dwipa.
- Dudung Abdurahman, (1999).*Metode Penelitian Sejarah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu,.
- Dinas Sejarah Kodam VII/Diponegoro, (1977), Sejarah TNI Surakarta Tahun 1942-1948. Surakarta.
- Empeh Wong Kam Fu, *Almanak Tahun 1890-2000*, cetakan ke-2, Jakarta: Penerbit Sekretaiar Empeh Wong Kang Fu.
- Gottschalk, Louis (1975). *Mengerti Sejarah*.terj, Nugroho Notosusanto. Jakarta:Universitas Indonesia.
- _____,1989, *Understanding History: A Primer Historical Methode*, terj, Nugroho Notosusanto. *Mengerti Sejarah*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- George D. Larson. 1990. *Masa Menjelang Revolusi Keraton dan Menjelang Kehidupan Politik di Surakarta 1912-1942*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Guy Rocher. 1972. *A General Introduction to Sociology, A Theorithical Prespective*, Toronto : Macmillan Company of Canada.
- Koentjaraningrat. (1994). *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kodam VIII/Diponegoro, (1970), Buku Petunjuk Territorial. Surakarta.
- Leo Agung S., dan Dwi Ari Listiyani, 2003, Sejarah Nasional dan Umum, Surakarta : Sebelas Maret University Press.

- Nashkah, “*Sejarah hari Lahirnya Kabupaten Sukoharjo*”, Sukoharjo, 1986.
- Nagazumi, Akira. (1988). *Pemberontakan Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Nasution, AH, (1978). *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, Jilid 5 Agresi Militer Belanda I. DISJARAH AD DAN ANGKASA*. Bandung.
- Pringgodigdo. A.G. (1952). *Tata Negara di Djawa pada Waktu Pendudukan Jepang Dari Bulan Maret Sampai Bulan Desember 1942*. Jogja.
- Radjiman, (1998). *Sejarah Surakarta*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret.
- Sartono Kartodirdjo (1977). *Sejarah Nasional Indonesia Jilid IV*. Jakarta : Balai Pustaka.
- _____. (1982). *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia*. Jakarta : Gramedia.
- _____. (1993). *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sanusi fatah dkk, 2008, *Sejarah Nasional dan Umum*, Jakarta : Depdiknas.
- Suprato, (1985), *Menelusuri hari Lahirnya Kabupaten Sukoharjo Suatu Konsep*.
Sk. *Berita Buana*, tanggal 14 September 1977.
- Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (2002). *kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rouffaer, G.P. (1983). *Swapraja*. Terj. Surakarta: Reksopustoko.
- Thomas Wiyasa Bratawidjaja. (2000). *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

C. Majalah/Koran :

- Buletin Gerilya Yudha*. Tahun.M.IV.No.8.31 Maret 1949.
- Buletin Gerilya Yudha*, 27 April 1949.
- Buletin Gerilya Pelita Pantjasila*, No.2/VI. 14 Juni 1949.
- Djaka Lodang* no 909 17 Februari 1990, *Mbukak Sejarah Perjuangan : Serangan umum ing Solo*.

Gemari Edisi 93/Tahun IX/Oktober 2008, Mengenang pertempuran heroik para pemuda pejuang. Pertempuran 4 Hari di Kota Solo.

Jaya Baya Edisi 23 Agustus 1987, Perang Sepasar Ing Kutha Solo.

Jaya Baya Edisi 20 Agustus 1989, Kaum Militer Landa Nesu lan Pepes Atine.

Jawa Anyar No.30/1 9-15 Agustus 1993, Pertempuran 4 Dina Ing Kutha Solo (7-11 Agustus 1949).

Mekar Sari Edisi 15 Agustus 1988, Pertempuran Petang Dina Ngrebut Surakarta.

D. SKRIPSI

Bachtiar Rifa'i, 2007, "*Peranan Tentara Pelajar Solo Pada Markas Medan Tenggara (MMTG) Dalam Mempertahankan Kemerdekaan RI di Semarang dan Sekitarnya Tahun 1945-'949*", Skripsi, Semarang : Jurusan Sejarah UNNES.

Devangga Vidi Agus.M,2012, "*Serangan Umum Empat Hari Di Surakarta 7-10 Agustus 1949*". Yogyakarta : Jurusan Ilmu Sejarah UNY.

Lampiran

Lampiran 1 : Salinan Penetapan Pemerintah Nomor 16/SD Tahun 1946 Presiden
Republik Indonesia

**PENETAPAN PEMERINTAH NOMOR 16/SD TAHUN 1946 PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : Perlu untuk sementara waktu mengadakan perubahan dalam bentuk dan susunan Pemerintahan di Daerah Istimewa Surakarta dan Yogyakarta.

Mengingat : Maklumat Presiden Nomor 1 Tahun 1946.

MEMUTUSKAN

Menetapkan yang berikut :

Pertama : 1. Jabatan Komisaris Tinggi untuk daerah Istimewa Surakarta dan Yogyakarta serta jabatan wakil pemerintahan pusat di Daerah Surakarta dihapuskan terhitung mulai hari penetapan di umumkan.

2. Segenap pegawai, semua bangunan dan peralatan yang termaksud kekuasaan jabatan-jabatan tersebut pada ayat 1, diserahkan kepada pemegang jabatan termaksud pada kedua.

Kedua : Sebelum bentuk susunan Pemerintahan Daerah Kasunanan dan Mangkunegaran di tetapkan dengan undang-undang, maka daerah tersebut untuk sementara waktu dipandang merupakan “Karesidenan”, dikepalai oleh seorang residen yang memimpin segenap pegawai Pamongprojo dan Polisi serta memegang segala kekuasaan sebagai seorang Residen di Jawa dan Madura luar derah Surakarta dan Yogyakarta.

Ketiga : Didalam Karesidenan Surakarta tersebut pada kedua dibentuk suatu daerah baru dengan nama “Kota Surakarta”, yang

meliputi daerah seperti dalam Byblad-13318 tentang batas-batas kota Surakarta dan dikepalai seorang “Wali Kota”.

- Keempat : 1. Sultan Pakubuwono Sultan Yogyakarta di tunjuk sebagai pembantu Bendahara Negara untuk seluruh daerah Instansi Kasultanan dan Pakualaman di Yogyakarta.
2. Residen Surakarta sebagai “Pembantu Bendahara Negara” untuk seluruh daerah Karesidenan Surakarta termaksud pada kedua di Surakarta.
- Kelima : Pemerintah di daerah Surakarta dan Yogyakarta berada langsung dibawah Pimpinan Pemerintah Pusat.
- Keenam : Penetapan ini dimulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 15 Juli 1946

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

SOEKARNO.-

Diumumkan tanggal 15 Juli 1946

SEKRETARIS NEGARA

Ttd.

AG.PRINGGODIGDO

Lampiran 2 : Salinan peraturan Daerah tentang hari Lahir Kabupaten Sukoharjo.

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
Nomor 3 Tahun 1987 Seri D No. 2

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR 17 TAHUN 1986
TENTANG
HARI LAHIR KABUPATEN SUKOHARJO
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang :

- a. Bahwa hari lahir suatu daerah pada hakekatnya adalah merupakan awal dari perjalanan sejarah bagi suatu daerah yang bersangkutan ;
- b. Bahwa sejarah itu sendiri dapat dijadikan sebagai guru bagi suatu daerah, terutama yang sedang dalam melaksanakan pembangunan ;
- c. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Hari Lahir Kabupaten Sukoharjo yang diharapkan akan dapat menumbuhkan serta meningkatkan

semangat membangun terhadap masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;

- d. Bahwa untuk maksud tersebut telah diselenggarakan seminar Hari Lahir Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 24 Juni 1986 dan telah berhasil menyepakati Hari Lahir Kabupaten yaitu tanggal 15 Juli 1946 ;
- e. Bahwa penetapan Hari Lahir tersebut perlu dituangkan dengan Peraturan Pemerintah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintah di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG HARI LAHIR
KABUPATEN SUKOHARJO.**

Pasal 1

Hari Lahir Kabupaten Sukoharjo ditetapkan pada tanggal 15 Juli 1946, bertepatan hari Senin Pon tanggal 14 Ruwah 1877 Jimawal atau tanggal 17 Sya'ban 1365 H.

Pasal 2

Hari Lahir sebagaimana dimaksud pasal 1 Peraturan daerah ini ditandai dengan Surya Sangkala : Krida Makarya Mekaring Projo.

Pasal 3

Sejarah Hari Lahir sebagai mana dimaksud pasal 1 Peraturan Daerah ini, tercantum pada Naskah Sejarah hari lahirnya Kabupaten Sukoharjo yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah Sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Sukoharjo, 22 September 1986

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Sukoharjo
Ketua

BAMBANG SOEPARDJO

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Sukoharjo
ttd.

Drs. SUPRAPTO

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur

Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Tengah

Tanggal 15 Desember 1986 No. 188. 3/ 480/ 1986

Sekretaris Wilayah Daerah

B/Kepala Biro Hukum

ttd

WALOYO, SH

NIP. 010 019 835

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II

Sukoharjo

Nomor 3 Tanggal 9 Januari 1987 Seri D Nomor 2

Ttd

Drs. SOETJIPTO

Lampiran 3 : Maklumat dari Pakubowono XII, tanggal 30 April 1946.

Maklumat dari Pakubowono XII, tanggal 30 April 1946 yang antara lain berbunyi sebagai berikut : (Anonim, 1949)

Makloemat kepada Daerah Istimewa Soerakarta Hadiningrat. Mengingat apa yang diseboet dalam pasal 18 Anggaran Dasar kita dan Paduka Jang Moelija tanggal 19 Agustus 1945. Kami permakloemkan kepada rakyat kami, bahwa djikalau mendjadi terang mendjadi kehendak rakjat sebenar-benarnya akan lenjapnja daerah Istimewa Soerakarta Hadiningrat dan telah ditetapkan oleh Pemerintah Repoeblik Indonesia, kami tidak keberatan menjerahkan Pemerintahan kami kepada Pemerintah Agoeng Tadi.






Soerakarta tanggal 30
boelan April
Tahoen 1946




Jang Mengerdjakan Pekerdjaan
Pakoe Boewono XII

Ttd

Woerjaningrat

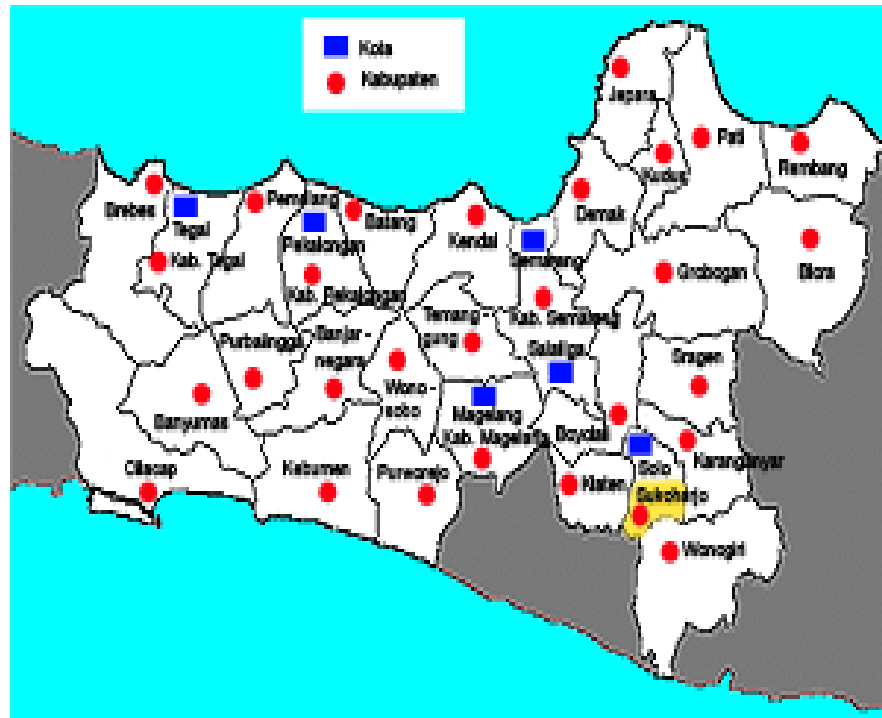
Lampiran 4 : Nama-nama Bupati Kabupaten Sukoharjo

No.	NAMA	MASA JABATAN
1.	 KMRT Soewarno Honggopati Tjitrohoepojo	1946-1948
2.	 Ismangil Projokretarto	1948- 1950
3.	 Broto Soenarjo	1950- 1956
4.	 N. Aboetholib Sastrotenojo	1956- 1962
5.	 R.NG. Wandyopranoto	1962 -1967
6.		

		1967- 1975
	Sadikin Budikusumo	
7.		Juni - 28 Okt 1975
	Soebroto Yoedasubrata (Pelaksana Tugas Harian)	
8.		8-10-1975 s/d 6-2-1984
	Gatot Amrih, SH	
9.		16-2-1984s/d15-5-1984
	Drs. Agus Soemadi (Pelaksana tugas harian)	
10.		15-5-1984 s/d 15-5-1989
	Drs. Soeprapto	
11.		15-5-1989 s/d 16-5-1994
	Drs. Setyawan Sadono	
12.		

		16-5-1994 s/d 31-7-1999
	Ir. Tedjosuminto (Diperpanjang karena Pemilu 1999)	
13.		1-8-1999 s/d 5-2-2000
	Ir. H. Sudjadi (Pelaksana tugas harian)	
14.	Bambang Riyanto, SH Drs. Muhammad Toha (Wakil Bupati)	5-2-2000 s/d 7-2-2005
15.	Ir. Suwito (Penjabat Bupati)	7-2-2005 s/d 1-9-2005
16.	Bambang Riyanto, SH Drs. Muhammad Toha (Wakil Bupati)	1-9-2005 s/d 1-9-2010
17.	H. Wardoyo, SH, MH Drs. Haryanto, MM (Wakil Bupati)	1-9-2010 s/d

Lampiran 5 : Peta Wilayah Propinsi Jawa Tengah



Lampiran 6 : Peta Wilayah yang dikuasai Indonesia dan Belanda



***Indonesia:
Situation on December 1, 1948***



Partially based on Cribb, "Historical Dictionary of Indonesia"

Lampiran 7 : Peta wilayah administratif Kabupaten Sukoharjo.



Lampiran 8 : Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Sukoharjo

Kecamatan	Kelurahan / Desa
Grogol (14 Desa)	Desa Banaran
	Desa Cemani
	Desa Manang
	Desa Sanggrahan
	Desa Kwarasan
	Desa Gedangan
	Desa Madegondo
	Desa Grogol
	Desa Langenharjo
	Desa Pondok
	Desa Parangjoro
	Desa Telukan
	Desa Pandeyan
	Desa Kadokan
Kartasura (10 Desa & 2 Kelurahan)	Desa Kertonatan
	Desa Wirogunan
	Desa Pucangan
	Kelurahan Kartasura
	Desa Ngabeyan
	Desa Singopuran
	Desa Gonilan
	Kelurahan Ngadirejo
	Desa Gumpang
	Desa Makamhaji
Desa Pabelan	
Desa Ngemplak	
Gatak (15 Desa)	Desa Krajan
	Desa Trangsan

Baki (15 Desa)

Desa Mayang
Desa Blimbing
Desa Jati
Desa Trosemi
Desa Luwang
Desa Sragen
Desa Wirogunan
Desa Wironanggan
Desa Klaseman
Desa Kagokan
Desa Tempel
Desa Geneng
Desa Sanggung
Desa Gedongan
Desa Ngrombo
Desa Mancasan
Desa Bentakan
Desa Menuran
Desa Jetis
Desa Kudu
Desa Bakipandeyan
Desa Kadilangu
Desa Duwet
Desa Siwal
Desa Waru
Desa Gentan
Desa Purbayan
Kelurahan Sukoharjo
Kelurahan Gayam
Kelurahan Jetis
Kelurahan Joho

Sukoharjo (14 Kelurahan)

	Kelurahan Mandan
	Kelurahan Begajah
	Kelurahan Banmati
	Kelurahan Kenep
	Kelurahan Combongan
	Kelurahan Dukuh
	Kelurahan Kriwin
	Kelurahan Bulakan
	Kelurahan Sonorejo
	Kelurahan Bulakrejo
Tawang Sari (12 Desa)	Desa Kateguhan
	Desa Lorog
	Desa Pundungrejo
	Desa Dalangan
	Desa Pojok
	Desa Tangkisan
	Desa Tambakboyo
	Desa Majasto
	Desa Grajegan
	Desa Ponowaren
	Desa Watubonang
	Desa Kedungjambal
Weru (13 Desa)	Desa Jatingarang
	Desa Karanganyar
	Desa Alasombo
	Desa Karakan
	Desa Tegalsari
	Desa Karangtengah
	Desa Grogol
	Desa Tawang
	Desa Karangwuni

Bulu (12 Desa)

Desa Karangmojo

Desa Weru

Desa Ngreco

Desa Krajan

Desa Bulu

Desa Ngasinan

Desa Karangasem

Desa Tiyan

Desa Kedungsono

Desa Gentan

Desa Kamal

Desa Puron

Desa Sanggang

Desa Kunden

Desa Malangan

Desa Lengking

Nguter (16 Desa)

Desa Nguter

Desa Baran

Desa Lawu

Desa Daleman

Desa Tanjung

Desa Pondok

Desa Kepuh

Desa Kedungwinong

Desa Plesan

Desa Celep

Desa Juron

Desa Serut

Desa Tanjungrejo

Desa Jangglengan

Desa Pengkol

Mojoloban (15 Desa)

Desa Gupit
Desa Joho
Desa Klumprit
Desa Laban
Desa Sapen
Desa Plumbon
Desa Tegalmade
Desa Demakan
Desa Palur
Desa Kragilan
Desa Bekonang
Desa Wirun
Desa Triyagan
Desa Gadingan
Desa Dukuh
Desa Cangkol
Desa Kenokorejo
Desa Tepisari
Desa Bulu
Desa Wonorejo
Desa Rejosari
Desa Kemasan
Desa Mranggen
Desa Polokarto
Desa Genengsari
Desa Kayuapak
Desa Jatisobo
Desa Bakalan
Desa Godog
Desa Ngombakan
Desa Karangwuni

Polokarto (17 Desa)

Bendosari (13 Desa & 1 Kelurahan)

Desa Bugel
Desa Pranan
Kelurahan Jombor
Desa Maniharjo
Desa Cabeyan
Desa Mojorejo
Desa Puhgogor
Desa Paluhombo
Desa Bendosari
Desa Mulur
Desa Toriyo
Desa Sugihan
Desa Sidorejo
Desa Gentan
Desa Mertan
Desa Jagan

Lampiran 9 : Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Sukoharjo



Lampiran 10 : Gambar Gedung Bupati Tahun 1947



Lampiran 11 : Kantor Sekretariat Kabupaten Sukoharjo tahun 1979



Lampiran 12 : Gambar Kantor DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo



